

BERITA INDONESIA®



BUSUNG LAPAR

DI SARANG KORUPSI



TokohINDONESIA
THE EXCELLENT BIOGRAPHY



MOBILE VERSION
m.tokohindonesia.com

menu

**ENSIKLOPEDI
DIREKTORI
WIKI TOKOH
BERITA
C-JOURNALISM
KOMUNITAS**

ENSIKLOPEDI ONLINE

Tokoh Indonesia DotCom, sebuah media informasi dan database online terlengkap dan terpadu perihal profil para tokoh di Indonesia yang tengah dibangun menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online. Diterbitkan sejak 20 Mei 2002 bertepatan Hari Kebangkitan Nasional.

TOKOHINDONESIA.COM
THE JOURNALISTIC BIOGRAPHY



BERITA UTAMA

- 7** BBM Siaga Satu
- 10** Derajat kemiskinan dan korupsi
- 11** Wajah kenas busung lapar
- 12** Busung lapar akibat macetnya sistem
- 14** 'Quo Vadis' Kasus Korupsi DAU

BERITA NASIONAL

- 15** Dilema Sang Bupati
- 16** Mobil Presiden di Tangan Siap?

BERITA TOKOH

- 17** Sutanto Kapolri Baru
- 16** Mobil Presiden di Tangan Siap?

BERITA HUKUM

- 22** Hebohnya Sebuah Kebebasan
- 23** Sekoper Uang di Laci Meja
- 24** Telisik yang Dibuat Pelik
- 26** Ironisme Hukum Cambuk

6

BERITA UTAMA

Busung Lapar di Sarang Korupsi

18

BERITA KHAS

Jakarta Bisa Kolaps

36

LENTERA

Monumen Milenium Ketiga

49

BERITA AGAMA

Ketika Aborsi Diperbolehkan

BERITA KESEHATAN

27 Lebih Baik Tidak Merokok

PROFIL MEDIA

28 Surat kabar Pertama Ditulis Tangan

BERITA PENDIDIKAN

29 Agar Pilihan Tak jadi Penyesalan

BERITA NEWSMAKER

30 Hendarman: "Korupsi No, Berantas Yes!"

BERITA POLITIK

32 "Lapor Pak SBY..." Kirim ke 9949

BERITA EKONOMI

46 Program RPPK, Serius atau Retorika

48 Defisit Anggaran di Titik Rawan

LINTAS TAJUK

50 Indonesia di Ambang Krisis

BERITA MANCANEGERA

52 Anak Tukang Besi Buyarkan Prediksi

LINTAS MEDIA

54 Hukum Cambuk di Serambi Mekah

BERITA OLAAHRAHA

56 Menakar Kekuatan Pra Piala Dunia

BERITA FEATURE

58 Kisah Tragis Supriono

TEKNOLOGI INFORMASI

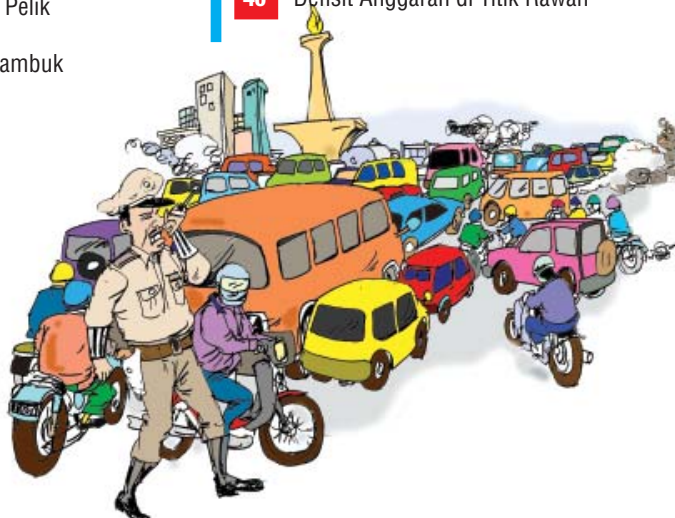
- 60** Orang Purba Flores
- 61** Revolusi Penelitian Dinosaurius
- 62** Program Microsoft Tekan Pembajakan

SENI BUDAYA

63 Keroncong Terasing di Negeri Sendiri

BERITA INFOTAINMENT

64 Balada Si Ganteng Cari Pembantu



Busung Lapar dan Korupsi

Meskipun usianya semakin uzur, Pak Harto (84) tetap peka terhadap permasalahan yang menimpa bangsanya. Mantan presiden 32 tahun itu, melalui adiknya, H. Probosutedjo, mengutarakan keprihatinannya atas bencana busung lapar yang mulai mencuat ke permukaan dari P. Lombok (*Tokoh Indonesia*, edisi Juni 2005).

Kenapa dia begitu peduli? Pak Harto, di awal pemerintahannya (1970-an), memberi perhatian khusus terhadap bencana busung lapar tahunan di NTB, terutama Lombok Selatan. Pak Harto mendeteksi akar permasalahan, mengupayakan solusi jangka pendek, menengah dan panjang. Akar kemiskinan di Lombok Selatan dan daerah-daerah lain di NTB adalah kekeringan. Lantas Pak Harto menetapkan tiga program: goranisasi, pembangunan irigasi dan perbaikan gizi.

Langkah pertama, menanam sawah-sawah tadah hujan dengan padi gogoh ranca yang tahan kekeringan. Langkah kedua, membangun jaringan irigasi untuk mengairi ribuan hektar lahan yang kering kerontang pada setiap musim kemarau. Langkah ketiga, membangun Puskesmas dan Posyandu untuk memantau dan mengawasi kondisi gizi masyarakat miskin.

Khusus di Lombok Selatan, pemerintah bekerjasama dengan Kanada, membangun sistem pengairan yang berteknologi tinggi, *high level diversion*, mengalihkan air yang berlimpah di Lombok Barat dan Timur ke Lombok Selatan lewat saluran layang. Hasilnya, ribuan hektar sawah tadah hujan diairi secara teratur, masyarakat Lombok Selatan terbebas dari kemiskinan dan busung lapar.

Sungguh mengejutkan, di tengah laporan tahunan surplus pangan, bencana busung lapar mencuat kembali di NTB. Bencana itu memang menghilang dari Lombok Selatan, tetapi mencuat dari di desa Bengkel, Lombok Barat, hanya beberapa kilometer dari Mataram, ibukota NTB. Agaknya busung lapar merupakan puncak gunung es kemiskinan yang



mengendap di bawah permukaan bertahun-tahun. Yang tak terbantahkan, pengakuan Menteri Kesehatan Siti Fadilah, bahwa di antara 4 juta penduduk NTB, ada sejuta lebih yang masih dijerat kemiskinan.

Namun ada justifikasi dari pejabat kesehatan setempat bahwa busung lapar di Lombok lebih disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap masalah gizi, bukan semata-mata kurang pangan. Padahal faktanya, gejala busung lapar mendera bayi-bayi keluarga miskin yang dibesarkan di rumah-rumah satu kamar, berdinding dan berlantai tanah, dan beratap jerami. Di situlah mereka beranak pinak, berlinggung dari kebodohan dan kehidupan yang serba kekurangan.

Apa pun dalihnya, satu hal yang tak terbantahkan bahwa busung lapar lahir dari ketidakberdayaan, ketidakpedulian dan manipulasi sosial. Karena itu, juga patut ditelusuri bahwa di Lombok, keberadaan sekat-sekat sosial seakan lestari secara alami.

Lantas apa hubungan antara busung lapar dan tindak korupsi?

Hubungan antara keduanya sangat erat, ibarat dua sisi mata uang. Korupsi telah merusak sendi ekonomi dan moral bangsa, menciptakan kemiskinan dan melemahkan daya saing bangsa. Peringkat ketiga negara terkorup di dunia, sungguh telah menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain.

Wajah korupsi bermacam-macam; misalnya, pencurian uang negara, transaksi fiktif, mark-up proyek, manipulasi pajak dan kredit bank. Kasus-kasus ini bertebaran di pelbagai lembaga negara, instansi pemerintah, perusahaan negara dan perbankan.

Skandal kredit BLBI yang menguras uang negara ratusan triliun rupiah ditalangi oleh pemerintah (Presiden Habibie, Gus Dur dan Megawati). Pemerintah menjual surat utang (obligasi) untuk menyetatkan bank-bank milik pemegang BLBI (para konglomerat). Kemudian utang itu dimasukkan ke APBN, sudah tentu dibayar dari hasil keringat rakyat (termasuk yang miskin). Skandal kredit macet bank-bank milik negara sudah tentu ditalangi oleh pemerintah, dananya dikumpulkan dari rakyat. Masih ada segudang skandal korupsi lainnya, di KPU, BPK, DPR dan berbagai departemen yang perlu ditelusuri oleh KPK.

Kejahatan korupsi telah merongrong kemampuan pemerintah membiayai proyek-proyek untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah, bahkan harus menjual surat utang untuk menutup defisit APBN. Subsidi buat rakyat (BBM) Rp 17 triliun harus dikalahkan oleh subsidi untuk orang kaya, tak kurang dari Rp 800 triliun. Jangan heran jika angka kemiskinan bertambah dari sekitar 22 juta tahun 1976 menjadi 37 juta lebih tahun 2003. Laporan ILO yang dikutip ISEI lebih mengerikan, tak kurang dari 107 juta penduduk Indonesia terancam kemiskinan.

Sangatlah ironis bahwa di antara puluhan juta orang yang bergulat dengan kemiskinan, sekelompok kecil elite mempertontonkan gaya hidup mewah. Mereka tak peduli pada saudara-saudara mereka yang hidup serba kekurangan. Kepedulian sosial telah menjadi "barang langka" di negeri ini. Jurang kaya-miskin melebar dan terus melebar.

Yang perlu ditelisik, apakah kekayaan yang mereka hancurkan diperoleh secara wajar atau hasil kejahatan korupsi. Karena mafia korupsi telah membangun sel dan jaringan yang tak mudah didobrak. ■

BBM Siaga Satu

Bahan bakar minyak kembali menciptakan gejolak. Pengadaan dan pasokan BBM pada titik kritis.

Belum usai guncangan akibat busung lapar, ulah BBM menempati berita utama hampir semua media massa cetak pusat dan daerah. Pengadaan dan pasokan BBM ke sejumlah depo di seluruh Indonesia tersendat. Pertamina kelabakan. Tempat-tempat pengisian BBM dipadati kendaraan bermotor.

Sebenarnya gejolak BBM dalam negeri merupakan riak dari gelombang kenaikan harga minyak bumi di pasar dunia. Harga naik sampai 60 dolar AS per barel pekan lalu, karena pasokan menurun akibat pembatasan produksi oleh beberapa negara produsen dan dampak langsung dari kemelut politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Tingginya harga minyak bumi di pasar dunia memiliki potensi yang sangat kuat untuk mengganggu kinerja perekonomian nasional, bahkan mengoreksi asumsi-asumsi ekonomi makro yang ditargetkan pemerintah.

Dampak ekonomis kelangkaan BBM semakin parah, ketika perusahaan pembangkit listrik juga menghadapi kelangkaan pasokan BBM. Pihak PLN terpaksa melakukan pemadaman listrik secara bergilir di beberapa daerah, khususnya Pulau Jawa. Kerugian ekonomis dari pemadaman ini, tidak hanya dirasakan masyarakat pengguna jasa listrik di perumahan, tetapi juga para pelaku industri karena harus menghentikan kegiatan produksi mereka.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Grati, di Pasuruan, menurut *Kompas* (21/6), telah mengakibatkan terhentinya pasokan listrik ke pusat-pusat industri di berbagai daerah di Pulau Jawa.

Koran ekonomi, *Bisnis Indonesia* (24/6) menempatkan rapat terbatas kabinet yang membahas krisis BBM pada *headline*. Dalam rapat yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, disepakati empat langkah penting untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Pertama, pemerintah akan fokus pada peningkatan bertahap stok BBM, dari 17,2 hari menjadi 22 hari. Kedua, mengkaji penghematan energi. Ketiga, meningkatkan proses hukum terhadap pengoplosan dan penyelundupan BBM. Keempat, peningkatan produktivitas Pertamina.

Kelangkaan BBM telah mengakibatkan merebaknya kecemasan masyarakat di berbagai daerah, hingga memicu kepanikan yang berlebihan di masyarakat. Hal ini diperburuk oleh perilaku spekulatif banyak pengecer, memanfaatkan kepanikan masyarakat untuk menaikkan harga eceran.

Koran sore, *Suara Pembaruan*, mengangkat masalah ini dalam tajuk rencana (20/6). Menurut harian ini kelangkaan BBM telah memicu kenaikan harga eceran premium hingga Rp 4.000 per liter di Sumenep, Madura. Lebih tragis lagi, di Bengkulu harga eceran mencapai Rp 6.000 per liter.

Kelangkaan BBM juga terjadi di Pontianak, karena persediaan solar hanya untuk dua hari. Di Ngajuk, Jawa Timur, kelangkaan BBM harus diantisipasi dengan pembatasan pembelian hanya sampai Rp 50.000. Di Surabaya, kelangkaan BBM juga memuncak, yang ditandai dengan terhentinya aktivitas beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kelangkaan BBM, lebih banyak disebabkan oleh menurunnya tingkat produksi sementara konsumsi meningkat terus. Menurut laporan *Bisnis*



Indonesia (25/5), sejak Januari 2005 neraca perdagangan minyak mentah Indonesia resmi memasuki masa defisit. Pada tiga bulan pertama, defisit neraca perdagangan minyak Rp 1,37 miliar. Nilai ekspor hanya 2,32 miliar dolar AS, sedangkan impor melonjak sampai 3,69 miliar dolar. Dengan demikian, posisi Indonesia sudah menjadi negara pengimpor minyak, padahal sebelumnya negara pengekspor, termasuk anggota penting dari OPEC.

Kenaikan harga minyak secara terus menerus, telah memicu kesulitan tersendiri bagi pemerintah maupun Pertamina, di luar peningkatan jumlah pembayaran. Amat sulit memprediksi harga minyak yang sesungguhnya. Pemerintah sulit menghitung jumlah uang talangan subsidi yang harus dibayarkan kepada Pertamina. Sedangkan Pertamina kesulitan menyediakan dana pembelian minyak impor.

Gejolak BBM terjadi sejak tahun 2004, mencapai puncaknya beberapa minggu lalu, ketika daerah pantai utara Jawa dan Madura mengalami kelangkaan pasokan minyak. *Kompas* pun (22/6) menurunkan tajuk di bawah judul, Kelangkaan BBM Tidak Bisa Dianggap Enteng. (fisas, Sh)

BUSUNG Mun

BUSUNG LAPAR DI SARANG KORUPSI

BOGOR - Delapan anak di bawah usia lima tahun (bawah lima) di Kota Bogor, Jawa Barat teridentifikasi mengalami gizi buruk (*marasmus*). Kota Bogor salah seorang di antaranya yang paling mengkhawatirkan dan dipantau oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat.

Secara keseluruhan, 10 kabupaten dan Kota Bogor mengalami masalah anak yang tergolong gizi buruk, masyarakat awam sering menyebutnya busung lapar, diperkirakan akan semakin banyak lagi.

Anak balita yang paling disinyalir mengkhawatirkan adalah Danur (29 bulan) dan Tini (30), warga Kelurahan Cibeureum, Kota Bogor. Danur adalah putra dari pasangan Enton dan Tini, buruh bangunan, dan Tini cacat di kaki kanannya akibat penyakit polio sejak kecil.

"Kondisi Danur sudah mulai membaik setelah dirujuk ke pihak Puskesmas Semangati, Litbang Gizi Kota Bogor. Kami pantau kondisinya seminggu sekali sambil memberikan makanan tambahan."

Adakah korelasi antara busung lapar dan korupsi? Tentu ada, dalam kaitan hukum sebab akibat. Korupsi mengakibatkan negara dan rakyat jatuh miskin.

Satu lagi tahapan tragis telah terjadi di dalam perjalanan bangsa. Fenomena busung lapar, gizi buruk dan kurang pangan merebak di seluruh penjuru negeri, sementara virus korupsi menyebar di hampir semua lembaga negara, departemen, perusahaan dan bank milik negara. Kedua fenomena tersebut, belakangan ini memenuhi halaman depan berbagai surat kabar di Indonesia.

Harian *Kompas*, dalam tajuk berjudul, Kasus Busung Lapar Sebuah Puncak Gunung Es (8/6-2005), mengupas masalah kekeringan dan kekurangan pangan di Lembata, NTT. Reaksi keras datang dari aparat pemerintah daerah ketika harian ini mengangkat masalah tersebut secara khusus.

Wapres Jusuf Kalla bereaksi cepat. Dia mengirim Dirut Perum Bulog, tetapi tidak sampai di daerah bencana. Lapornya tidak akurat, sehingga terapan pun tidak tepat. Padahal sejak Maret, kasus kurang gizi, gizi buruk dan busung lapar di sana menimpa 66.000 orang. Sudah 13 bayi dan anak-anak Balita meninggal akibat busung lapar.

Kasus busung lapar pertama kali mencuat di sejumlah media massa dari desa Bengkel, Lombok Barat, hanya beberapa kilometer dari Mataram, ibukota NTB. Sudah 8 anak meninggal karena busung lapar, 50 lainnya mengidap gizi buruk.

Anehnya, di tengah gemerlap kehidupan metropolitan Jakarta, jantung republik dan ibukota negara, bayi dan Balita yang mengidap gizi buruk dan busung lapar sementara ini tercatat 8.455 orang. (*Sinar Harapan*, 21/6-2005).

Mengutip peraih Hadiah Nobel Ekonomi Amartya Sen, *Kompas* mengupas korelasi antara demokrasi dan kebebasan pers di dalam pencegahan

dini ben-cana kelaparan. Sebab semua informasi yang buruk bisa diungkap sejak awal agar bisa segera diambil tindakan pencegahan.

Ironisnya, tulis *Kompas*, di tengah semaraknya demokrasi dan kebebasan pers, bencana busung lapar mencuat ibarat puncak sebuah gunung es. Penyebabnya, demokrasi baru difahami secara harafiah, belum secara esensial. Institusi yang dibutuhkan bagi berjalannya demokrasi belum terbentuk, apalagi berjalan. Institusi dalam sistem lama (otokrasi) dalam keadaan amburadul.

Dalam sistem otokrasi, bencana busung lapar bisa dicegah karena adanya perhatian yang begitu intens dari Presiden Soeharto dalam soal perut dan kesejahteraan rakyat. Walaupun laporan pers tidak dipercaya, pemerintah mempunyai sistem informasi yang memungkinkan presiden mengetahui secara rinci apa yang terjadi di sebuah daerah.

Seorang kepala daerah, bahkan menteri, bisa digusur apabila kedapatan tidak mampu me-

enuhi kebutuhan masyarakatnya. Apalagi jika mereka hidup bermewah-mewah, dengan fasilitas yang begitu lengkap, sementara rakyatnya dibiarkan kelaparan.

"Inilah yang sedang terjadi dihadapan kita sekarang ini," tulis *Kompas*, surat kabar harian sangat berpengaruh dan beroplag terbesar di negeri ini.

Kemewahan menjerumuskan mereka yang punya wewenang dan kekuasaan, ke dalam sikap mental yang aji mumpung. Di Departemen Agama yang



selama ini dipercaya sebagai benteng terakhir pertahanan moral, justru terjadi kejahatan korupsi secara besar-besaran. Menurut *Harian Rakyat Merdeka* (21/6-2005), korupsi di Depag menyikat Rp 385 miliar dari Rp 700 miliar Dana Abadi Umat (DAU). Mantan Menteri Agama Said Agil Hussein Al Munawir terseret sebagai tersangka bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Taufik Kamil.

"Kasus ini sangat memalukan, karena Depag seharusnya mengedepankan komitmen dan keteladanan moral," *Rakyat Merdeka* mengutip pernyataan Sekretaris Umum MUI, DR Din Sjamsuddin.

Ironisnya, kata Din Sjamsuddin, dana yang diselewengkan itu berasal dari umat yang bersusah payah mengumpulkan uang untuk pergi haji.

Said Agil Buka-bukaan, demikian judul berita utama harian *Indo Pos* (22/6). Kata Said Agil di depan para investigator Timastipikor (Kejaksaan), DAU juga dinikmati oleh banyak petinggi negara dan pemerintah bersama istri-istri mereka. Yang menikmati DAU, termasuk Jusuf Kalla (sekarang Wapres) beserta istri, Mesnos Bachtiar Chamsyah dan putri, Akbar Tandjung (bekas Ketua DPR) dan istri, Alimarwan Hanan (bekas Menkop dan UKM) dan istri, Sri Rejeki (bekas Meneg Urusan Peranan Wanita) dan suami, Hatta Rajasa (Menteri Perhubungan) dan istri, Tosari Wijaya (bekas Wakil Ketua DPR) dan istri. Sh

Dana DAU dinikmati sejumlah petinggi negara dan pemerintah beserta istri-istri mereka.

Derajat Kemiskinan dan Korupsi

Berikut ini catatan redaksi *Berita Indonesia* tentang korelasi antara kemiskinan, daya saing bangsa dan korupsi. Kejahatan korupsi telah merusak moral, ekonomi dan martabat bangsa.

I. ANGKA KEMISKINAN

Menurut laporan BPS, tahun 1970 sebanyak 67%, turun menjadi 11,86% dari jumlah penduduk tahun 1996. Tahun 2003 meningkat jadi 17,4% (37,4 juta). Tahun 2004 turun sedikit jadi 16,6% (36,1 juta). ISEI mengutip laporan ILO, 110 juta rakyat terancam miskin. *Tokoh Indonesia* (edisi Juni 2005).

II. KONDISI FISIK

Kondisi kualitas fisik manusia Indonesia, menurut laporan UNDP, semakin memprihatinkan. Indeks Pembangunan Manusia ditilik dari tingkat kesehatan, pendidikan dan ekonomi rata-rata penduduk, menempatkan Indonesia

pada peringkat 111 dari 175 negara.

Peringkat ini jauh di bawah negara-negara tetangga; Singapura (25), Brunai Darussalam (33), Malaysia (58), Thailand (76) dan Filipina (83). Peringkat Indonesia bahkan di bawah negara-negara terkebelakang, seperti Aljazair (108), Guinea-Katulistiwa (109) dan Kisgistan (110).

III. Daya Saing Bangsa

Menurut laporan ISEI, tahun 2000, dalam soal Daya Saing Bangsa, Indonesia menempati urutan 44 dari 45 negara berkembang. Tahun 2001, urutan 46 dari 47 negara berkembang. Tahun 2002 menempati urutan paling bawah 49 dari 49 negara berkembang.

Dalam hal Daya Saing SDM, tahun 2000, Indonesia berada pada posisi 43 dari 45 negara. Tahun 2001, pada posisi 45 dari 47 negara. Tahun 2002, posisi 48 dari 49 negara. Dalam hal daya saing

untuk menarik investor, Indonesia berada pada posisi kedua dari bawah.

IV. STATUS GIZI

Laporan pemantauan status gizi Dinas Kesehatan di 31 propinsi (20/6-2005) yang dikutip Menkes Siti Fadilah Sapari, mengungkapkan, 80 Balita meninggal akibat busung lapar di lima propinsi; Jawa Tengah (21 orang), Jawa Timur (32 orang), Nusa Tenggara Barat (22 orang) dan Nusa Tenggara Timur (5 orang).

Di Jawa Timur terdapat 2.729 penderita gizi buruk, 25 orang kurang lemak, 11 orang kurang protein. Sisanya kasus gizi buruk non-klinis. Di NTT 12.365 kasus gizi buruk, 301 marasmus, 1 kwasiorkor dan 4 marasmus-kwasiorkor.

Di seluruh Indonesia sampai 20 Juni, terdapat 25.467 kasus gizi buruk. Kasus gizi buruk Balita tahun 2004 sebanyak 3,37 persen dari 19.685.717 orang. Angka ini menurun dari 8,2 persen tahun 2003. (*Harian Rakyat Merdeka*, 21 Juni 2005).

V. TINGKAT KORUPSI

Menurut laporan International Transparency, Indonesia menempati urutan negara terkorup ketiga di dunia setelah Bangladesh dan Vietnam. Sedangkan di Asia Tenggara, sebagai negara terkorup kedua setelah Vietnam.

Kasus-kasus korupsi, antara lain, BLBI Rp 114 triliun, BNI Rp 1 triliun, kredit macet Bank Mandiri Rp 20 triliun lebih. (Sh)

(*Majalah Tokoh Indonesia*, edisi Juni 2005).

ANALISIS ANTROPOMETRI BALITA, SUSENAS 2003

PROVINSI	Status Gizi (Z-Score)		Jumlah	Jumlah
	Gizi Buruk	Gizi Normal		
	<-3,00	-2,00 sampai 1,99		
Sumut	673	3.623		
Sumbar	256	2.660		
Riau	261	1.878		
Jambi	62	1.737		
Sumsel	184	1.210		
Bengkulu	66	623		
Lampung	155	1.460		
Bangka Belitung	66	476		
DKI Jaya	103	1.264		
Jabar	340	4.567		
Jateng	456	5.766		
DI Yogyakarta	35	703		
Jatin	470	1.363		
Banten	141	1.231		
Bali	66	1.489		
NTB	196	1.194		
NTT	374	2.736		
Kalbar	291	1.327		
Kalteng	86	647		
Kalsel	205	1.423		
Kabup	220	1.893		
Sulut	72	604		
Sulawesi	221	1.558		
Sulsel	704	4.753		
Sultra	125	1.574		
Gorontalo	171	414		
Maluku	52	403		
Maluku Utara	55	414		
Papua	115	515		
Total	6.421	54.123		

Aceh tidak dikumpulkan data antropometri

Kompas 17 Juni 2005

ANALISIS ANTROPOMETRI BALITA, SUSENAS 2003

PROVINSI	Status Gizi (Z-Score)				TOTAL
	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Normal	Gizi Lebih	
	<-3,00	-3,00 sampai -2,00	-2,00 sampai 1,99	>= 2,00	
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	
Sumut	673	1.013	3.623	140	5.449
Sumbar	256	670	2.660	57	3.643
Riau	261	456	1.878	52	2.647
Jambi	62	414	1.737	41	2.254
Sumsel	184	355	1.210	63	1.812
Bengkulu	66	164	620	28	878
Lampung	155	427	1.460	52	2.094
Bangka Belitung	66	142	476	26	710
DKI Jaya	103	271	1.264	99	1.737
Jabar	340	1.104	4.567	213	6.224
Jateng	456	1.504	5.766	142	7.868
DI Yogyakarta	35	108	703	21	867
Jatin	470	1.363	5.974	189	7.996
Banten	141	317	1.221	87	1.726
Bali	66	232	1.489	55	1.842
NTB	196	448	1.194	42	1.880
NTT	374	1.189	2.756	67	4.586
Kalbar	291	529	1.327	45	2.192
Kalteng	86	182	647	35	950
Kalsel	205	498	1.423	26	2.192
Kabup	220	458	1.893	66	2.597
Sulut	72	141	604	43	860
Sulawesi	221	503	1.558	83	2.365
Sulsel	704	1.440	4.753	96	6.993
Sultra	125	350	1.574	60	2.109
Gorontalo	171	196	414	15	796
Maluku	52	124	403	6	585
Maluku Utara	55	102	414	48	619
Papua	115	132	515	41	803
Total	6.421	14.832	54.123	1.898	77.274

Aceh tidak dikumpulkan data antropometri

Kompas 17 Juni 2005

Wajah Kenas Busung Lapar

Ibarat petir di siang bolong, fenomena busung lapar mengejutkan banyak orang. Banyak aparat pemerintah kebakaran jenggot.

Tubuh ringkih Rahmatullah, tergolek lunglai di bangsal kelas tiga Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Tulang rusuk Balita usia 30 bulan itu tampak satu demi satu. Perutnya membusung, matanya menatap penuh harap. Penderitaan Rahmat tak terkirakan. Dia mengidap penyakit busung lapar lantaran kurang makan berbulan-bulan. Kisah pilu mewakili penderitaan ribuan bayi dan Balita di seluruh penjuru tanah air yang mengidap busung lapar.

Penderitaan Rahmat tak lebih tragis dari ayahnya, Junaedi yang menghidupi 8 anak seorang diri. Sebenarnya dia punya 11 orang anak, tetapi tiga orang telah meninggal dunia. Demikian juga istrinya. Penghasilan Junaedi dari jasa kerja kasar dan menyewakan rumah petak Rp 30.000 sampai Rp 50.000 sebulan, tidak mencukupi keperluan makan ke delapan anaknya.

Karena miskin dan kelelahan selepas menjual tenaga, Junaedi tak punya kemampuan dan waktu untuk memperhatikan kesehatan anak-anaknya. Tetapi penderitaan Rahmat berbulan-bulan memaksa Junaedi membawanya ke rumah sakit.

Kisah sedih Rahmat memenuhi halaman depan koran-koran Jakarta, membuka tabir busung lapar di jantung republik. Memang memalukan, tetapi itulah kenyataan, bahwa di Jakarta ditemukan 18 kasus busung lapar dari 1.350 lebih bayi dan Balita yang menderita kekurangan gizi. *Berita Kota* menurunkan kasus busung lapar di kolom berita utama dan laporan bersambung (21/6). Sebenarnya, kasus busung lapar, awalnya mencuat dari desa Bengkel, Lombok Barat, hanya beberapa kilometer dari Mataram, ibukota NTB.

Kasus busung lapar ternyata me-

rebak di seluruh propinsi dan telah menelan banyak korban. Di Jawa Timur, menurut laporan *Rakyat Merdeka* (21/6) mencatat angka korban meninggal tertinggi, 32 anak dari Januari sampai Juni 2005. Disusul NTB (22 anak), Jawa Tengah (21 orang) dan NTT (5 anak). Menkes Siti Fadilah mengungkapkan, kasus gizi buruk menimpa 3,37 persen dari total 19.685.717 Balita.

Pos Kota, juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus busung lapar dengan menurunkan laporan bersambung, mulai 20 Juni. Balita usia 28 bulan, Dian Nabila, putri pasangan Purwanto dan Kinun, warga Kelurahan Pegadungan, termasuk yang beruntung karena dikunjungi Walikota Jakarta Barat Fadjat Panjaitan. Tak hanya busung lapar, tetapi dian juga menderita TBC kronis.

Ibunya tak pernah membawanya ke rumah sakit. Nabila, di saat rewel karena menahan sakithanya bisa digendong oleh ibunya.

Pengidap busung lapar lainnya, Dody Apriyandi (14 bulan), tak pernah dibawa ke Puskesmas oleh ibunya, Rohayati, karena tidak punya ongkos.

Penderitaan Dody cukup panjang, 8 bulan tergolek lunglai di balai kayu rumah petak kumuh di Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat. Ibunya hanya mampu memberi air susu atau air putih setiap Dody meringkih kesakitan karena menahan lapar. Tubuh Dody kurus kering.

Para orang tua penderita busung lapar itu sempat didamprat para petugas Puskesmas dan Posyandu karena enggan memeriksa dan merawat anak-anak mereka. Padahal perawatannya gratis dengan menggunakan kartu miskin, demikian menurut *Pos Kota*. Gubernur Sutiyoso hanya menyatakan heran bahwa di Jakarta ada kasus busung lapar. Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahkan pemerintah daerah yang cenderung menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Mantan Presiden Megawati mengeritik Susilo lantaran merebaknya busung lapar. "Kacang dilempar saja bisa tumbuh. Kenapa bisa terjadi busung lapar," kata Megawati sebagaimana dikutip *Bisnis Indonesia*.

Tajuk harian *Kompas* (15/6) menunglas reaksi marah yang diperlihatkan Gubernur NTT Piet A. Tallo ketika menerima kunjungan istri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia marah lantaran tingginya angka penderita busung lapar yang meninggal, sebanyak 20 anak, bukan 3 anak sebagaimana yang dia laporkan kepada Ny. Mufidah Jusuf.

"Masalah busung lapar dan kekurangan pangan tidak pernah bisa diselesaikan dengan marah-marah," tulis *Kompas*. (Sh)



Ketahanan bangsa ini rupanya benar-benar diuji. Masalah datang silih berganti. Belum tuntas persoalan wabah polio yang menyerang anak-anak Balita di beberapa daerah seperti Sukabumi, Jawa Barat, kini terungkap fenomena gunung es penyakit busung lapar di NTB, NTT, dan Jatim.

Dan, laksana petir di siang bolong, berita busung lapar itu membuat kaget seluruh anak negeri yang sejatinya makmur ini. Tak terkecuali media massa nasional.

Di antara berita busung lapar yang diekspos media massa nasional, ada yang menarik pada berita *Koran Tempo* (9/6). Mengutip pernyataan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sumaryati Arjoso, surat kabar yang baru berganti format ini menegaskan bahwa busung lapar akibat sistem yang macet.

Menurut Arjoso, kejadian luar biasa (KLB) busung lapar di beberapa wilayah Indonesia bukan melulu akibat kelaparan atau gizi buruk, tetapi juga disebabkan sistem kemasyarakatan tidak lancar atau macet.

“Sistem kemasyarakatan tak bisa dipisahkan dari perilaku yang terjadi. Masak ada yang kurang makan atau sama sekali tidak bisa makan tetangganya tidak membantu,” ujar Aryoso, di Sukabumi, Jawa Barat.

Busung lapar yang melanda Balita Indonesia merupakan akibat dari ketidakpekaan pemimpin dan telah melunturnya rasa kepedulian sosial di negeri ini.

Arjoso juga menyatakan, busung lapar di Indonesia tidak menjadi indikasi adanya masyarakat yang tidak sejahtera atau miskin. Sebab, saat ini jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera golongan satu dengan masalah ekonomi hanya 30 persen. “Malah catatan di BPS angka kemiskinan di In-

donesia hanya 16 persen,” kata Arjoso.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta, sebagaimana dikutip *Indosiar.com* (13/6) juga berpendapat demikian.

Putri Proklamator Kemerdekaan RI dan mantan Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta, itu mengingatkan



Busung Lapar Akibat Macetnya Sistem

pentingnya kesadaran (awareness) di kalangan ibu-ibu khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, peningkatan kepedulian dan saling tolong menolong di antara masyarakat.

“Orang sudah kehilangan kekraban mutualisme atau kebersamaan dan kerjasama. Saya melihat tahun-tahun lalu itu sudah hilang. Masyarakat lebih individualistik. Jadi hal-hal yang menyangkut kepedulian bersama kurang ditangani dengan baik,” tandas Meutia.

Mengatakan, peningkatan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di daerah-daerah pedalaman diharapkan dapat mencegah terjadinya kekurangan gizi di kalangan anak-anak.

“Kita lihat dalam beberapa tahun ke belakang ini, kegiatan PKK tidak selancar sekarang. PKK sekarang sudah mulai hidup lagi, dan mudah-mudahan di masa depan, busung lapar tidak akan terjadi lagi,” jelas Meutia.

Untuk itu, Meutia yang juga isteri ekonom Prof. DR. Sri Edi Swasono itu menambahkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) akan meningkatkan kualitas hidup perempuan.

KPP telah melakukan networking dengan mitra-mitra yang bekerja langsung di bidang peningkatan kesehatan ibu dan pengetahuan anak-anak.

“Peranan KPP sangat penting sekali didalam mendeteksi dan mengatasi masalah busung lapar. Namun KPP cukup mengalami kesulitan untuk mendeteksi masalah busung lapar di wilayah-wilayah terpencil, dimana transportasi dan mobilitas terbatas. Apalagi Posyandu di wilayah tersebut tidak berjalan dengan baik,” paparnya.

Pengusaha nasional H. Probosutedjo memiliki pandangan senada dengan Sumaryati Aryoso dan Meutia Farida Hatta. Khusus kepada Majalah Tokoh Indonesia.com, edisi ke-21 (Juni 2005), pendiri Kelompok Usaha Mercu Buana itu mengungkapkan keprihatinan nan mendalam setelah menyaksikan kondisi Indonesia yang, digaris-bawahinya, sudah 60 tahun merdeka namun rakyatnya masih sangat miskin.

“Masih banyak yang busung lapar, penyakit polio, dan jutaan anak putus sekolah karena orang tuanya kurang mampu dan pemerintah memungut biaya yang tidak terjangkau oleh rakyat kecil,” ujar pengusaha yang juga mantan guru ini kepada Majalah Biografi Pertama dan Satu-satunya di Indonesia ini.

Adik satu ibu dengan mantan Presiden RI ke-2, HM Soeharto, ini berharap agar pemerintah menelusuri penyebab kemiskinan rakyat yang berlarut-larut itu.

Probo juga menyebutkan beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab kemiskinan di negeri ini-tapi ironisnya kurang dipahami oleh para pemimpin, yakni keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, kemalasan, dan sikap kemelindi (sok paling pintar padahal tidak punya jalan keluar).

“Banyak orang Indonesia merasa



Orang sudah kehilangan kekraban mutualisme atau kebersamaan dan kerjasama. Saya melihat tahun-tahun lalu itu sudah hilang. Masyarakat lebih individualistik. Jadi hal-hal yang menyangkut kepedulian bersama kurang ditangani dengan baik.



dirinya hebat, saya bisa jadi presiden, saya bisa jadi menteri, saya bisa jadi pejabat, tapi akhirnya tidak bisa berbuat sesuatu. Dan, itulah yang sesungguhnya terjadi dan menjadi penyakit. Kalau penyakit itu tidak disadari betul-betul celaka,” Probo mengingatkan.

Menurut pengakuan Probosutedjo, dia telah menyurati Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum dilantik menjadi Presiden RI ke-6, mengenai langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan dalam era reformasi ini.

“Bukan berarti mengurui, tetapi berdasarkan praktek cara mengentaskan kemiskinan dan kesengsaraan bangsa demi terwujudnya NKRI yang kokoh,” katanya.

Dengan pendekatan teologis, Tom S. Saptaatmaja, dalam tulisannya di harian *Sinar Harapan* (20/6) berjudul “Busung Lapar: Kelelahan Berbelas Kasih?” menulis, di negara yang mengaku religius dan konon ‘gemah ripah loh jinawi’ alias makmur ini, busung lapar yang merajalela di mana-mana jelas merupakan tamparan telak bagi kita semua yang mengaku beragama.

“Apa yang sebenarnya terjadi dengan kita yang mengaku beragama sehingga membiarkan saudara-saudara kita kelaparan?” kata Tom dengan nada

retoris.

Ketika bencana tsunami Aceh terjadi, penggalangan dana terjadi di mana-mana, tetapi ketika busung lapar mengapa tidak ada gema untuk melakukan solidaritas serupa? Mungkinkah sikap ini menjadi indikasi dari kelelahan untuk berbelas kasih serta menguapnya solidaritas?

Kondisi semacam ini dalam bahasa psikologi disebut sindroma compassion fatigue. Sebagian dari kita akan berkata: “negeri ini sudah terlalu dipenuhi orang-orang malang seperti para korban busung lapar dan kita tak perlu jadi pahlawan bagi mereka”. Begitulah argumen orang-orang yang mengidap sindroma ini.

Dengan mengutip sinyalemen budayawan, Jakob Sumarjo, teolog dan alumnus Sernary St Vincent de Paul ini menggarisbawahi, biang kerok dari kelaparan yang terjadi di negeri ini adalah keserakahan.

“Bahkan orang-orang serakah dan tamak masih berani berargumen, busung lapar ini terjadi karena si anak memang tidak doyan makan, atau ada yang sengaja menutupi kasus ini agar tidak diketahui publik karena malu. Atau takut jangan-jangan jabatannya bisa hilang jika di daerahnya diketahui banyak penderita busung lapar.” (Anis Fuadi)

TEMUAN ANAK BALITA GIZI BURUK, BUSUNG LAPAR, DAN MENINGGAL DI BEBERAPA DAERAH

Daerah	Gizi Buruk	Busung lapar	Meninggal
Kabupaten/Kota			
Kabupaten Rembang, Jateng	710		
Kota Semarang, Jateng	64		
Kabupaten Semarang, Jateng	442		
Kabupaten Tegal, Jateng	117		
Kabupaten Boyolali, Jateng	243		
Kabupaten Ponorogo, Jatim	144 ¹		
Kota Surabaya, Jatim		37	
Kabupaten Bantul, DIY	250		
Kabupaten Tanggerang, Banten	1.159		
Kota Makassar, Sulsel	26		
Kabupaten Sambas, Kalbar	105		
Provinsi			
Jawa Barat	107.500		
Nusa Tenggara Barat	910		21
Nusa Tenggara Timur	11.440	302	24
Sulawesi Tenggara	781		
Sumatera Selatan	1.600 ¹		
Riau	11.000		
Lampung	176		2

Keterangan: ¹ Anak balita kurang gizi
Sumber: Litbang Kompas diolah dari dinas kesehatan setempat

'Quo Vadis' Kasus Korupsi DAU

Ditemukan bukti adanya arus Dana Abadi Umat yang mengalir ke BPK. Sayyid Aqil Husein al-Munawwar dan Taufik Kamil saling tuding.

Dalam dua penerbitan berurutan, majalah berita mingguan *Tempo* mengangkat kasus korupsi Dana Abadi Umat (DAU) sebagai laporan utama. Pada kulit muka edisi 20-26 Juni 2005 terpampang judul: "Mereka Tergoda Dana Haji", sedangkan di sampul depan edisi 27 Juni-3 Juli 2005 tertulis: "Melacak Penikmat Dana Umat."

Dengan pendekatan berbeda, *Gatra* juga menurunkan berita penyimpangan DAU sebagai cerita sampul dua penerbitannya (edisi "ONH Plus Perkara" 25 Juni 2005 dan edisi "Bola Liar Skandal Haji" 2 Juli 2005).

Begitu menariknya kah kasus penyimpangan DAU ini? Menyimak ulasannya yang mendalam, barangkali bisa dipahami mengapa *Tempo* begitu getol mem-*blow up* kasus ini —di banding kasus-kasus korupsi berskala besar lain yang juga disorot masyarakat luas— sebagai *cover story*, yaitu mengalirnya DAU ke berbagai pihak.

Mulai dari mantan pejabat, mantan menteri, anggota DPR, hingga ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diterpa tudingan sebagai penikmat aliran dan DAU.

Sinyalemen adanya aliran DAU ke BPK menjadi penekanan *Tempo*. Konfirmasi langsung diperoleh dari Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor), Hendarman Supandji.

JAM-Pidsus Kejaksaan Agung itu 'mengamini' dan pihaknya sudah punya bukti dan akan menyelidiki orang-orang yang mengambil DAU untuk disetor kepada auditor BPK. "Alat bukti sudah jelas, ada yang memberi. Tidak ada yang menerima kalau tidak ada yang memberi," ujar Hendarman.

Tempo terbaru melaporkan ditemukannya sejumlah rekening DAU yang mengalir ke BPK selama tiga tahun. Jumlahnya mencapai Rp 2,01 miliar plus US\$ 25.600 (sekitar Rp 230

juta), yang diberikan dalam delapan kali setoran. Setoran itu tidak ada dasarnya, jadi terindikasi praktik suap.

Karena itu, *Koran Tempo* (27/6) menggarisbawahi, tiga kali hasil audit yang dilakukan BPK selalu menyimpulkan: Tidak Ada Kerugian Negara. Kalaupun ditemukan sejumlah penyimpangan, besarnya tak lebih dari 10 persen dari dana Pengelolaan BPIH dan DAU yang diaudit.

Setoran-setoran itu mempunyai pola sama. Pertama, ada permintaan BPK agar Depag menyeteror ke Yayasan

terbaru membedah kasus ini dari aspek kontroversi yang melekat pada dua Keputusan Menteri Agama (KMA): KMA 274/2002 tentang Pengaturan Hasil/Bunga DAU dan KMA 275/2002 tentang dana Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Penyidik menjadikan KMA itu sebagai bukti peran Aqil dalam menyimpangkan DAU dan BPIH," tulis *Gatra*, menyimpulkan keberadaan KMA menjadi pintu pos pengumpulan dana di Depag, yang berujung pada praktik penyimpangan.

Merasa kliennya tak tahu latar belakang dibuatnya draf-draf KMA tapi dipaksa memparafnya, Ayuk F. Shahab, kuasa hukum Aqil, seolah menunjuk Taufik Kamil sebagai arsitek utama dua KMA bermasalah itu.

Mendapat serangan dari mantan bosnya, Taufik Kamil pun berkelit dan menyangkal dirinya sebagai pangkal persoalan. "Semua tindakan atau kebijakan yang saya ambil berdasarkan instruksi menteri," cetus Taufik kepada *Gatra*.

Lepas dari polemik antara Aqil dan Taufik, serta penemuan bukti aliran DAU ke BPK, Hendarman Supandji menegaskan, penyidikan Tim Tastipikor masih difokuskan pada dua tersangka —telah dimasukkan ke Rumah Tahanan Mabes Polri— yaitu Sayyid Aqil Husein al-Munawwar (51), mantan Menteri Agama, dan Taufik Kamil (60), mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama.

Keduanya adalah penanggung jawab DAU 2002-2005, sebuah pos anggaran yang mengimpun duit hasil efisiensi penyelenggaraan haji. Pos anggaran itu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 tahun 2001 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat. Tak aneh bila kemudian dua mantan petinggi departemen bermotto "Ikhlas Beramal" itu menjadi tersangka utama dugaan penyimpangan DAU, yang merugikan negara— hampir Rp 700 miliar.

"Sumber penyimpangan berasal dari pengeluaran fiktif, pengeluaran ganda, pengeluaran kemahalan, dan pengeluaran utang yang tidak kembali dari dana efisiensi penyelenggaraan haji," katanya. ■ (RF)



BPK sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan melaporkannya ke Sekretaris Jenderal BPK. Permintaan itu kemudian dijawab Menteri Agama.

Ada juga setoran yang dibayarkan sebelum keputusan menteri keluar. Kedua, setoran itu bersifat langsung tanpa permintaan resmi BPK atau ditransfer ke rekening BPK di Kantor Kas Negara.

Dalam setiap surat permintaan dana oleh BPK, umumnya dicantumkan perincian 'daftar biaya', seperti biaya administrasi, biaya operasional, biaya alat tulis kantor, dan biaya penyusunan laporan.

Agak berbeda dengan saingan utamanya itu, majalah *Gatra* edisi

Dilema Sang Bupati

Bupati Temanggung, Totok Ary Prabowo, didesak mundur oleh hampir sebagian besar aparatnya sendiri. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat nyaris terbengkalai.

Meski terjadi di sebuah kabupaten, aksi mogok besar-besaran aparat Pemkab Temanggung, Jawa Tengah, tak luput dari perhatian serius media-media massa nasional sehingga isu lokal ini menasional.

Harian *Kompas*, misalnya. Pada edisi 15 Juni 2005, koran terbesar di tanah air ini bahkan menentang dinamikanya kasus tersebut di halaman satu. Harian itu juga memaparkan kronologisnya secara lengkap.

Republika (14/6) mengutip pernyataan pers Totok Ary Prabowo, peantikan sejumlah pejabat eselon III dan IV untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan para pejabat yang sebelumnya mengundurkan diri.

Suara Pembaruan (1/6) tak mau ketinggalan. Koran sore itu menempatkan kasus Temanggung di berita halaman 4. *SP* mengutip pernyataan pers Sekjen Depdagri, Progo Nurdjaman, yang menyebut konflik di Temanggung sebagai konflik vertikal antara bupati dan birokrat, namun oleh Totok dibelokkan menjadi konflik horisontal.

Pada edisi 16 Juni, harian ini menurunkan berita ini di halaman pertama, menyusul terjadinya aksi penghadangan bus yang mengangkut 20 pejabat Pemkab Temanggung—yang hendak bertolak ke Semarang guna mendampingi Bupati Totok menemui Gubernur Mardiyanto—oleh massa PNS dan LSM pengunjuk rasa.

Berita menarik diangkat *Indopos* edisi 17 Juni, yang berbasis pada hasil *reportase* wartawan-nya di Temanggung. Berita itu mengisahkan kondisi RSUD Temanggung akibat aksi pembangkangan birokrasi yang menentang Bupati-nya.

Koran terbitan Jawa Pos Grup ini

menulis, keputusan DPRD Temanggung memecat atau menghentikan sementara Totok Ary Prabowo sebagai respons atas semakin meluasnya aksi aparat Pemda Temanggung dan masyarakat awam, yang membuat kondisi Temanggung kian memanas.

Awal kisruh politik di Kota Tembakau itu adalah dugaan pihak Polres Temanggung, pada 13 Desember 2004 tentang penyimpangan dana penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 12,614 miliar yang melibatkan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo.

Sebanyak 17 orang pejabat eselon II dan III Pemkab Temanggung mengundurkan diri (7/1), dan bertambah 76 orang (10/1), sebagai reaksi atas kebijakan Bupati Totok Ary Prabowo yang dianggap sewenang-wenang.

Pada 20 Januari, Polres Temanggung melimpahkan berkas pemeriksaan dugaan korupsi dana pemilu ke Polda Jawa Tengah. Setelah melalui proses penyidikan, Polda Jawa Tengah (7/3) menetapkan Totok sebagai tersangka kasus korupsi APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2004 senilai Rp 15 miliar.

Puncaknya terjadi, pada 10 Juni 2005, saat Totok memberhentikan 78 pejabat lama dan melantik 78 pejabat baru, termasuk Setya Adji yang dicopot sebagai Sekdakab Temanggung.

DPRD Temanggung segera bereaksi dan menggelar sidang paripurna terbuka dua hari berturut-turut (13/6 dan 14/6), dihadiri ratusan PNS, LSM, kalangan dokter dan pegawai RSUD Temanggung, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat sempat terganggu. Keputusan sidang, mengusulkan pencopotan Totok dari jabatannya dan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden SBY, melalui Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, agar Bupati Totok diberhentikan mengingat jalannya roda pemerintahan tidak bisa ditoleransi lagi.

Sekjen Depdagri, Progo Nurdjaman, sangat menyangkan aksi aparat Pemda Temanggung karena, menurutnya, PNS adalah pelayan publik yang tidak mudah terpengaruh kooptasi politik.

Dan, "DPRD tidak bisa begitu saja memberhentikan bupati sebab aturannya sudah jelas, kalau ada krisis publik, DPRD harus membentuk Pansus untuk meminta keterangan kepala daerah," Progo mengemukakan.

Setelah didesak Mardiyanto, Totok akhirnya membatalkan mutasi PNS di lingkungan Pemda Temanggung. Pada 22 Juni, persis hari ke-12 mogok kerja aparat Pemkab Temanggung, Totok memenuhi keinginan Mardiyanto.

Belum bisa dipastikan apakah itu sebuah pertanda *happy ending* kisruh politik lokal Temanggung. Tapi, yang pasti, Kejaksaan Tinggi Jateng masih meneliti berkas perkara dugaan korupsi dana Pemilu senilai Rp 1,9 miliar, dengan Totok sebagai tersangka. ■

(HT/AF)



Persoalan ini mencuat dalam rapat kerja antara Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dengan Komisi II DPR 13 Juni lalu. Kala itu Yusril menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak dilantik Oktober 2004 lalu menggunakan mobil Mercy hitam buatan tahun 1998. Ini satu-satunya mobil dinas antipeluru yang ada. Kendaraan dinas ini sudah dipakai sejak B.J.Habibie menjadi Presiden.

Padahal saat Megawati menjadi Presiden, ada mobil antipeluru lain yang digunakan dan lebih baru. Persoalan ini kemudian berkembang, apakah memang ada mobil dinas presiden yang hilang? Ini hanyalah satu hal yang mengemuka dalam rapat kerja. Saat itu Yusril menjelaskan tentang tengah dilakukannya audit terhadap kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Negara dan Istana Kepresidenan. Baik itu istana presiden maupun istana wakil presiden.

Penelusuran dan pendataan kekayaan negara di lingkungan Sekneg dan Istana Kepresidenan tersebut merupakan perintah langsung Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi.

Tentang mobil yang digunakan Megawati Soekarnoputri ketika menjadi presiden, Sekjen PDI-P Pramono Anung (*Kompas* 18/6) menyatakan sama dengan mobil yang saat ini digunakan Presiden SBY. Dia membantah berita yang beredar bahwa mobil yang hilang itu ada di rumah Megawati. "Informasi itu (mobil anti peluru ada di rumah Megawati-red) tidak betul", tandas Pramono saat dikonfirmasi.

Menurutnya, saat Megawati jadi Presiden memang pernah menggunakan mobil lain. Tapi itu merupakan mobil pribadi yang kemudian dilapisi antipeluru. "Ada juga yang meminjam-

kan, tapi itu pun sudah dikembalikan ke Sekneg", tandasnya. Namun dia tidak menjelaskan jenis mobil tersebut dan siapa yang meminjamkan.

Salah seorang anggota Fraksi PDI-P di DPR yang enggan disebut namanya mengaku pernah mendengar dari Taufik Kiemas bahwa ada sejumlah mobil presiden yang merupakan sumbangan sejumlah pengusaha. Mobil-mobil itu dulu sempat disimpan di Tebet dan kini sudah dipindahkan ke Teuku Umar. "Semua orang PDI-P tahu soal mobil-mobil itu", katanya.

Pramono juga membantah soal adanya mobil presiden yang merupakan sumbangan dari sejumlah pengusaha. "Tidak ada mobil yang disumbangkan pengusaha", tegasnya.

TK gusar

Suami Megawati, Taufik Kiemas (TK) merasa gusar atas pemberitaan itu. Dia merasa keberatan dirinya dikaitkan dengan persoalan mobil anti peluru yang raib. Seperti diberitakan *Warta Kota* (21/6) TK mengatakan semua mobil anti peluru kepresidenan ada di Sekretariat Negara. "Semua, delapan-delapannya ada di situ kok sama sekali tidak ada yang berubah", sergahnya.

TK pun keberatan soal mobil antipeluru yang raib itu ditanyakan kepadanya. "Kesannya seolah-olah kami maling", katanya. Padahal, menurutnya, untuk menggunakan mobil antipeluru tidak bisa sembarangan. "Kalau tiba-tiba mogok di jalan bagaimana", ujarnya.

Dia juga mengaku tidak tahu ketika ditanya tahun pembelian mobil tersebut. TK bahkan menyarankan sebaiknya dilakukan audit oleh BPK. "Serahkan saja pada BPK, audit semuanya biar jelas". Audit ini perlu

Ketua Umum Golkar berpendapat setiap sumbangan yang diberikan kepada kepala negara tetap harus dicatat sebagai aset negara dan karena itu harus dikembalikan kepada negara. "Meskipun hasil sumbangan, tetap harus didaftarkan sebagai inventaris negara. Kalau pun mobil itu barang pribadi, mestinya dilaporkan ke KPK, tabahnya.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar mengatakan, nasib mobil antipeluru kepresidenan merupakan tanggungjawab Pasukan Pengawal Presiden. Mereka juga yang mestinya mengaudit masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan presiden. "mereka yang jaga, mereka harus tahu", kata Syamsir.

Jurubicara Kepresidenan Andi Marlaleng seperti ditulis *Koran TEMPO* (21/6) menyatakan, kejelasan soal mobil antipeluru ini memang menunggu hasil audit BPK. "Nanti kita tahu ada mobil yang hilang atau tidak", jelasnya. Hasil audit BPK inilah yang akan digunakan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melacak ada tidaknya unsur korupsi.

"Sekarang BPK masih memeriksa Sekretariat Negara", kata Ketua Tim Pemberantasan Korupsi Hendarmin Supanji. Menurutnya, BPK berjanji menyelesaikan audit sekitar pertengahan Agustus. Apabila ada indikasi tindak pidana korupsi, pihaknya akan menindaklanjuti temuan itu. Mereka yang terkait dengan mobil antipeluru kepresidenan itu akan segera diperiksa. (sp)

Mobil Presiden di Tangan Siapa?

Kejelasan soal hilangnya mobil antipeluru menunggu hasil audit BPK yang terkait segera diperiksa.

dilakukan segera untuk memperjelas kabar yang mengatakan adanya konglomerat pada era pemerintahan Presiden Megawati yang menyumbangkan mobil antipeluru.

Ketua DPR Agung Laksono yang juga Wakil



Sutanto Kapolri Baru

Kepala Badan Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Sutanto secara resmi diajukan Presiden SBY menjadi satu-satunya calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar.

Mantan Ajudan Presiden Soeharto kelahiran Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950, ini merupakan satu di antara sedikit polisi yang baik, jujur, bersih, dan punya komitmen tinggi memberantas kejahatan di negeri ini.

Hampir semua surat kabar nasional menempatkan berita ini di halaman satu. Bahkan beberapa koran menyajikannya sebagai headline satu. Di antaranya Koran Tempo, surat kabar berukuran mungil itu, menampilkannya penuh di halaman depan, hanya menyisakan satu kolom untuk navigasi. Begitu pun Harian Suara Karya mengangkat berita ini sebagai headline dengan judul Sutanto Gantikan Da'i Bachtiar, dengan ukuran tujuh kolom dari sembilan kolom korannya.

Hampir semua koran menyebut pengangkatan Sutanto sebagai pilihan yang tepat. Alumni Terbaik Akabri Kepolisian 1973, ini memang sudah santer disebut-sebut akan menjadi Kapolri sejak Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI. Palsanya, SBY dan Sutanto sudah lama bersahabat karena seangkatan ketika menjadi taruna Akademi Angkatan Bersenjata (Akabri). Keduanya lulusan Akabri (Darat dan Kepolisian) tahun 1973.

Teman taruna seangkatan (1973)

SBY dan Sutanto lainnya antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Slamet Soebijanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Djoko Suyanto. Mereka merupakan lulusan terbaik di angkatan masing-masing. Mereka sama-sama memperoleh penghargaan Adi Makayasa.

Selain karena pertemanan dengan presiden, Sutanto juga dinilai bersih selama karirnya di kepolisian. Dia juga dikenal konsisten dan dekat dengan bawahan. Ayah dari empat anak ini dikenal jujur, bersih, dan punya komitmen tinggi memberantas kejahatan.

Saat menjabat Kapolda Sumut (2000), dia berupaya secara gigih memerangi perjudian, premanisme, dan peredaran narkoba di provinsi itu. Dia hadapi apa pun risikonya, baik dari para bandar judi dan internal Polri sendiri. Mereka yang tidak senang judi diberantas di daerah itu tidak suka Sutanto berlama-lama di Medan. Mereka ingin Sutanto cepat pindah. Memang, Sutanto hanya tujuh bulan menjadi Kapolda Sumut (Maret sampai Oktober 2000). Dia dipindah menjadi Kapolda Jawa Timur.

Di Jatim, Sutanto langsung me-

Sutanto

Lahir: Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950, **Jabatan:** Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, **Pendidikan:** Akabri Kepolisian 1973 • Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1983 • Sespimpol, Lembang, Bandung (1990) • Sus Jur Pa Rengar Hankam, Bandung (1985) • Lemhannas (2000), Karir: Pamapta Konwiko 74 Jakarta Selatan (1973-1975) • Kapolsek Metro Kebayoran Lama (1978-1980) • Kapolsek Metro Kebayoran Baru (1980) • Kepala Detasemen Provoost Polda Jatim (1990-1991) • Kapolres Sumenep, Jawa Timur (1991-1992) • Kapolres Sidoarjo, Jawa Timur (1992-1994) • Paban Asrena Polri (1994-1995) • Ajudan Presiden Soeharto (1995-1998) • Waka Polda Metro Jaya (1998-2000) • Kapolda Sumut (2000) • Kapolda Jatim (17 Oktober 2000-Oktober 2002) • Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (24 Oktober 2002-28 Februari 2005) • Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (28 Februari 2005-Juli 2005) • Kapolri (2005)

nyatakan perang terhadap illegal logging, praktik BBM oplosan, judi dan narkoba. Salah satu gebrakannya adalah menangkap dan menahan Sundono alias Jhonson Limuel Lim, bos kayu ilegal nomor satu di Jatim yang sebelumnya sulit tersentuh hukum. Dia juga mengusir dan menangkap utusan Sundono yang hendak menyuapnya Rp 2 miliar agar Sundono bisa ditahan luar.

Dia bergeming, Sundono terus ditahan sampai kasusnya dilimpahkan ke kejaksanaan. Walaupun setelah kasus illegal logging itu digelar di PN Surabaya, Sundono malah divonis bebas, yang sebelumnya oleh jaksa penuntut umum hanya dituntut hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. ■



Jakarta merayakan HUT Ke-478. Perayaan diisi berbagai kegiatan dan pesta. Tapi yang lebih penting lagi adalah memanfaatkan momentum mengevaluasi masa lalu untuk menjemput masa depan. Ternyata, kota metropolitan Jakarta bias kolaps sembilan tahun ke depan jika masalah krusial transportasi dan banjir tidak segera diatasi.

Tahun ini Kota Jakarta masih melanggang berpesta merayakan HUT Ke-478. Berbagai acara dilakukan selama satu bulan. Diawali pesta kembang api di Monas pada 22 Juni 2005, dilanjutkan festival Betawi Days, Jakarta International 10 Km, karnaval Jakarta, air mancur menari, ditutup dengan pemilihan abang dan none Jakarta pada 22 Juli 2005.

Tapi pada tahun 2014, kota Jakarta akan kolaps macet total akibat pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Pada saat itu, siapa saja boleh beli mobil namun tak bisa keluar rumah, karena jalanan Jakarta sudah tidak mampu menampung kendaraan.

Di samping itu, berhubung pertumbuhan penduduk dan bangunan di Jakarta, sudah semakin mempersempit lahan terbuka yang berfungsi sebagai resapan air, sehingga ancaman banjir setiap tahun semakin meluas.

Lalu apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kedua masalah krusial itu? Pertama, mengatasi masalah transportasi, Gubernur Sutiyoso membuat suatu pola transportasi makro. Kedua, mengatasi masalah banjir, antara lain dengan mengakselerasi pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang selama puluhan tahun tak kunjung bisa dilakukan. Kedua solusi itu, diyakini Sutiyoso akan mampu menghindari Jakarta dari kemacetan total (kolaps) dan banjir yang kian meluas.

Ketidakseimbangan

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rustam Effendi menyebutkan, kendaraan bermotor di Jakarta yang saat ini berjumlah 5,4 juta unit terus saja meningkat rata-rata 11 persen pertahun. Data 2003 menunjukkan, setiap hari rata-rata telah dikeluarkan 138 STNK baru. Itu berarti, ada tambahan 138 kendaraan perhari di Jakarta.

Dengan jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya setengah meter saja ke muka dan ke belakang, maka dibutuhkan ruang (jalan) enam meter per unit. Sehingga, total perhari harusnya di-



Jakarta Bi

adalah Rustam Effendi memegang jabatan Kepala Dinas Perhubungan. Seorang pamong yang memiliki track record mengesankan di setiap pos jabatan yang dipercayakan padanya.

Sutiyoso, memilih pamong yang mampu bertindak layaknya entrepreneur untuk membantunya menata transportasi Jakarta yang sedemikian rumit.

Rustam membantunya merumuskan langkah yang perlu diambil Pemda DKI sebagai solusi nyata mengatasi permasalahan transportasi kota Jakarta. Langkah atau solusi nyata itu disebut Program Pengembangan Pola Transportasi Makro (PTM) DKI Jakarta atau Jakarta Macro Transportation Scheme (JMaTS).

Pola Transportasi Makro itu mengintegrasikan empat sistem transportasi umum, yakni bus priority (antara lain busway), Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Dengan PTM yang memanfaatkan tiga basis transportasi yaitu jalan, rel dan air, ditambah kebijakan traffic restraints (pembatasan lalu lintas), diharapkan kemacetan Jakarta sudah teratasi pada tahun 2007 atau paling lambat tahun 2010.

Sangat fantastis dan revolusioner, mematahkan ketakutan warga bahwa tahun 2014 Jakarta akan kolaps dan macet total akibat ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan bermotor dengan jalan. Jika tidak diambil langkah PTM itu, dipastikan persis di tahun 2014 kedua vektor pertumbuhan kendaraan dan jalan akan bertemu di satu titik untuk mentok dan memacetkan Jakarta.

Transjakarta Busway

Pola transportasi terintegrasi itu, telah diawali dengan beroperasinya Transjakarta Busway, sejak 15 Januari 2004.

Hal ini dianggap sebagai titik awal atau embrio reformasi total angkutan umum ibukota Jakarta yang lebih nyaman, layak dan manusiawi. sekaligus sebagai bukti keberpihakan Pemerintah daerah DKI Jakarta terhadap masyarakat pengguna angkutan umum.

Ketika mula mewujudkan ide ini, Sutiyoso dan para stafnya dicerca bahkan dituding melakukan korupsi dengan me mark up biaya pembangunan busway itu. Namun, Sutiyoso terus melangkah. Hujatan tak bisa membendung reformasi total transportasi itu.

Tak berapa lama hujatan itu pun berubah menjadi pujian. Satu bulan berikutnya, hasil penelitian *Japan International for Cooperation Agency (JICA)* bekerjasama dengan Bappenas, menunjukkan sebanyak 14% pengguna busway terbukti berasal dari kalangan berduit yang sebelumnya pengendara mobil pribadi. Mereka inilah yang awalnya menolak keras ide baru busway sebab menduga lajur jalannya akan menyempit diambil busway.

Dengan rendah hati, Rustam Effendi mengakui, busway sama sekali belum lah menyelesaikan kemacetan Jakarta. Baginya busway di luar fungsi teknis membawa misi lain sebagai sarana edukatif masyarakat agar berdisiplin dalam berlalu lintas, mengajak pengguna kendaraan pribadi untuk lebih baik menggunakan angkutan umum

(busway), dan sekaligus sebagai bukti keberpihakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap masyarakat pengguna angkutan umum. Pengelolaan busway selanjutnya diserahkan ke Badan Pengelola (BP) TransJakarta.

Rustam menyebutkan hingga tahun 2010, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan sebanyak 15 corridor bus priority.

Sembilan koridor di antaranya bisa langsung siap diaplikasikan menjadi busway. Enam sisanya masih harus melalui modifikasi, seperti memperlebar jalan yang sempit dengan membebaskan tanah warga, atau mengambil sisi-sisi sungai kalau memang ada sungai yang bisa dimanfaatkan. Atau, bila perlu dinaikkan ke atas menjadi elevated road.

Busway Koridor-1 sudah operasional





TransJakarta Busway

sejak 1 Februari 2004, mengambil jurusan Blok M-Kota. Di tahun 2005 tambah lagi beroperasi dua koridor yakni Koridor-2 Pulogadung-Harmoni dan Koridor-3 Kalideres-Harmoni.

Pada kurun waktu tahun 2007 ditambah lagi empat koridor baru operasional. Keempat koridor tambahan itu, Koridor-4 Pasar Baru-Kebun Jeruk, Koridor-5 Kampung Rambutan-Tanjung Priok, Koridor-6 Pulogebang-Bundaran HI dan Koridor-7 jurusan Cililitan-Grogol. Sehingga tahun itu total terdapat tujuh koridor operasional.

Pada tahun bersamaan mulai pula beroperasi dua lingkaran jalur monorel. Dua jalur monorel dimaksud adalah green line yang bergerak memutar di sepanjang lingkaran dalam kota dan blue line jurusan Kampung Melayu-Taman Angrek.

Pada kurun waktu tahun 2010 akan ada lagi tambahan delapan koridor busway, serta mulai beroperasi jalur subway MRT jurusan Lebak Bulus-Dukuh Atas. Kedelapan tambahan busway adalah Koridor-8 jurusan Cililitan-Tanjung Priok, Koridor-9 Pasar Minggu-Manggarai, Koridor-10 Pulogebang-Kampung Melayu, Koridor-11 Ciledug-Blok M, Koridor-12 Warung Jati-Imam Bonjol, Koridor 13 Kalimalang-Blok M, Koridor-14 Lebak Bulus-Kebayoran Lama, dan Koridor-15 Senayan-Tanah Abang.

Rustam Effendi menyebutkan, lebih senang memilih busway sebagai prioritas transportasi massal Jakarta 2020 sebab lebih ekonomis.

Banjir Kanal Timur

Pengembangan angkutan umum massal berbasis air atau Water Ways

Transport, akan memanfaatkan sungai-sungai yang sudah ada. Di Jakarta terdapat minimal 13 aliran air memiliki lebar antara 100-300 meter yang dapat dimanfaatkan menjadi waterways transport, sekaligus menjadi angkutan wisata dan waterfront city.

Sungai-sungai itu seperti Banjir Kanal Timur (KBT) mengalir Cipinang-Laut sejauh 23,6 kilometer, Banjir Kanal Barat (KKB) mengalir Petamburan-Kapuk Muara 9,2 kilometer, Banjir Kanal Selatan (BKS) mengalir Karet Tengsin-Cipinang Cempedak 9,6 kilometer,

Sodetan Ciliwung-BKT mengalir Bidara Cina Cipinang

Besar Selatan 2,4 kilometer, Buaran mengalir Cakung Barat-Duren Sawit 4,3 kilometer, atau Cakung Drain mengalir Cakung Varat-Laut 11,9 kilometer.

Sehubungan dengan itu, pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) harus diprioritaskan. Namun niat itu mendapat hambatan dalam hal pembebasan lahan. Masyarakat pemilik lahan meminta ganti rugi jauh di atas harga NJOP (nilai jual obyek pajak). Sehingga terjadi stagnasi. Jika Pemprov DKI membayar di atas NJOP takut dituduh korupsi. Di samping itu, masyarakat juga menuntut ganti rugi yang sangat tinggi.

Dalam kondisi demikian, dikeluarkanlah Peraturan Presiden (Perpres) No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun Perpres 36 itu ditentang beberapa kalangan terutama beberapa LSM, diminta untuk direvisi bahkan dibatalkan.

Tapi pemerintah bersikukuh akan menerapkan Perpres itu untuk menyelesaikan pembangunan di antaranya pembangunan BKT dan jalan tol dalam kota Jakarta. Sebab Perpres itu, juga memberi keleluasaan bagi Pemprov bisa mematok harga lebih 20 persen dari NJOP. Hal yang tidak bisa dilakukan sebelum Perpres itu dikeluarkan.

Dengan landasan hukum Perpres itu, Sutiyoso segera mengintruksikan Walikota Jakarta Timur dan Jakarta Barat untuk segera membebaskan lahan kebutuhan BKT di wilayahnya. Jika tidak mampu akan diambil tindakan. Dengan sikap ini, Sutiyoso pun dianggap bertindak arogan oleh beberapa pengamat dan politisi. Tapi Sutiyoso bergeming. Tampaknya Sutiyoso sangat yakin langkahnya adalah untuk kepentingan umum terutama mengatasi masalah transportasi dan masalah banjir yang telah menjadi langganan tahunan di Jakarta.

BKT dan beberapa aliran sungai di Jakarta akan ditata menjadi basis ketiga angkutan umum missal. Hal ini diharapkan sekaligus mencegah

banjir. Karena keseluruhan sungai menjadi terpelihara lebar dan tingginya. Rakyat tak lagi berkesempatan membangun rumah macam-macam, seperti wc terbang, atau 'hotel perosotan' di sepanjang bantaran kali. Warga juga tak sembarangan lagi membuang sampah, termasuk buang hajat ke sungai. Demikian pula pengurukan sungai diharapkan tidak terjadi lagi.

Sungai yang akan memberikan fungsi utama menanggulangi banjir, juga berfungsi sebagai alat transportasi. Fungsi transportasi justru dimanfaatkan untuk mengontrol pemeliharaan sungai.

Fungsi ekonomis lain adalah pariwisata, yakni dengan memanfaatkan jalur sungai untuk berkeliling menyaksikan Kota Jakarta, atau citytour dari atas kapal sebagaimana masyarakat biasa telah memanfaatkan busway pada hari Sabtu-Minggu untuk mutar-mutar melihat Jakarta dengan bermodalkan ongkos Rp 2.500 saja. (crs-ht)



Hebohnya Sebuah Kebebasan

Nurdin Halid divonis bebas, Jaksa Agung langsung membentuk tim khusus. BAP Nurdin diduga dipalsukan.

Indikasi baru menyeruak di antara polemik vonis bebasnya Nurdin Halid. Kejaksaan Agung menduga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nurdin sengaja dipalsukan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, RJ Soehandoyo, seperti laporan *Indo Pos*, Kamis, 23 Juni 2005, ada dugaan ketidakcocokan tanda tangan penyidik di BAP yang ditunjukkan di



persidangan dengan tanda tangan penyidik sewaktu menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.

Dugaan pemalsuan itu terungkap ketika para saksi dalam pemeriksaan majelis hakim mengatakan bahwa keterangan tertulis yang tertuang pada BAP itu adalah keterangan untuk tersangka Waris Halid, bukan untuk Nurdin. Pada lembar pertama dibuat seolah-olah BAP itu untuk Nurdin Halid yang ditandatangani penyidik.

Boleh dibilang, saat ini Kejaksaan Agung memang sedang gonjang-

ganjing. Vonis bebas Nurdin Halid membuat sejumlah pimpinan lembaga gusar. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.

Teguran itu langsung ditindaklanjuti Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan membentuk tim penyiapan memori kasasi atas vonis Nurdin yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara dugaan

korupsi dana KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) pengadaan minyak goreng Rp 169,7 miliar.

Demikian *Rakyat Merdeka*, Rabu, 22 Juni 2005.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, RJ Soehandoyo, dengan dibentuknya tim itu, diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan kasasi atas

vonis bebas Nurdin Halid.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Hendarman Supandji, pembentukan tim tersebut untuk mempermudah upaya hukum atas vonis bebas Nurdin.

Seorang sumber *Rakyat Merdeka* menyebutkan, tim tersebut juga mengantisipasi agar putusan di tingkat kasasi nantinya tidak lagi membebaskan Nurdin Halid.

Seperti diberitakan berbagai media, akhir pekan lalu majelis hakim men-

jatuhkan vonis bebas murni (*vrijspraak*) atas Nurdin. Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) itu dinyatakan tidak bersalah atas kasus penyimpangan dana KLBI sesuai dakwaan jaksa.

Menurut majelis hakim, keputusan Nurdin menunda penyetoran dana KLBI Rp 169,7 miliar ke escrow account (rekening penampung) Bulog dinilai sebagai keputusan organisasi KDI, bukan individu. Pembelian gula pasir yang selama ini disangka menggunakan dana KLBI, karena terbukti diambil dari kas KDI.

Reaksi mulai bermunculan dari berbagai pihak. Dari DPR maupun sejumlah pengamat. DPR menuding keputusan itu keluar karena Mahkamah Agung (MA) lemah dalam mengawasi para hakim.

Sementara di *Media Indonesia*, Senin, 20 Juni 2005, Ketua Majelis Anggota PBHI Hendardi mengatakan, vonis bebas tersebut merupakan intervensi yang dilakukan secara transparan, yang selalu mungkin di tengah lembaga peradilan yang korup.

Pengamat hukum dan politik Siswono Yudho Husodo berpendapat, perlu adanya kajian yang mendalam mengenai putusan bebas Nurdin Halid. Dia merasa akan kejanggalan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 20 tahun penjara dengan vonis bebas dari majelis hakim.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai I Wayan Rena memutuskan Ketua KDI itu bebas dari semua dakwaan jaksa, Kamis, (16/6). Putusan yang sangat jauh dari tuntutan JPU yakni penjara 20 tahun dan denda Rp 30 juta.

Dalam amar putusannya, seperti dimuat majalah *GATRA* edisi 25 Juni 2005, majelis menganggap tidak ada perbuatan pidana. Hubungan hukum antara Bulog dengan KDI adalah perdata, yaitu kerja sama distribusi dan pengadaan minyak goreng.■

Pak Dirut Siapkan Data Korupsi

Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Iwan Pontjowinoto menyatakan siap membantu penegak hukum menuntaskan tuntutan hukum terhadap mantan Direktur Investasi PT Jamsostek Andi Rahman Alamsyah atas dugaan korupsi pembelian obligasi Bank Global senilai Rp 300 miliar. Demikian *Merdeka*, Kamis, 23 Juni 2005.

Timas Tipikor sejak Senin (20/6) menahan Andi R. Alamsyah dan menetapkannya sebagai tersangka, karena terbukti membeli sejumlah obligasi Bank Global tanpa persetujuan dewan direksi PT Jamsostek. Kini Bank Global telah dicabut izin operasionalnya, karena tersangkut kasus reksadana fiktif.

Dalam kesempatan itu, Iwan Pontjowinoto menepis tuduhan bahwa nilai kerugian kasus korupsi yang sedang diperiksa saat ini akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Jamsostek saat ini. Menurutnya, sejak tahun 2004 sudah ada perbaikan kinerja, dari pengawasan sampai perbaikan manajemen portfolio.

Jamsostek telah memberikan dana obligasi subordinasi kepada Bank Global tanpa prosedur yang benar. Ternyata Bank Global lepas tanggung jawab dan melarikan diri hingga menimbulkan kerugian negara Rp 100 miliar.■

Dengan wajah pucat, Tengku Syaifuddin Popon keluar dari mobil KIA Carrens yang membawanya ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia digandeng penyidik KPK menuju lantai tiga ruang pemeriksaan.

Tentu dirinya tidak menyangka bakal dicituk penyidik KPK saat sedang

Menurutnya, uang sejumlah Rp 250 juta itu milik Said Salim, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT PTUN) Sumatera Utara. Said Salim meminta tolong padanya menyerahkan uang itu kepada pihak Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dia menegaskan bahwa uang itu tidak ada hubungannya dengan kelanjutan perkara Puteh. Demikian *Media Indonesia*, Selasa, 21 Juni 2005, melaporkan.

ikut menangani perkara banding Puteh.

Satu SMS yang dikirim 14 Juni-sehari sebelum penangkapan-pukul 16:37 WIB berbunyi: "Pak Rizal, alhamdulillah saya dan pengacara AP sudah bertemu beliau-beliau malam ini, di suatu tempat yang dirahasiakan. Mohon doa restu semoga perjuangan kita berhasil."

Pengirim SMS itu disebut-sebut kerabat Puteh bernama Said Salim,

Sekoper Uang di Laci Meja

Pengacara Abdullah Puteh tertangkap tangan melakukan transaksi pemberian uang ratusan juta rupiah. Puteh pun kebakaran jenggot.

melakukan transaksi pemberian uang senilai Rp 250 juta kepada Wakil Ketua Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Syamsu Rizal Ramadhan.

Uang itu berada di dalam tas dan ditemukan di laci meja Syamsu Rizal oleh penyidik yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi sebelumnya. Demikian dilaporkan *Kompas*, Kamis, 16 Juni 2005.

Siapakah Tengku Syaifuddin Popon itu? Dia adalah pengacara Gubernur nonaktif Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh, terpidana kasus korupsi pengadaan helikopter MI-2.

Anehnya, dua anggota tim penasihat hukum Puteh, yakni M. Assegaf dan OC Kaligis mengaku tidak mengenal Popon. Menurut Kaligis, selama ini memang banyak pengacara yang terlibat sebagai penasihat hukum Puteh.

Assegaf, dalam kesempatan terpisah, mengatakan Popon adalah pengacara yang baru bergabung membela Puteh di tingkat banding. Namun dia sendiri belum pernah bertemu dengannya. Popon mendapat kuasa tersendiri dari Puteh dan kemungkinan bekerja sendiri.

Masih banyak yang harus diungkapkan dalam kasus ini. Popon sendiri dalam keterangannya mengatakan bahwa uang itu tidak ada hubungannya dengan kasus Puteh.

Klarifikasi

Kuasa hukum Syamsu Rizal, Sitor Situmorang, mengaku bertemu Abdullah Puteh untuk mengklarifikasi kasus yang melibatkan kliennya. "Pak Puteh kaget soal ini," ujar Situmorang, seperti dilaporkan *Koran Tempo*, Selasa, 21 Juni 2005.

Menurutnya, Puteh mengaku tidak meminta pengacaranya Syaifuddin Popon memberikan uang kepada panitera. Situmorang sendiri merasa perlu mengklarifikasikan hal itu karena dia bekas pengacara Puteh.

Uang sejumlah Rp 250 juta itu, menurut Situmorang, merupakan titipan Popon kepada Syamsu untuk diserahkan kepada M. Sholeh, panitera pengadilan. Tapi tidak tahu mau diserahkan kepada siapa. Nama yang terakhir ini belakangan juga ditangkap KPK.

Pengacara Rizal lainnya, Arsan Yunus, mengaku bahwa antara kliennya dengan Wakil Panitera PT PTUN Sumatera Utara, Said Salim, pernah terjadi kontak. Namun tidak ada pembicaraan masalah uang tersebut, melainkan soal perkembangan kasus Puteh.

Keterangan Arsan berbeda dengan keterangan seorang sumber di majalah *Tempo* edisi 20-26 Juni 2005. Dari keterangan sang sumber, telah ada pembicaraan antara Syamsu Rizal dengan Said Salim melalui SMS. Menurut sumber ini, KPK menyadap komunikasi lewat SMS dari telepon genggam bernomor 08116519xx ke telepon genggam Rizal. Ada enam SMS menanyakan putusan banding Puteh. Disebut pula nama seorang hakim yang



yang kini menjabat wakil panitera di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Medan.

Rizal, dalam pengakuannya pada penyidik, mengaku bertemu dengan Said di Jakarta awal Mei lalu, lewat Soleh. Uang yang dibawa Popon dikatakan berasal dari Said.

Namun, Said membantah hal tersebut. Menurutnya, dilaporkan *Kompas*, Jumat, 24 Juni 2005, dia pergi ke Jakarta tapi tidak bertemu dengan Popon melainkan dengan dua orang rekannya.

Bahkan mengenai SMS yang dia lakukan dengan Ramadhan Rizal, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi DKI, Said mengatakan bahwa itu sekedar menanyakan perkara Puteh, karena hal itu pun ditanyakan sahabat-sahabat Puteh di Medan yang juga mengenal Popon. ■

Telisik yang Dibuat

Rekomendasi TPF pada Presiden

TPF Kasus Munir yang masa tugasnya berakhir pada Kamis, (23/6) lalu, memberikan tiga rekomendasi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satunya mengenai nama-nama yang harus diselidiki lebih mendalam.

Dilaporkan *Media Indonesia*, Sabtu, 25 Juni 2005, penyerahan laporan itu dilakukan Jumat siang, (24/6), di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Presiden secara tegas mengingatkan, meskipun masa tugas TPF sudah berakhir, agenda pengungkapan kasus meninggalnya Munir akan terus berjalan sesuai kasus yang ada dan diselesaikan secepatnya.

Sekretaris TPF Usman Hamid berpendapat perlu ada dorongan terhadap institusi yang mempunyai kewajiban langsung terhadap institusi ini. Kepada Presiden, tim juga menyampaikan adanya faktor tekanan kepada polisi, sehingga dukungan utama harus diberikan pada polisi.

Seperti dilaporkan *Koran Tempo*, Sabtu, 25 Juni 2005, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar akan membentuk tim baru untuk menginvestigasi kasus tersebut. Polri juga akan menyelidiki dokumen temuan TPF berisi empat skenario pembunuhan Munir.

Rekonstruksi akan dilakukan tertutup dan hal-hal yang disampaikan ke publik akan dibatasi. Yang nantinya akan dibuka saat sidang pengadilan. ■

Proses penyelidikan kasus kematian Munir lambat, padahal masa tugas TPF sudah habis. Perseteruan dengan Hendropriyono malah meruncing.

Setelah membuat gemas pihak Tim Pencari Fakta (TPF) karena dia tak kunjung memenuhi panggilan mereka, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono memilih datang memenuhi panggilan Tim Pemantau Penyelidikan Kasus Munir DPR, Senin (20/6).

Namun, keinginan DPR untuk mempertemukan Hendro dengan TPF sehari kemudian, Selasa (21/6), tidak terealisasi. Pada rapat yang dipimpin Slamet Effendy Yusuf itu, hanya Hendro yang hadir.

Dilaporkan *Republika*, Rabu, 22 Juni 2005, alasan ketidakhadiran TPF Munir karena TPF sudah menerima penegasan dari Kepala Kabareskrim Mabes Polri bahwa Hendro sudah diperiksa. Berarti, menurut TPF Munir, proses hukum sudah berjalan.

TPF juga tidak ingin mediasi yang difasilitasi DPR berkesan politis. Wakil Ketua TPF, Asmara Nababan mengatakan, pihaknya tinggal konfirmasi kepada penyidik Polri. Demikian *Koran Tempo*, Rabu, 22 Juni 2005.

Sebelumnya, seperti dilaporkan *Koran Tempo* pada Selasa, 21 Juni, dalam pertemuan Hendro dengan DPR di Gedung MPR/DPR Jakarta itu, Hendro menyatakan tak tahu siapa yang membunuh aktivis hak asasi manusia itu. "Saya siap sumpah pocong," katanya. Dia juga membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut, tidak mengenal Polycarpus Budihari Priyanto yang kini

menjadi tersangka utama pembunuhan itu dan tidak tahu menahu soal dokumen berisi empat skenario itu.

Di hari yang sama, TPF melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. Menurut Ketua TPF Brigjen Pol Marsudhi Hanafi, dalam laporan *Media Indonesia*, Selasa, 21 Juni 2005, Presiden merasa kecewa dengan ketidakhadiran Hendropriyono. Padahal, TPF adalah perpanjangan tangan Presiden.

Seperti diketahui, Hendropriyono sebelumnya tidak memenuhi panggilan TPF sebanyak tiga kali. Undangan pertama untuk jadwal pertemuan tanggal 6 Juni, berikutnya untuk pertemuan tanggal 9 Juni dan 16 Juni. Tanggal 15 Juni, Hendro malah balik mengundang TPF, tapi TPF menolak (*Koran Tempo*, Selasa, 21 Juni 2005).

Hendropriyono sendiri di sela peremuannya dengan DPR berkilah bahwa pihaknya merasa difitnah dan dizalimi TPF Munir. Menurutnya, sebagai





Memburu Pembunuh Munir

- 7 September 2004, Munir meninggal dalam penerbangan Singapura-Belanda.
- 14 September 2004, dari hasil otopsi di Bandara Schipol, Belanda, disimpulkan Munir meninggal karena diracun.
- 11 November 2004, hasil uji ulang oleh Netherlands Forensich Institute menemukan timbunan arsenik (460 mg) di tubuh Munir.
- 22 November 2004, Komisi III DPR-RI membentuk Tim Pencari fakta (TPF) Munir.
- 23 November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani pembentukan TPF Munir yang diketuai Brigjen Pol Marsudhi Hanafi, anggotanya 12 orang. TPF diberi waktu tiga bulan untuk melacak fakta atas kematian Munir. Bisa diperpanjang hingga enam bulan.
- 18 Maret 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang bertukar tempat duduk dengan Munir, dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan di Mabes Polri.
- 2 Mei 2005, TPF kesulitan memanggil Nurhadi Djazuli, mantan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Kemudian, TPF menandatangani protokol kerja sama dengan BIN.
- 9 Mei 2005, Nurhadi Djazuli diperiksa TPF.
- 11 Mei 2005, TPF bertemu Presiden SBY, melaporkan berbagai hambatan kerja TPF.
- 16 Mei 2005, Muchdi PR, mantan Deputi

- V BIN, diperiksa di Mabes Polri sebagai saksi.
- 17 Mei 2005, masa penahanan Pollycarpus diperpanjang 30 hari. Yeti Susmiati (pramugari) dan Oedi Irianto (petugas pantry) Garuda yang bertugas saat penerbangan Munir ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Bersama Pollycarpus, keduanya diskors dari Garuda.
- 18 Mei 2005, bersama Kepala BIN Syamsir Siregar, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar dan Menteri Kehakiman dan HAM Hamid Awaludin, TPF bertemu Presiden SBY. TPF melaporkan temuannya, termasuk kontak telepon Pollycarpus dengan kantor Muchdi PR.
- 27 Mei 2005, mantan Kepala BIN Hendropriyono, mangkir dari panggilan TPF
- 29 Mei 2005, Hendropriyono melaporkan Usman Hamid dan Rachlan Nashidik (anggota TPF) ke Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.
- 6 Juni 2005, TPF melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Hendropriyono, tapi ia tak mau datang.
- 7 Juni 2005, lagi-lagi Hendro menolak panggilan TPF untuk ketiga kalinya.
- 14 Juni 2005, TPF menemukan dokumen intelijen yang mengungkap empat skenario pembunuhan Munir, yaitu menabrak dengan mobil, meminta bantuan dukun santet, meracun di kantor Kontras dan meracun Munir saat penerbangan.
- 23 Juni 2005, masa kerja TPF berakhir.

(Sumber: majalah *GATRA* edisi 25 Juni 2005)

pencari fakta - bukan penadah fakta - TPF mestinya datang ke tempatnya untuk mencari fakta.

"Kalau dulu zaman Kopkamtib orang bisa dipaksa. Jika dia tidak memenuhi panggilan akan dijemput. Tetapi rakyat kini jadi raja dan tidak bisa dipaksa seperti itu," katanya, seperti dikutip *Media Indonesia*, Selasa, 21 Juni 2005.

Soal Dokumen

Sementara itu, dokumen yang ditemukan TPF isinya cuma delapan halaman, namun isinya cukup menghebohkan. Karena, selain memuat empat skenario pembunuhan Munir, juga berisi nama sejumlah tokoh penting yang terlibat dan juga nama toko tempat racun arsenik itu diperoleh.

Dari empat skenario itu hanya satu yang bisa dijalankan, demikian dikatakan Ketua TPF Brigjen Pol Marsudhi Hanafi, yang dikutip majalah *GATRA* No. 32.

Skenario pertama, pembunuhan

Munir dibuat seolah-olah sebagai kecelakaan lalu lintas, dengan menabrak kendaraannya. Skenario kedua, Munir dihabisi dengan menggunakan ilmu hitam atau santet. Skenario ketiga, pembunuhan dilakukan di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), dengan melibatkan orang Kontras yang sudah 'dibina'. Namun ketiga skenario itu gagal atau dibatalkan.

Munir akhirnya meninggal dengan skenario keempat, yakni dengan meracuninya di dalam pesawat Garuda bernomor penerbangan GA-974 pada 7 September lalu, saat dia menuju Amsterdam, Belanda.

Dilaporkan majalah *Tempo* edisi 20-

26 Juni 2005, penyelidikan yang dilakukan Institut Forensik Belanda menemukan larutan arsenik di sampel darah Munir, sejumlah 3,1 miligram per liter. Padahal, ambang batas yang bisa ditolerir tubuh manusia hanya 1,7 miligram.

Dokumen ini lantas dipertanyakan pihak Badan Intelijen Negara (BIN). Kepala BIN, Mayjen Syamsir Siregar, menyatakan belum pernah melihat dan membaca dokumen tersebut. Dalam laporan *Republika*, 16 Juni 2005, Syamsir menyatakan sejauh ini sudah ada enam orang anggota BIN yang diperiksa. Yakni mereka yang kemungkinan dengan jabatannya ada akses ke kasus itu.■

Ironisme Hukum Cambuk

Setiap terhukum diberi hadiah, penonton bersorak-sorai. Diwarnai sogokan.

dan bersorak-sorai.

Setelah dicambuk di atas panggung yang dihias bagus itu, para terhukum yang memakai pakaian khusus berwarna putih itu turun dari panggung dan disambut bak pahlawan. Mereka dihadahi pelukan dan ciuman di kedua pipi serta bingkisan dari pejabat pemerintah, berupa Al-Quran, sajadah dan perlengkapan sholat.

Mulanya terdapat 26 terhukum, tetapi hanya 12 orang yang menjalani hukuman saat itu. Sisanya akan menjalani hukumannya di halaman masjid daerah masing-masing.

Terhukum berprofesi sebagai pedagang, buruh, petani dan guru madrasah. Rata-rata dihukum karena berjudi. Setelah dicambuk tidak ada terhukum yang menderita luka serius. Dalam rangka hukuman cambuk pertama di Tanah Air ini, pemerintah daerah menyiagakan sejumlah dokter dan tenaga medis sebanyak empat tim.

Rotan yang dipakai menyabet terhukum berukuran satu meter. Algojonya memakai penutup kepala dan jubah warna hijau muda. Identitas algojo yang juga polisi syariah Islam itu pun dirahasiakan.

Uniknya, ada terhukum yang begitu usai dicambuk melambaikan tangan sambil tersenyum lebar kepada penonton, ada yang meneriakkan *Allahu Akbar* dan tidak sedikit yang menyampaikan penyesalannya. ■

menerapkan syariah Islam, sistem hukum peradilannya hanya satu, yakni di MA.

Menurut Bagir, Aceh memang memberlakukan *qanun*, yakni peraturan daerah yang berlaku mendasarkan pada syariat Islam. Hukuman yang bisa diterapkan seharusnya berkaitan dengan *qanun* itu, tidak menyangkut hukuman pidana yang sifatnya umum.

Sementara itu, dilaporkan *Media Indonesia*, Sabtu, 25 Juni 2005, hukuman yang dilaksanakan di pelataran Masjid Agung Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam itu ditonton sekitar 2.000 orang laksana sebuah hiburan. Setiap kali petugas memanggil terhukum, para penonton langsung bertepuk tangan

Hendro ke Dewan Pers

Diantar pengacaranya, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Hendropriyono datang ke Gedung Dewan Pers. Dia bermaksud menyampaikan kekecewaannya karena merasa telah dihakimi media (*trial by the press*) berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir.

Menurutnya, seperti dikutip *Koran Tempo*, Sabtu, 25 Juni 2005, pers tidak melakukan pemeriksaan ulang ke lapangan berkaitan dengan pernyataan Presiden SBY yang kecewa terhadap ketidakhadirannya memenuhi undangan TPF Munir. Padahal, setelah dirinya melakukan konfirmasi, Presiden tidak memberikan komentar seperti yang dimuat media.

Dewan Pers yang diwakili RH Siregar menjelaskan, pemberitaan yang dilakukan media massa bukan untuk menghakimi Hendropriyono. "Pemberitaan yang ada tentang Hendropriyono belum *trial by the press* karena berasal dari dua sumber yang berbeda.

Para terhukum diapit dua polisi syariah (*waliyatul hisbah*) satu persatu menuju panggung. Seorang algojo dengan penutup kepala ditunjuk sebagai eksekutor. Masing-masing terpidana menerima enam sampai sepuluh cambukan sesuai derajat kesalahannya.

Ridwan, seorang terpidana, sempat memberontak setelah dicambuk sebanyak enam kali. Seperti dilaporkan *Koran Tempo*, Sabtu, 25 Juni 2005, warga Pulo Kiton ini mendekati Erwin Nasution, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bireuen.

"Saya mau menagih janji dia," kata pria 37 tahun itu. Rupanya dia dan enam terpidana lainnya mengaku masing-masing menyetero uang sebesar Rp 800 ribu agar bebas dari cambukan.

Sehari sebelumnya, seorang terpidana lain juga mengaku menyetero uang kepada jaksa Erwin melalui perantara bernama Azwani. Tapi Erwin membantah uang itu sebagai sogokan untuk membebaskan para terpidana dari hukuman cambuk. "Itu uang terima kasih dan bukan uang suap," katanya.

Dugaan suap kepada jaksa Erwin ini membuat kecewa warga yang menyaksikan eksekusi hukuman cambuk.

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menegaskan, para terpidana bisa mengajukan banding ke MA atas eksekusi cambukan. Meskipun Aceh

Ada berita bergambar menarik di Majalah Femina Edisi 22 yang beredar 2-8 Juni 2005. Majalah wanita mingguan ini menampilkan foto 10 tokoh yang memasang simbol larangan merokok di bagian dada sebelah kiri.

P emotretan dilakukan bekerjasama dengan Komisi Nasional Penanggulangan Masalah Rokok. Sebagaimana cirinya majalah ini yang 'hemat kata-kata' tidak banyak kalimat dalam tampilan berita empat halaman bertajuk *Kami Tidak Merokok, Anda Juga, Dong...*, itu. Hanya petikan singkat ucapan dan pengalaman kesepuluh tokoh itu. Mereka adalah Gubernur DKI Sutiyoso (61), Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda S Goeltom (56), Ketua Komisi Nasional Anti Rokok Frarid Anfasa Moeloek (60), pengusaha Amalia Wirjono (36), Presenter dan Bintang Iklan Lula Kamal (35) di satu

halaman. Pada halaman sebelumnya ditampilkan pengacara Todung Mulya Lubis (56), Ketua Wanita Indonesia Tanpa Tembakau Nita Yudi (40), atlit tennis Angeliqwe Widjaja (19), actor Marcelino Lefrandt (30), presenter Sarah Sechan (30), dan presenter Maudy Koesnaedy (30). Sutiyoso yang akrab disapa Bang Yos menuturkan mengapa dia berhenti merokok. Dia sudah 10 tahun tidak merokok. Keputusan itu diambil karena komitmen kepada anak. Saat itu, Yessy, anak tertuanya, yang lagi kuliah di UI berulang tahun bersamaan Sutiyoso naik pangkat jadi Brigjen. Sutiyoso ingin membuat pesta syukur, tapi puterinya menolak. "Maunya apa, sih?"

tanya Sutiyoso agak heran. Yessy, puterinya, balik bertanya: "Kalau minta hadiah Papa *nurutin nggak?*" "Pasti," jawab Sutiyoso tegas karena yakin puterinya tidak akan minta yang aneh-aneh. "Mulai besok, Papa *nggak* boleh lagi merokok!" pinta puterinya. Sejak itu, Sutiyoso memegang komitmen tidak lagi merokok.

Lain lagi kisahnya Miranda S Goeltom. Dulu dia perokok. Suatu kali, 1978, dia melihat seorang wanita duduk di mobil sambil merokok. Tangan wanita itu sibuk merogoh kunci di dalam tas. Sebetar-sebetar wanita itu mengeluarkan rokok. Miranda terus memperhatikan. "Ih..., jelek banget ternyata kalau wanita merokok," gumamnya. Besoknya dia pun berhenti merokok.

Sementara delapan tokoh lainnya pada prinsipnya menekankan bahaya rokok dan menyarankan lebih baik tidak merokok. "Tidak perlu merokok untuk tampil keren," pesan Marcelino. "Keluarga saya tidak ada yang merokok," ujar Anglique. "Memberi contoh tidak merokok pada anak, menjadi tugas utama ibu," kata Nita Yudi. Sementara Farid Anfasa Moeloek mengingatkan rusaknya generasi muda akibat rokok. Lula Kamal bilang, merokok membuat wanita tidak cantik dan tidak sehat. Amalia Wirjono mengatakan kasihan *passive smoker* itu, mereka tidak merokok tapi kena dampaknya. Ya, lebih baik tidak merokok!■

Lebih Baik Tidak Merokok



Suratkabar Pertama Ditulis Tangan

Usia suratkabar cetak sudah menginjak 400 tahun. Asosiasi Suratkabar Dunia menetapkan akta kelahiran koran *Relation*, tahun 1605, sebagai tonggak kelahiran suratkabar.

Empat abad yang lalu, suratkabar cetak berkala hanya dilangani oleh orang-orang kaya raya di Strasbourg. Pemiliknya, Johann Carolus, memberi nama, *Relation*, bagi koran setebal 4 sampai 6 halaman itu. Akta pendirian koran tersebut kini tersimpan di The Gutenberg Museum, Maiz, Jerman.

Bukti tersebut tertera di dalam sebuah petisi yang ditulis tangan oleh Carolus, Oktober 1605 dan dikirim ke Dewan Kota Strasbourg (kini di Prancis). Carolus meminta perlindungan Dewan dari upaya penerbit lain mencetak ulang buletinnya. Surat itu terselip di antara tumpukan arsip Strasbourg, diketemukan oleh Martin Welke, pendiri German Newspaper Museum, dan Profesor Jean Pierre Kintz, ahli sejarah Strasbourg.

Penemuan itu, menurut *Koran Tempo* (16/6) yang mengutip World Association of Newspapers, dilaporkan kepada WAN dan dipresentasikan di pertemuan tahunan asosiasi tersebut di Seoul, awal Juni.

Pertama-tama Carolus menerbitkan suratkabarnya dalam tulisan tangan, dan menjualnya hanya kepada orang-orang kaya dengan harga sangat mahal. Dia menerbitkan buletin itu dengan mempekerjakan jaringan koresponden yang dibayar.

Carolus kemudian membeli toko percetakan dari seorang janda pemilik percetakan terkenal pada tahun 1604. Hanya setahun kemudian, pada musim panas 1605, Carolus memulai *Relation* dengan cetakan. Sebab, menggunakan tulis tangan memakan waktu dan melelahkan. Naluri bisnis Carolus juga jalan. Jika dicetak, korannya bisa lebih murah, tetapi sirkulasinya bisa lebih luas.

Juli ini, Gutenberg Museum menggelar pameran besar, sekaligus merayakan kelahiran suratkabar cetak. Meskipun WAN mengakui 1605 sebagai

tahun kelahiran suratkabar cetak pertama, sebenarnya cikal bakal suratkabar sudah ada sejak Julius Cesar memerintah Romawi 59 SM, namanya *Acta Diurna*. Informasi tentang kejadian-kejadian sosial dan politik ditulis di papan-papan tulis putih ukuran besar yang dipasang di tempat-tempat ramai.

Era suratkabar dengan kertas cetakan dipercaya muncul pertama kali di Cina, tahun 713. Namanya, Berita Serba-serbi, muncul di Beijing. Tahun 1559, pemerintah Venesia menerbitkan *Notiziescritte*, suratkabar bulanan. Koran *Corante* terbit di Inggris tahun 1621, disusul koran *Gazette* yang terbit di Prancis tahun 1631. Kemudian di Swedia, tahun 1645, muncul suratkabar tertua, *Post-och Inrikes Tidningar*, masih beredar sampai sekarang. Koran pertama Amerika, *Publick Occurrences*, terbit di Boston, tahun 1690.

Tahun 1814, John Walter menerbitkan *The Times* di London. Dia mengganti pencetakan manual dengan dengan mesin cetak Koenig yang mampu menghasilkan 1.100 lembar suratkabar per jam. *Yomiuri Shimbun*, terbit tahun 1874 di Jepang, mencatat oplag terbesar di dunia, 10 juta eksemplar sehari. Foto pertama muncul di suratkabar tahun 1890.

Kompas Berubah

Kompas, koran terbesar di Indonesia, berubah, tepat pada usia 40 tahun, Selasa 28 Juni 2005. Perubahan itu, tampaknya direncanakan secara matang. Jakob Oetama, Pemimpin Umum koran yang terbit sejak 28 Juni 1965, memaknai perubahan itu dalam artikel di atas *headline* (28/6) bertajuk: Perjalanan Panjang Menuju Pengabdian Kedua.



Dalam tajuknya dijelaskan pula mengapa *Kompas* diredisain sekarang? Justru karena dewasa ini kondisi *Kompas* serba sehat, segar dan baik. Redisain *Kompas* dilakukan secara serius oleh tim yang didukung semua bagian, redaksi, percetakan, periklanan, pemasaran dan manajemen. Serta disiapkan dengan membayar jasa Mario Garcia, seorang ahli redisain surat kabar terkenal dewasa ini.

Mario Gracia, yang profilnya disajikan dalam rubrik Sosok pada edisi yang sama, juga menulis perihal redisain *Kompas* itu dalam rubrik Opini bertajuk: Disain untuk Pembaca Era Digital. Dilengkapi tulisan Daniel Dhakidae, Kepala Litbang *Kompas*, berjudul: Kompas 2005, Mengapa Berubah. Bahkan pada halaman 38 disajikan Panduan Membaca Kompas.

Tampaknya *Kompas* tidak sekadar melakukan perubahan tata letak, tetapi juga isi dan gaya. Perubahan itu membuat *Kompas* tampil dalam kemasan yang lebih visual, dengan pembagian rubrik yang lebih lancar dan lebih mudah, dan isi tetap rajanya. Isi yang dapat dipercaya. Bagaimanapun kemasannya ditampilkan, isi (berita) adalah tetap bagian penentu utama penerbitan. *Content is king*.

Namun, tulis koran ini dalam tajuk, visi dan komitmen *Kompas* tidak berubah, tetapi diaktualisasikan dan dibuat lebih relevan dengan perkembangan dan perubahan zaman, lebih-lebih kebutuhan pembacanya. ■



Agar Pilihan Tak Jadi Penyesalan

Banyak perguruan tinggi swasta menebar janji lewat iklan dan promosi di media massa. Masyarakat harus jeli karena tidak semua program studi terakreditasi.



Kompas edisi 12 Juni 2005 menuliskan kisah Janche Pulumbara, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) di bilangan Jakarta Pusat, yang merasa kecewa, bercampur sesal dan kesal, karena merasa ditipu PTS tempatnya kuliah sekarang.

Janche telah dikelabui pengelola kampusnya lewat brosur promosi yang diperolehnya selepas menamatkan SMU dulu. Brosur itu menjanjikan berbagai fasilitas yang akan didapatkan selama kuliah di PTS itu. Dia pun terpikat dengan janji-janji itu, dan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di PTS itu.

Belakangan, setelah dua tahun berlalu, Janche baru menyadari bahwa dirinya telah dikelabui oleh pengelola kampusnya melalui janji-janji muluk dalam brosur itu.

"Saya sudah masuk semester empat (sekarang), namun ternyata fasilitas yang dijanjikan seperti yang tertulis dalam brosur itu tidak ada," ujar Janche dengan nada gusar.

Hal lain yang semakin membuatnya masygul adalah peringkat akreditasi B pada program studinya yang dipromosikan PTS itu ternyata palsu.

Fakta itu diketahuinya setelah mengecek langsung ke Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Fakta yang sebenarnya, peringkat akreditasi program studinya adalah C.

Mungkin masih banyak "korban brosur" lain seperti Janche. Dan, tidak mustahil pula, modus penipuan lewat

brosur telah mencari mangsa-mangsa baru, para lulusan SMU yang kebingungan memilih PTS. Janji palsu PTS itu bersinergi dengan sikap tidak hati-hati calon mahasiswa dalam menentukan pilihan.

Kasus yang menimpa Janche di atas merupakan satu contoh faktual yang disodorkan Kompas dalam menyoroti secara kritis fenomena 'penipuan' PTS terhadap mahasiswa baru.

Apa yang dialami Janche ini bukan tidak mungkin juga menimpa mahasiswa yang lain. Karena kealpaan atau kurang hati-hati dalam memilih bidang studi sehingga "terperangkap" mendaftar ke perguruan tinggi tersebut.

Menyongsong tahun akademik baru 2005-2006, berbagai PTS di seluruh Indonesia bisa dipastikan telah gencar melakukan promosi untuk menanggung para lulusan SMU.

Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk di lokasi-lokasi strategi, penyebaran brosur-brosur berisi profil dan kualifikasi yang dimilikinya ke sekolah-sekolah, sampai memasang iklan di berbagai media cetak dan elektronik (radio dan televisi).

Jelas bahwa melalui spanduk, brosur, dan iklan spot tadi PTS-PTS menawarkan berbagai program studi plus status akreditasinya, dan tak ketinggalan pula sejumlah keunggulan dan fasilitas yang dimilikinya.

Memang, di satu sisi, begitu banyaknya penawaran dari berbagai PTS paling tidak menjadi referensi bagi para calon mahasiswa untuk menentukan pilihan.

Misalnya, calon mahasiswa bisa memilih berdasarkan status akreditasi PTS bersangkutan, atau atas dasar berbagai keunggulan dan fasilitas yang ditawarkan, ketersediaan waktu kuliah, kedekatan dengan tempat tinggal, atau pertimbangan kemampuan keuangan yang dimiliki untuk membayar uang kuliah.

Akan tetapi, di lain sisi, para calon mahasiswa sepatutnya mencari kebenaran atau keakuratan data-data yang ditawarkan PTS lewat spanduk, brosur, atau iklan.

Karena bukan tidak mungkin apa yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya alias 'indah kabar dari rupa'.

Pihak Dirjen Dikti Depdiknas mengakui adanya PTS-PTS yang mempromosikan akreditasi program-program studi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Pihak Dikti menyarankan kepada setiap calon mahasiswa atau orang tuanya, apabila muncul keraguan atau ingin terhindar dari salah pilih PTS, untuk melakukan pengecekan langsung ke Ditjen Dikti atau dengan membuka situs www.dikti.org. Banyak informasi tentang perguruan tinggi (negeri dan swasta) yang disajikan dalam situs itu.

Semua itu bisa menjadi referensi yang sangat bermanfaat bagi calon mahasiswa agar tidak termakan promosi PTS yang menyesatkan. Kejelian dan ketelitian, itulah kunci agar pilihan tak menjadi penyesalan di belakang hari. ■ (SP/AF)

Hendarman Supandji:

“Korupsi No, Berantas

Kehadiran Hendarman dan Tim membuat banyak pihak, baik koruptor maupun mereka yang pernah hanya ketiban ‘rezeki’ nomplok menikmati hasil korupsi orang lain, kegerahan. Sebab hampir tidak ada korupsi yang berdiri sendiri. “Sang Koruptor” pasti menyiapkan katup pengaman berlapis. Jika dahulu korupsi berlangsung ramai-ramai di bawah meja, sehingga hampir tak satu pun koruptor yang tampak ke permukaan, kini, mejanya pun ikut dikorupsi. Dalam setiap kasus hampir tak ada personil atau institusi terkait lain yang tak terlibat. Kasus dana taktis KPU dan DAU Departemen Agama, misalnya, mencontohkan hal itu.

Istilahnya “korupsi berjamaah”. Maka tidaklah mengherankan apabila peringkat Indonesia masih tetap lima besar sebagai negara terkorup di dunia, serta urutan nomor satu untuk tingkat Asia.

Diberi Waktu 2 Tahun

Tim pimpinan Hendarman Supandji, sehari-hari menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), itu beranggotakan 48 personil terdiri 15 unsur Kejaksaan Agung, 15 unsur Kepolisian RI, 15 unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tiga dari lingkungan Istana, ditambah tiga penasehat yakni Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Kepala BPKP.

Hendarman memperoleh amanah dan tugas mulia memberantas korupsi, sesuai dengan pesan Keppres No. 11 Tahun 2005 ditandatangani 2 Mei 2005, menasar indikasi korupsi yang terjadi di lingkungan Setneg dan Setkab, empat departemen, tiga lembaga swasta, 16 BUMN, dan 12 koruptor kakap yang lari berlindung di luar negeri. Hendarman harus bisa menyelesaikan tugasnya selama dua tahun bekerja.

Tim diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang

berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi. Hendarman juga berwenang mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal. Demi mencapai keberhasilan, Tim dipersilakan bekerjasama erat dengan BPK, KPK, PPATK, Komisi Ombudsman Nasional, dan instansi pemerintah lainnya.

Peta 2 Jalur

Sebagai lembaga baru ekstra kuat, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, berdasarkan Keppres No. 61/M/2005 tanggal 21 April 2005, di dalam Tim Hendarman dibantu sejumlah penegak hukum yang integritas dan ketokohnya menjunjung tinggi penegakan hukum sudah tak diragukan lagi.

Mereka adalah Wakil Jaksa Agung Basrief Arief, JAM-Intel Mochtar Arifin, JAM-Pidum Prasetyo, JAM-Bin Helen Harprileni Subiantoro, JAM-Datun Alex Sato Byah, serta JAM-Was Achmad Lopa. Hendarman berkewajiban melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya sewaktu-waktu kepada Presiden, dan melaporkan hasilnya setiap tiga bulan, dengan menyertakan tembusan kepada para penasehat.

Kehadiran lembaga baru ini membuat peta perjalanan dan masa depan pemberantasan korupsi menjadi dua jalur. Pertama jalur JAM-Pidsus dan TimtasTipikor, kedua jalur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua lembaga pertama merupakan jalur biasa, berada di bawah kendali Pemerintah, penyidikannya boleh dihentikan, bermuara pada pengadilan umum. Sedangkan KPK berada diluar kontrol pemerintah, penyidikan kasusnya tak boleh dihentikan, dan bermuara pada Pengadilan Ad Hoc Korupsi dengan kewenangan besar.

Karena masih ada jalur lain, Hendarman menjanjikan Timnya akan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-



masing. “Dengan demikian tidak akan menyalahi kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan selaku tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005,” kata Hendarman Supandji, Jumat (6/5) kepada Kompas.

Berdasarkan kewenangan dan dukungan kuat dari “Sang Pemberi Tugas”, ia membahasakannya dengan menyebut, “diminta Presiden untuk membongkar korupsi yang gede-gede”, Hendarman segera saja bergerak cepat. Ia memburu setiap perusahaan yang, setelah diaudit BPK, di dalamnya secara konkret ada unsur kerugian negara. Kasus Bank Mandiri, dengan dugaan kerugian senilai Rp 1,3 triliun berbentuk kredit macet, misalnya. Dari 28 perusahaan yang disasar, lima sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan, dua lagi menunggu berkas dari BPK. Akan menyusul lagi kasus PLN, Tri-

Yes!”

Hendarman Supandji

Lahir: Klaten, 6 Januari 1947. **Isteri:** Dr Sri Kusumo Amdani, DSA., M.Sc., **Pendidikan:** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1972, **Tugas/Karir:** Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 1979-1981 • Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Agung, 1982-1983 • Diperbantukan di Badan Koordinasi Instruksi Presiden untuk masalah narkotika dan diperbantukan di Botasupal Bakin, 1984-1985 • Kepala seksi penanggulangan tindak pidana umum intelijen Kejaksaan Agung, 1985-1990 • Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok, 1990-1995 • Pusediklat Kejaksaan Agung, 1995-1996 • Asisten Perdata dan TUN di Kejati Palembang, 1996-1997 • Staf khusus Jaksa Agung, 1998 • Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung, 1998-2002 • Jaksa tinggi di DIY dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan sebelum dipilih menjadi JAM Pidsus April (25/4) lalu, 2002-2004, **Tulisan:** “Meningkatkan Wibawa Peradilan dalam Rangka Mengurangi Pelecehan Hukum”, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), 2000.



kungnya.

“Saya tidak mau hanya menjadi bempes. Rakyat Indonesia sudah muak dengan korupsi. Jadi, kalau saya diangkat dan dipilih memimpin tim pemberantasan korupsi ini, saya harus tahu secara pasti apa jaminan Presiden yang telah memilih kami. Saya ini tidak beban, *nothing to lose*, karena toh selama ini saya adalah orang yang tenggelam di Kejaksaan,” kata Hendarman, sebagaimana dikutip situs plaza web para tokoh Indonesia, Tokoh-Indonesia.Com. (Lihat alamat URL: WWW.TokohIndonesia.Com/H/Hendarman-Supandji).

Hendarman memang mempunyai niat yang tulus dan ingin sungguh-sungguh bekerja memikul tanggung-jawab yang diberikan. Prinsip hidup demikian sudah menjadi sifatnya selama 25 tahun menenggelamkan diri di Kejaksaan. Ia pun berani berujar langsung kepada Presiden Yudhoyono, meminta komitmen dari Presiden agar mendukungnya memberantas korupsi.

Sebagaimana dikutip TokohIndonesia.Com, dalam sebuah kesempatan dialog untuk mengetahui komitmen Presiden Yudhoyono, sekaligus untuk memperoleh kekuatan energi pemberantasan korupsi, Hendarman bertanya, “Seandainya di dalam menjalankan tugas itu, saya menemukan keterlibatan teman Bapak Presiden, sahabat Bapak, atau pembantu Bapak, apa yang akan Bapak Presiden lakukan?”

“Silakan jalan terus. Saya tidak pernah akan intervensi,” jawab Presiden singkat. Hendarman masih meneruskan, “Bapak Presiden, di dalam penegakan hukum, janganlah Bapak berstandar ganda. Bapak jangan hanya menindak mereka yang menjadi musuh-musuh Bapak, tetapi Bapak juga harus berani menindak teman, sahabat Bapak, atau saudara-saudara Bapak. Sebab, jabatan yang Bapak sandang itu tidak akan lama. Jika Bapak berstandar ganda di dalam penegakan hukum, dan bila suatu hari Bapak jatuh, pasti Bapak akan kena masalah.”

Setelah menjadi Ketua Timtas-Tipikor hampir tiap pekan kejutan demi kejutan muncul dari Hendarman. Putra dokter tentara ini rajin mengumumkan setiap tersangka baru secara terbuka, dari puluhan kasus yang ditangani. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, tahun 1972, ini adalah kunci utama atas sejumlah penyidikan korupsi.

Mantan Jaksa Tinggi Yogyakarta yang menulis buku “Meningkatkan Wibawa Peradilan dalam Rangka Mengurangi Pelecehan Hukum,” diterbitkan tahun 2000 oleh Lembaga Ketahanan Nasional, adalah penerima penghargaan sebagai “pegawai yang rajin dan jujur” dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di tahun 1970-an. Sebagai jaksa karir, Hendarman pernah menjalani penugasan di berbagai daerah dan institusi.

Indo Pos (14/5) menyebut Hendarman Supandji sebagai jaksa senior berpangkat IV/e. Dulu, sebagai Sekretaris JAM Pengawasan, ia tidak berurusan dengan penanganan perkara. Tetapi setelah menjabat JAM-Pidsus, merangkap pula Ketua TimtasTipikor, Hendarman mulai memperoleh pengawasan ekstra ketat setingkat menteri. Walau demikian sehari-hari ia tetaplah tampil sederhana, menggunakan mobil dinas berupa sedan bekas BMW seri 320i warna coklat, berpelat nomor B 2724 BS, mobil dinas eselon I Kejakagung ‘warisan’ empat JAM-Pidsus terdahulu. Mobil ini terakhir kali dipakai oleh Sudhono Iswahyudi, mantan JAM-Pidsus yang kini memasuki pensiun. Sebelumnya Hendarman malah hanya mengendarai Toyota Kijang warna hijau.

Sebagai Ketua TimtasTipikor Hendarman bekerja di Lantai II Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kemana pun pergi ia selalu mendapat pengawasan ketat dari empat petugas berseragam sipil, berasal dari kesatuan militer. Pengawal itu disiplin berjalan beriringan dengan Hendarman, mengendarai mobil Nisaan Terrano, jenis Spirit berpelat B 8728 YN. ■ (HT-ff)

saksi, BLBI, dan lain-lain.

Hendarman berniat pula membongkar kembali 26 kasus yang sudah di-SP-3-kan, yang berdasarkan pendapat umum atau *second opinion* layak dibuka kembali, seperti kasus Ginandjar Kartasasmita, misalnya. Republika (18/6), mengutip pernyataan Hendarman menulis, selama bulan Juni Timtas-Tipikor akan menyidik 10 kasus, termasuk diantaranya kasus Jamsostek dan Departemen Agama.

Siapakah Dia?

Ia mempunyai motto bertugas “Korupsi No, Berantas Yes!”. Suami dari Dr Sri Kusumo Amdani, DSA, M.Sc, kelahiran Klaten, Jawa Tengah 6 Januari 1947, ini merupakan tipe pria sederhana namun tergolong berani. Ia semakin berani memberantas korupsi setelah memperoleh kepastian besarnya komitmen Presiden Yudhoyono mendukungnya.

“Lapor Pak SBY....”, Kirim ke 9949

Istana Kepresidenan/Sekretariat Negara membangun SMS Center Presiden untuk menampung masukan, keluhan, kritik, protes, atau sekadar salam silaturahmi dari rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Presiden SBY. Kirim ke nomor 9949.

Awalnya adalah spontanitas ala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bertatap muka dengan masyarakat dalam acara pencanangan ‘Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan’ di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, pada Sabtu (12 Juni 2005).

Seorang petani melontarkan keluhan atas sikap pejabat di daerahnya, yang jarang turun ke lapangan. SBY menyatakan dirinya siap menampung segala pengaduan masyarakat lewat layanan pesan singkat atau SMS (*short message service*) ke telepon seluler (Ponsel) pribadinya. 24 jam.

“Kalau Saudara merasa tidak ada kepedulian, *handphone* dan SMS saya terbuka 24 jam,” cetus SBY, menanggapi keluhan bapak petani tadi. Dan, “Nomornya 0811109949,” sambung SBY menyebutkan 12 digit angka nomor Ponselnya, seraya menyunggingkan senyum.

Mengapa SBY membuka layanan

SMS? Dengan tulisan berjudul “SBY Buka SMS, Kabinetnya Buruk,” mengutip Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, harian WARTA KOTA (14/6) menulis bahwa Presiden SBY membuka jalur langsung (*hotline*) lewat layanan SMS ke Ponsel pribadinya karena menilai kinerja kabinetnya buruk dalam merespons persoalan yang muncul di masyarakat.

“Karena banyak laporan yang mungkin lambat sampai ke pusat, sementara rakyat ingin laporannya cepat direspons, maka dibuka SMS itu,” kata Sudi Silalahi, se usai rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (13/6).

Tapi, tunggu dulu. Spontanitas SBY rupanya tidak dibarengi sikap antisipatif pihak Sekretariat Negara. Akibatnya, belakangan diketahui, Ponsel SBY menjadi ngadat diserbu ribuan SMS. Baru sehari layanan itu dibuka, sekitar 3000-an pesan pendek menyerbu masuk.

“SBY kewalahan karena Ponselnya tidak mampu lagi menerima pesan singkat yang membludak dari masyarakat. Sejak Minggu (12/6), Ponsel Presiden *hang* atau ‘tulalit’ karena diserbu ribuan SMS yang tidak mampu lagi dibendung,” demikian harian *Media Indonesia* (14 Juni 2005) menulis dalam editorialnya: “SBY dan SMS”.

Merespons itu, Presiden langsung menggelar rapat khusus dengan sejumlah staf khusus untuk mengatasi kondisi tersebut. Pakar telekomunikasi pun dimintai masukan.

Hasilnya, sebuah layanan layanan SMS yang baru dan lebih canggih telah disediakan, menggantikan nomor Ponsel pribadi Presiden. Pihak Telkomsel selaku provider Ponsel Presiden telah menyediakan fasilitas baru bagi layanan tersebut.

“Kini siapa saja sudah bisa mengirim SMS (ke Presiden) ke nomor 9949,”

kata Kepala Divisi Telkom Flexi, Telkomsel, Dian Rahmawan, seperti dituturkan kepada harian *Sinar Harapan* (14/6).

Layanan baru ini merupakan server yang diprogram langsung ke komputer. Tidak seperti Ponsel biasa yang memiliki keterbatasan menerima memori SMS, masih kata Dian, server ini bisa menerima ribuan SMS dari seluruh Indonesia.

Isinya macam-macam

Ribuan SMS yang sempat masuk ke Ponsel SBY, seperminuman teh saja jadinya sejak layanan itu dibuka, berisi banyak dan beragam hal.

Ada berbagai informasi, mulai dari dukungan untuk memberantas korupsi, sekadar saran untuk menetapkan kebijakan, dan mengubah kebijakan. “Dari mengadukan nasib, minta sumbangan, sampai memberikan usulan-usulan tentang benda keramat,” kata Andi Mallarangeng, juru bicara Kepresidenan.

Pada berita HL-nya bertajuk “Rakyat ‘Serbu’ Ponsel Presiden,” harian *Media Indonesia* (13/6) mengutip beberapa SMS dimaksud. Salah satu isi SMS yang diterima berbunyi, “Bapak Presiden, pegawai honor dan bidan PTT di Aceh gajinya belum dibayar 6-10 bulan”.

Pesan lain berbunyi, “Bapak Presiden, tolong diperhatikan agar dalam Pilkada calon independen bisa diusulkan menjadi kepala daerah”. Malah, ada SMS berbau mistik: “Presiden diminta segera mengambil tongkat kepresidenan RI yang terpendam di dalam tanah selama puluhan tahun, demi keselamatan bangsa dan negara”.

Harian *Koran Tempo* (terbitan 14 Juni 2005) juga memuat beberapa SMS menarik dan unik karena isinya menawarkan keris kepada Presiden, “Bapak Presiden, di suatu tempat ada sebuah keris bernama Keris Naga. Kalau keris itu dimiliki, Bapak dapat meningkatkan kemampuan dalam mengatasi permasalahan bangsa ini.”

Ada lagi pesan ‘lucu’ berbunyi: “Saya mendapat mimpi, Bapak Presiden harus memiliki tongkat keramat....” Pesan senada yang berbau ‘mistis’ malah menyarankan Presiden agar melakukan ruwatan sambil memotong kambing dengan jenis tertentu.

Tapi, yang menjadi pertanyaan, sanggupkah Presiden SBY membaca ribuan, atau bahkan jutaan, SMS setiap hari? Tanda tanya turunannya: apakah ada tindak lanjut atas pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk? ■

(Anis Fuadi)



Sejumlah tokoh nasional menggelar pertemuan di kediaman Wiranto. Berbagai masalah bangsa disorot secara kritis. SBY dinilai diskriminatif memberantas korupsi.

Sejumlah tokoh nasional Rabu (22/6) lalu menggelar pertemuan di kediaman mantan Panglima ABRI Wiranto di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Mereka antara lain mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, mantan aktivis Malari Hari-man Siregar, mantan Kapolda Metro Jaya Noegroho Djajoesman, dan Ketua Fraksi PDI-P DPR Tjahyo Kumolo.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid urung datang karena pesawat yang akan ditumpangnya dari Malaysia ke Jakarta penundaan jadwal keberangkatannya. Taufik Kiemas tidak hadir karena kurang sehat. Mantan Ketua MPR Amien Rais berada di luar kota. Begitu juga mantan Presiden B.J.Habibie yang tengah berada di Jerman.

Pertemuan ini mendapat liputan luas dari media massa, cetak dan elektronik. *Media Indonesia* (23/6) mencatat, pertemuan itu adalah kali kedua digelar. Pertemuan pertama di kediaman Try Sutrisno, di Jl. Purwakarta No.6 Jakarta Pusat, awal Juni lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Hadir, antara lain, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Taufik Kiemas, Akbar Tandjung, Wiranto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirdja.

Tuan rumah, Wiranto, mengatakan pertemuan membicarakan berbagai masalah bangsa saat ini. "Sekarang tujuannya berkumpul untuk menyamakan visi, misi dan persepsi dalam menyikapi masalah bangsa. Misalnya soal bencana, kesehatan masyarakat, korupsi dan BBM," ujar mantan calon Presiden pada Pilpres 2004 lalu.

Wiranto, seperti dikutip *Suara Pembaruan* (23/6), menyangkal bahwa pertemuan itu untuk membangun ke-

Sinyal Datang dari Bambu Apus

kuatan oposisi. "Tidak ada maksud negatif apalagi sampai membangun suatu oposisi," tegasnya. Pertemuan ini baru sebatas curah pendapat antartokoh yang hadir, sehingga hasilnya dapat disampaikan ke komunitas masing-masing tokoh.

Menanggapi penilaian bahwa forum itu sarana mengkritisi Pemerintahan SBY, mantan Panglima ABRI di Era Pak Harto mengingatkan, mengkritisi persoalan dalam koridor demokrasi bukan sebuah masalah.

"*Kan* mengkritisi dalam koridor demokrasi tidak apa-apa. Ini tidak mengkritisi, tapi lebih luas lagi yakni mengajak seluruh kekuatan bangsa melalui keberadaan tokoh-tokoh ini untuk bersatu kembali," jelasnya.

SBY diskriminatif

Hariman Siregar, seperti ditulis *Bisnis Indonesia* (23/6), menjelaskan banyak hal yang dibicarakan dalam forum, termasuk soal pemberantasan korupsi. "Dalam soal korupsi kita minta jangan ada diskriminasi. Misalnya dalam kasus KPU, ada menteri yang dilindungi oleh presiden dan tidak ditangkap", ujarnya.

Hariman menuding Presiden Yudhoyono melakukan tindakan *like and dislike* dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan melindungi menteri dan Wapres dari jeratan pengadilan.

"Kami mendesak jangan ada *like and dislike*. Masak Ketua KPU ditangkap, tapi menteri tidak ditangkap... Seharusnya ditangkap semua!" ujarnya.

Dia menunjuk kasus Bank Mandiri. "Masak Wapres dan menteri belum diperiksa, tapi sudah dinyatakan tidak bersalah. Ini menunjukkan adanya diskriminasi."



Satukan Barisan — Sejumlah tokoh nasional (dari kiri), mantan Panglima TNI Wiranto, mantan Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, dan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Rabu (22/6). Pertemuan rutin...

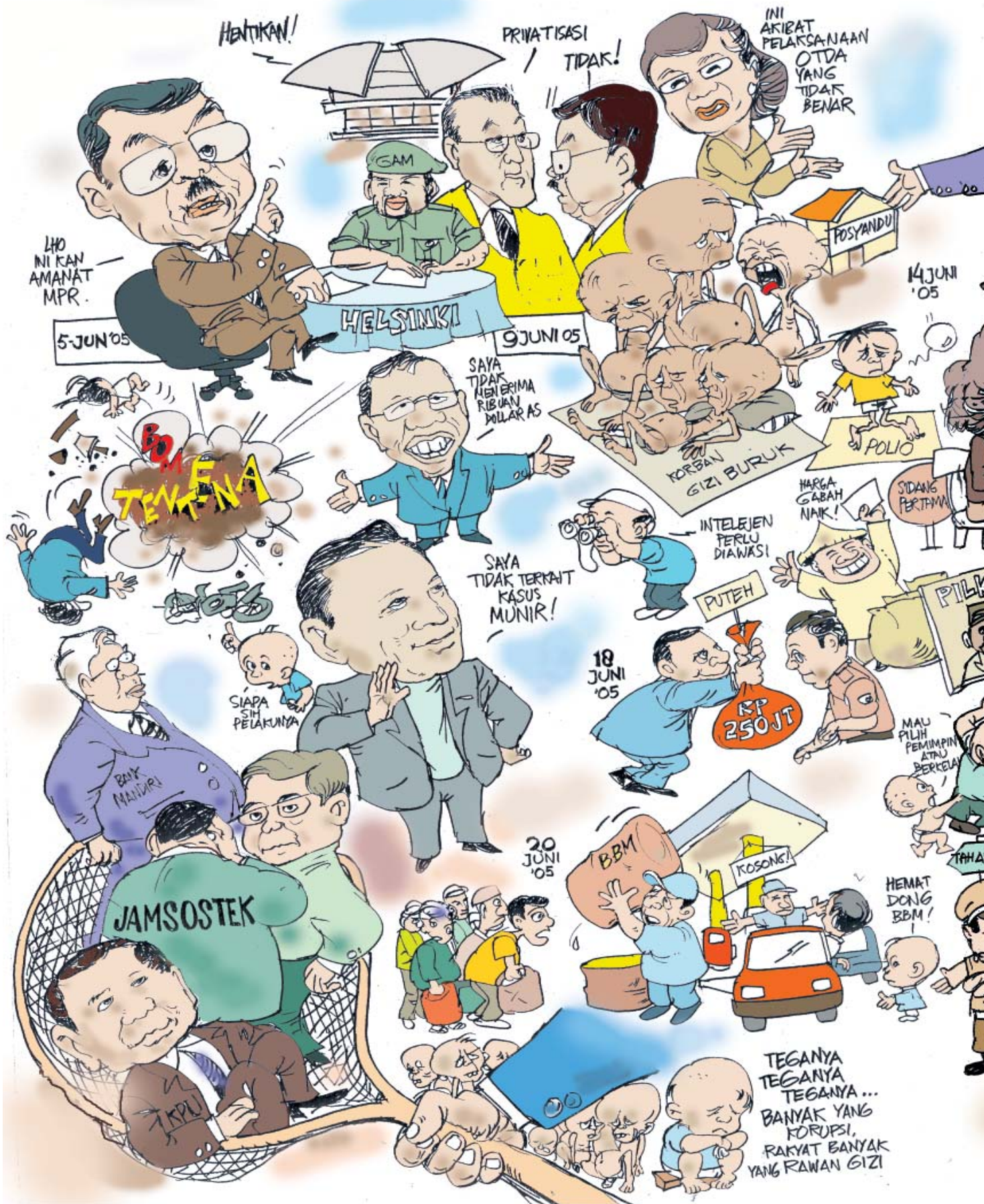
Pengamat politik, Sukardi Rinakit menilai serial pertemuan antartokoh ini mempunyai dua agenda utama: memperluas spektrum agenda rekonsiliasi nasional yang sampai kini belum tuntas dan masih terbengkalai, sembari mengkritisi pemerintahan SBY.

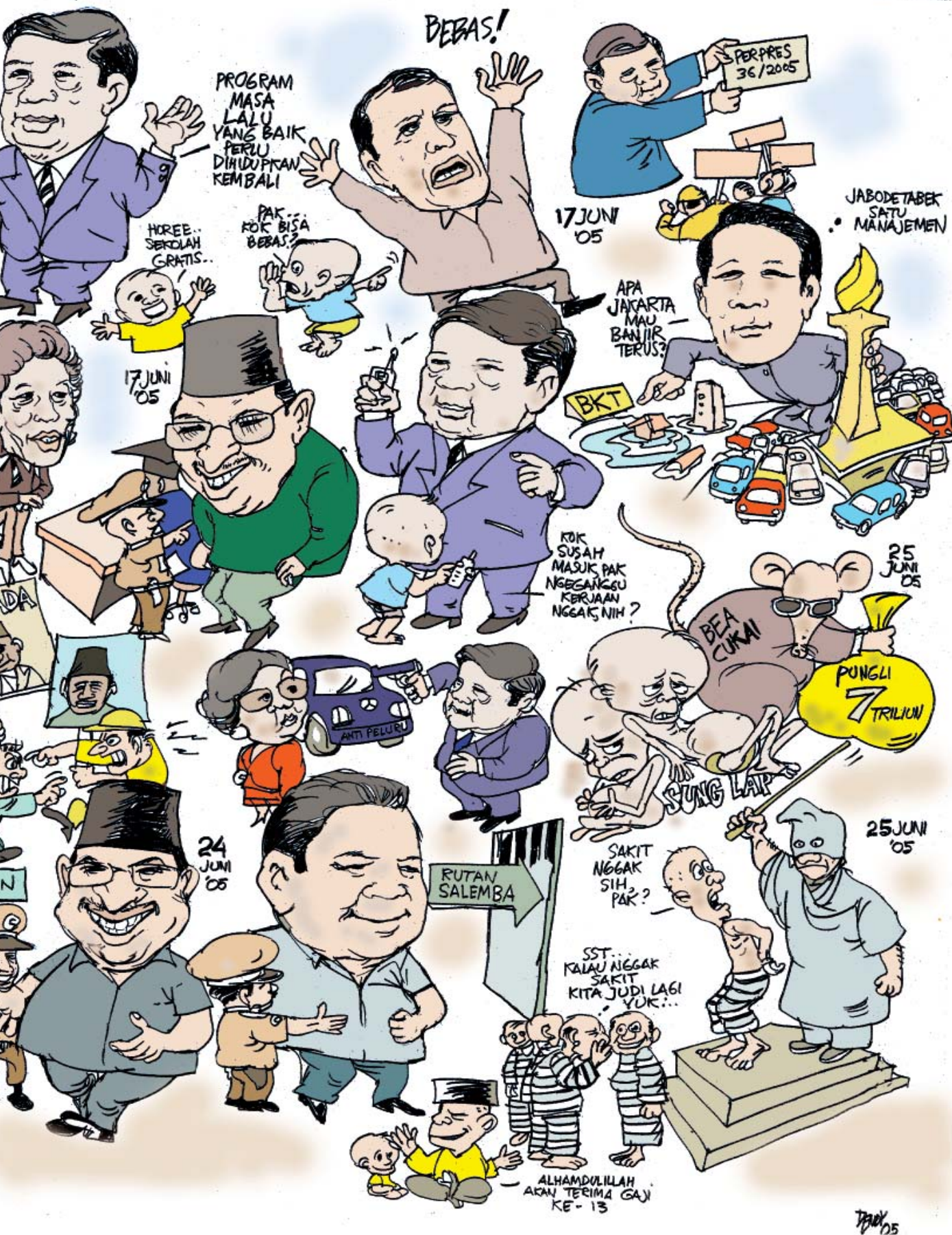
"Nah kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang politik ini agaknya ingin mendorong proses rekonsiliasi tersebut".

Di sisi lain, cetus Direktur Eksekutif Soengeng Sarjadi Syndicated itu, para tokoh juga mengkritisi pemerintahan SBY, khususnya sejak parlemen secara *"de facto"* 'dikuasai' pemerintah.

Dalam hemat Sukardi, kelompok ini mengkritik manuver Wapres Jusuf Kalla, misalnya, dalam perundingan informal RI dengan GAM atau tendensinya pada nasionalisme ekonomi, sebagai sesuatu yang memprihatinkan. "Jadi sasarannya sesungguhnya bukan SBY. Hanya, mereka ingin SBY lebih *firm in action* dan 'mengunci' Jusuf Kalla", paparnya.

Rencananya, pertemuan lanjutan akan dilangsungkan bulan Agustus mendatang di kediaman Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan dengan komposisi peserta masih terbatas seperti saat ini. ■ (SP-AF)





Masjid Rahmatan Lil' MONUMEN

Oleh Ch Robin Simanullang

Ma'had Al-Zaytun (MAZ) benar-benar merubah paradigma berpikir khalayak ramai dari anggapan bahwa pesantren itu kumuh menjadi pesantren itu bersih, megah, gagah dan modern. Segagah sejarah pesantren yang mampu bertahan melintasi berbagai tantangan dari sejak beberapa abad lalu hingga kini.

Semua bangunan gedung di ma'had modern komprehensif ini bukan hanya bersih, megah dan gagah untuk sesaat, melainkan dibangun berdaya tahan lebih lima ratusan tahun bahkan bisa puluhan abad, setara bangunan-bangunan monumental di dunia, yang sudah mengukir sejarah pada zamannya. Terutama bangunan Masjid Rahmatan lil 'Alamin yang merupakan induk dari semua karya besar yang monumental di ma'had ini, yang kelak diyakini akan diukir sejarah sebagai simbol kebesaran dan kebangkitan bangsa ini.

Gaya arsitekturnya pun merupakan perpaduan menyeluruh dari semua gaya arsitektur yang ada di dunia ini. Gaya arsitektur bernilai estetika universal, yang di ma'had ini disebut sebagai gaya arsitektur *rahmatan lil 'alamin*.

Pendek kata, MAZ yang semua bangunan dan kegiatannya berpusat pada Masjid Rahmatan lil 'Alamin, dibangun sebagai sebuah kawasan pendidikan terpadu yang monumental dalam abad 21 ini. Hingga kelak, sampai berabad-abad ke depan, MAZ akan dicatat sejarah menjadi sebuah monumen fenomenal milenium ketiga.

Diyakini, kelak, bagi generasi berikutnya, monumen ini akan bernilai sejarah setara dengan bangunan-ba-

ngunan monumental dunia yang sudah tercatat dalam sejarah zamannya masing-masing. Seperti, bangunan monumental Islam kompleks Masjid Cordoba, Istana Al-Hamra dan Medinat az-Zahra di Spanyol. Juga bangunan-bangunan monumental Romawi, Mesir, Dinasti Cina klasik, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang bersejarah dan mampu bertahan ratusan sampai ribuan tahun.

Setiap bangunan yang didirikan di MAZ, diprogram harus memenuhi persyaratan pokok yakni berdaya tahan lama, aman untuk difungsikan sesuai hajat ma'had. Setiap bangunan itu harus

Monumen bernilai sejarah setara Masjid Cordoba.

cukup kuat dan berkemampuan memikul pembebanan yang terjadi baik pembebanan vertikal maupun horizontal dalam jangka waktu lama. Kekuatan itu dirancang dengan penggunaan kekuatan elemen-elemen (material) konstruksi berkualitas dan proses pengerjaan yang telaten dan cerdas.

Dalam hal sistem kontrol mutu bangunan dilakukan dengan sistem pengendalian sumber daya yang disebut BMW, singkatan dari biaya, mutu dan waktu. Semua dikontrol sejak awal, baik mutu manusia, mutu bahan bangunan maupun mutu peralatan bangunannya.

Salah satu hal yang amat menarik dalam proses dan sistem pembangunan di Ma'had Al-Zaytun, semua dilakukan

Alamin

MILENIUM KETIGA



Grand architect MAZ,
Syaykh al-Ma'had AS
Panji Gumilang

**Memompakan
spirit yang
lebih besar
serta
meresapkan
sentuhan-
sentuhan
keindahan
karya-karya
besar
arsitektur
klasik.**

oleh tenaga profesional ma'had sendiri yang teruji handal dan memegang prinsip ibadah, akhlak dan amanah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan berada dalam satu manajemen internal yang terpadu dan terkendali tanpa batas waktu, 24 jam setiap harinya.

Dengan manajemen pembangunan seperti ini, bukan saja kualitas bangunannya yang bisa dijamin, juga soal pembiayaannya yang jauh lebih rendah, 1 : 3. Artinya, pembiayaannya hanya 1/3 dari biaya jika dikerjakan secara konvensional. Maklum, di MAZ ini selain tidak ada birokrasi yang panjang dan berbelit, juga dijamin tidak ada korupsi.

Sistem manajemen dan proses pembangunan di MAZ ini tidaklah asal ada dan asal jadi. Sejak awal Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) telah merencanakannya sedemikian matang. Kemudian dibentuk tim pelaksana pembangunan pada pertengahan Mei 1995. Tim pembangunan itu menerima amanah untuk bertugas dan bertanggung jawab mewujudkan bangunan-bangunan yang dihajatkan sebagaimana telah direncanakan dalam bentuk master plan Ma'had Al-Zaytun. Master plan itu ditetapkan bersama di bawah pimpinan Syaykh al-Ma'had AS Panji Gumilang, selaku *grand architect*-nya.

Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, untuk memperkuat perencanaan, termasuk bidang arsitektur, Tim Ma'had Al-Zaytun yang langsung dipimpin oleh Syaykh al-Ma'had AS Panji Gumilang, dengan anggota tim M Natsir Abdul Qadir, M Yusuf Rasyidi dan Ir Bambang Abdul Syukur, melakukan studi banding ke Eropa, khususnya ke Andalusia. Studi banding ini, selain menyangkut hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan pada umumnya, juga secara khusus menelusuri lengkung-lengkung arsitektur dunia yang mengundang kekaguman umat manusia sampai ratusan tahun.

Kunjungan itu telah pula memperluas wawasan dan memompakan spirit yang lebih besar serta meresapkan sentuhan-sentuhan keindahan karya-karya besar arsitektur klasik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ma'had ini. Semua masukan itu memberi kekayaan ide arsitektur bernilai karsa dan estetika tinggi dan universal dalam rancang bangun gedung-gedung di Ma'had Al-Zaytun, terutama rancang bangun Masjid Rahmatan Lil' Alamin.

Maka jika mengamati seluruh konstruksi dan arsitektur bangunan di



ma'had ini, terutama rancang bangun dan arsitektur Masjid Rahmatan Lil' Alamin, tak berlebihan bila perencanaan dan arsitek di MAZ ini dapat disejajarkan dengan arsitek Abbasiyah yang membangun kompleks Masjid Cordoba, Istana Al-Hamra dan Medinat az-Zahra di Spanyol. Atau Salman al-Farisi yang merancang pembuatan khandaq (parit) yang mengelilingi kota Madinah.

Sebagaimana karya arsitek Abbasiyah dan Salman al-Farisi yang dicatat dalam sejarah zamannya masing-masing, begitu pula karya tim perancang pembangunan MAZ ini kelak pantas dicatat sejarah zamannya yang membangun bangunan-bangunan monumental yang kelak menjadi bukti sejarah kebangkitan Islam dan kebangkitan bangsa ini.

Masjid Rahmatan Lil' Alamin

Masjid adalah inti dan pusat kegiatan seluruh penghuni Ma'had Al-Zaytun (MAZ). Di kampus ini santri dilatih dan dibiasakan hidup beribadah, melaksanakan salat baik itu Isya, Su-



DOMES: Bangunan dome (kubah) masjid (dari dalam) yang akan dilapisi bahan seperti emas, bermakna aga rbangsa Indonesia berkualitas emas.

buh, Zuhur, Asar dan Magrib secara berjamaah, sekaligus berdisiplin dalam tradisi kepesantrenan, namun hidup dalam suasana dan manajemen modern.

Untuk itu pertama kali dibangun Masjid Al-Hayat, sebagai masjid persiapan I'dadi, di atas tanah seluas 5.000 m² berlantai tiga berdaya tampung kurang lebih 7.000 jamaah. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada 1 Januari 1999 dan pengerjaannya selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Kemudian, sehubungan pesatnya pertambahan jumlah santri dan penghuni MAZ menyebabkan Masjid Al-Hayat sudah tidak mampu lagi menampung jamaah, baik pada hari-hari biasa maupun Jumat.

Sehingga MAZ harus secepatnya membangun sebuah masjid besar yang diberi nama Masjid Rahmatan Lil'Alamin. Masjid ini berdiri di atas tanah 6,5 hektar, berukuran seluas 99 x 99 m berlantai 6 (enam), yang dapat menampung 150.000 jamaah. Sebuah masjid terbesar di dunia. Masjid yang tengah dibangun ini memerlukan biaya kurang

lebih 14 juta dollar Amerika atau sekitar Rp 135 milyar. Setelah Masjid Rahmatan Lil'Alamin digunakan, bangunan Al-Hayat akan difungsikan menjadi perpustakaan MAZ.

Peletakan batu dasar masjid Rahmatan Lil'Alamin dilakukan pada tahun baru Hijriah 1 Muharam 1421 H oleh R Nuriana, Gubernur Jawa Barat saat itu. Pembangunan masjid ini boleh dibilang merupakan satu tonggak sejarah pembangunan sebuah simbol dan monumen kebesaran umat Islam di negeri ini. Di samping memiliki areal yang luas dengan daya tampung yang besar, Masjid Rahmatan Lil'Alamin, juga mempunyai seni artistik yang tinggi, ditambah dengan dom (kubah) yang besar yang dilapisi bahan seperti emas yang maknanya agar Indonesia dapat tampil berkualitas emas.

Suasana saat berlangsungnya pelaksanaan acara peletakan batu dasar tersebut begitu meriah. Selain Gubernur

Jawa Barat turut hadir pula seluruh Kepala Daerah Tingkat dua yang ada di Jawa Barat, juga kelompok-kelompok pengajian yang datang dari berbagai penjuru Indonesia dan para undangan dari dalam negeri serta dari negeri jiran Singapura dan Malaysia, ditambah ribuan masyarakat yang ingin berpartisipasi bersodaqoh untuk pembangunan masjid Rahmatan Lil'Alamin.

Kemudian, peletakan batu pertama masjid Rahmatan Lil'Alamin ini dilangsungkan setelah masa 100 hari sejak dimulainya perletakan batu dasar. Bermakna bahwa selama 100 hari setiap tamu yang berkunjung ke MAZ diperkenankan untuk ikut andil meletakkan batu dasarnya.

Sebagai simbol keberadaan umat Islam, sudah barang tentu apabila pembangunan sebuah masjid menggambarkan nilai-nilai keimanan dan ajaran-ajaran Islam itu sendiri, sebagaimana diuraikan oleh Syaykh al-Ma'had Dr Abdussalam Panji Gumilang dalam penjelasannya mengenai filosofi pembangunan masjid Rahmatan Lil'Alamin.

Luas bangunan 99 x 99 m merupakan filosofi dari sifat-sifat Allah (*Asmaul Husna*) yang berjumlah 99. Bila diputar ke arah mana saja, angka ini tidak akan pernah berubah, bermakna selalu punya nilai yang sama yaitu 99. Sedangkan, filosofi enam lantai masjid adalah *Arkanul Iman*, rukun iman yang berjumlah enam. Keenam lantai tersebut secara keseluruhan mempunyai ketinggian 33 m yang mempunyai filosofi jumlah tasbeih, tahmid dan takbir setelah salat. Tinggi tiang masing-masing lantai lima meter, ini mempunyai filosofi *Arkanul Islam*, rukun Islam yang berjumlah lima.

Selain memiliki kubah yang besar masjid Rahmatan Lil'Alamin juga dilengkapi dengan kubah yang kecil sebanyak empat buah. Filosofinya sebagai perwujudan bahwa Indonesia mengenal berbagai madzhab. Juga mempunyai menara yang tingginya 68 m, dengan luas lantainya 24x 24 m, ini filosofinya

adalah *Al-Khulafa al-Rasyidun*. Pada kesempatan peletakan dasar itu juga bagi seluruh undangan baik itu kelompok ataupun perorangan yang ingin bersodaqoh, diminta tampil ke atas panggung dengan menyebutkan berapa banyak jumlah yang ingin disodaqohkan baik itu berupa uang ataupun semen. Setelah itu, mereka semua ikut berpartisipasi dalam peletakan batu

Masjid berkapasitas 150 ribu jamaah, terbesar di dunia.



MONUMENTAL: Pasukan kuning tengah mengecor kubah Masjid Rahmatan lil' Alamin. Bangunan masjid monumental di atas tanah 6,5 hektar, berkonstruksi baja dengan ukuran luas 99 x 99 meter berlantai enam. Masjid terbesar di dunia dengan kapasitas 150.000 jamaah. Masjid ini adalah induk dari semua karya besar monumental di MAZ, yang diyakini akan diukir sejarah sebagai simbol kebesaran dan kebangkitan bangsa Indonesia, sebagai bangsa berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Dasar. Dari sodoqoh para undangan tersebut diperoleh dana yang besarnya puluhan milyar rupiah bahkan hampir mendekati jumlah dana yang dianggarkan yaitu sebesar 14 juta dolar AS (Rp 135 milyar).

Dimulai dari Jakarta yang menamakan kelompok pengajian Falatehan Jayakarta bersodoqoh 3.000 tiang, atau sebesar 30 milyar rupiah. Kemudian kelompok pengajian Parahiyangan Bandung bersodoqoh 1.000 tiang, atau sebesar 10 milyar rupiah. Kelompok Ronggo Warsito Jawa Tengah bersodoqoh sebesar 10 milyar rupiah. Kelompok pengajian Tombo Ati Jawa Timur bersodoqoh sebesar 10 milyar rupiah. Kelompok Pengajian Sunan Gunung Jati Cirebon bersodoqoh sebesar 2,5 milyar rupiah, Malaysia RM 12.000 atau sebesar 3,5 milyar.

Kemudian, kelompok pengajian Lancang Kuning Riau bersodoqoh sebesar 30 juta rupiah. Kelompok pengajian asal Lampung 50 juta rupiah, kelompok pengajian Bali 20 juta rupiah, dan kelompok pengajian Sumatera

Barat 20 juta rupiah. Kelompok pengajian Sumatera Selatan 50 juta rupiah. Kelompok pengajian Kalimantan Timur 20 juta rupiah.

Kelompok pengajian Timor Lorosae 10 juta rupiah, dan kelompok pengajian NTB 30 juta rupiah. Kelompok Pengajian Jambi 20 juta rupiah. Wali santri asal Kalimantan Selatan 300 sak semen. Kelompok pengajian Bengkulu 26 juta rupiah. Kelompok pengajian Kalimantan Barat 20 juta rupiah. Eksponen yayasan 250 tiang atau sebesar 2,5 milyar. Keluarga Bapak Salim 120 juta, dan masih banyak lagi yang kesemuanya ini tentunya merupakan perwujudan kebesaran dan kesatuan umat Islam.

Arsitektur Dunia

Pelaksanaan pembangunan masjid ini dilakukan dengan telaten. Untuk sistem pondasi, misalnya, dibuat dengan sistem pondasi kapal. "Sebenarnya, nama resminya *raft foundation* atau pondasi rakit. Namun, kalau rakit maknanya kecil maka kami sempurna-

kan menjadi pondasi kapal,” jelas Ir Djamal M Abdat, Pimpinan Tanmiyah MAZ.

Sementara, untuk menyempurnakan desain Masjid Rahmatan Lil’ Alamin, Syaykh al-Ma’had, langsung memimpin tim beranggota M Natsir Abdul Qadir, M Yusuf Rasyidi dan Ir Bambang T Abdul Syukur, pada akhir Oktober melakukan perjalanan ke Spanyol untuk melihat secara langsung model arsitektur di Al-Hambra, Cordoba yang terkenal itu. Kemudian ke Mesir, untuk melihat model bangunan arsitektur masjid-masjid bersejarah yang punya nilai arsitektur yang tinggi.

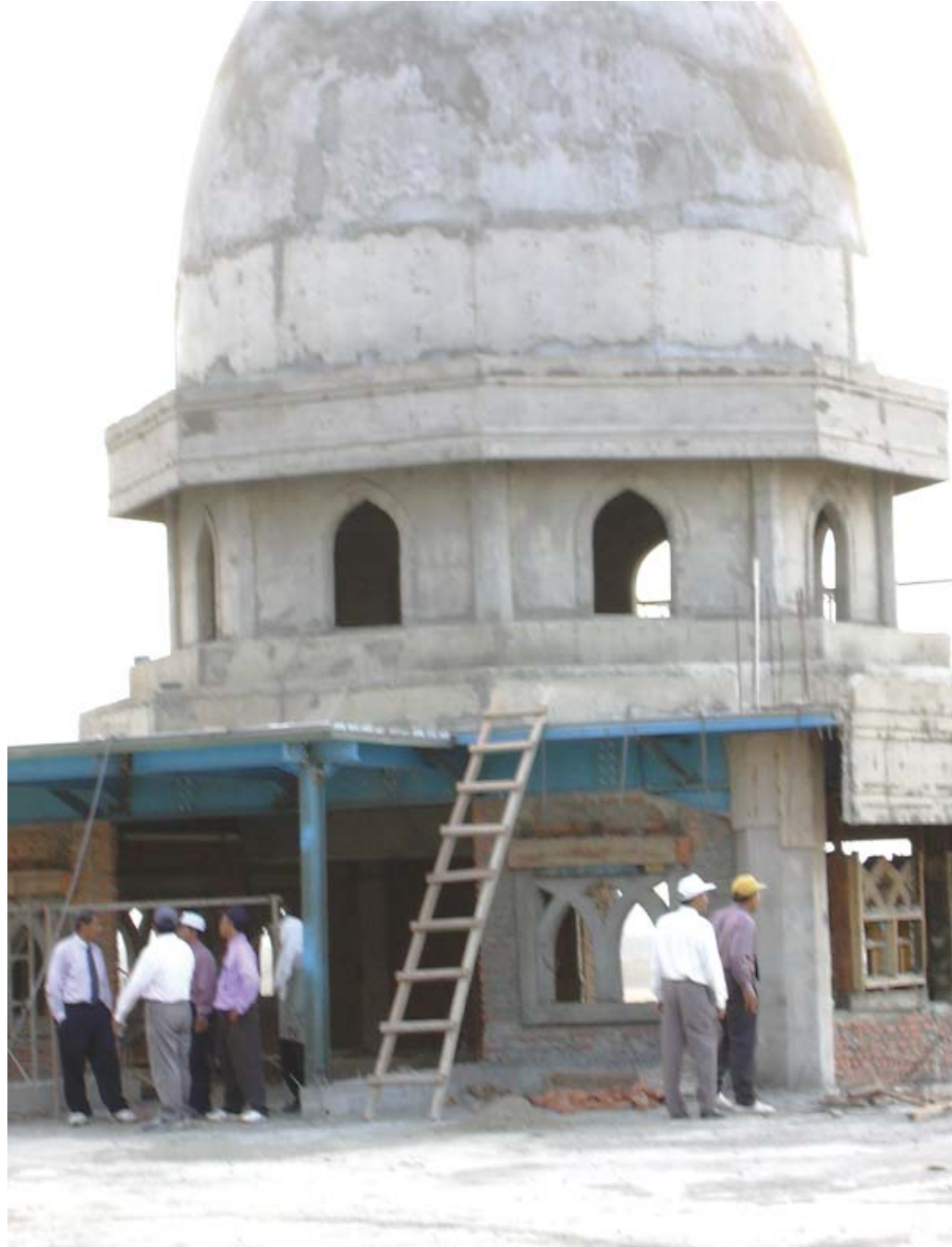
Dalam aplikasi gaya arsitektur, semuanya dipertimbangkan secara matang. Gaya itu harus punya nilai estetika universal, tidak cenderung kepada suatu etnik lokal atau antipati terhadap nilai-nilai estetika tertentu. Syaykh al-Ma’had selalu berpesan, tidak ada dikotomi arsitektur Islam, *gothic* atau tradisional.

Arsitektur Masjid Rahmatan Lil’ Alamin dibuat dengan memadukan model arsitektur di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena Masjid Rahmatan Lil’Alamin akan menjadi sebuah masjid monumental karya umat Islam di abad 21 ini akan menjadi rahmat bagi semua orang. Gaya arsitekturnya merupakan perpaduan menyeluruh dari semua gaya arsitektur yang ada di dunia ini.

Bahkan, rencananya masjid ini akan dilapisi oleh granit, mulai seluruh lantai dan dindingnya. “Untuk keperluan ini tak kurang dari 70.000 meter persegi granit yang dibutuhkan”, jelas Syaykh al-Ma’had. Dan sesuai dengan namanya Rahmatan Lil’Alamin, masjid yang akan menebar rahmat, menebar kasih hingga akan tercipta hubungan silaturahmi yang tidak ada putus-putusnya.

Sepenggal Pengalaman Pekerja

Barangkali menarik dikisahkan sepenggal pengalaman para pekerja kontruksi yang terlibat dalam pembangunan Masjid Rahmatan Lil’Alamin ini. Terutama mereka yang bekerja di ketinggian ketika merangkai kerangka lengkung struktur pembentuk kubah besar masjid ini. Bekerja di ketinggian bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sembarang orang. Orang yang takut ketinggian jangan harap bisa melakukannya. Selain itu, mereka harus memiliki ketahanan mental dan fisik, sebab pada ketinggian 40 meter ke atas, angin berhembus lebih kencang daripada di daratan. “Di ketinggian 15 meter saja angin sudah kencang,” kata salah seorang karyawan MAZ sub unit *erection*.



KUBAH KECIL: Mengelilingi kubah besar dibangun empat kubah lebih kecil.

Sekadar pembandingan, memanjat sebuah *tower* transmisi listrik saja sudah memerlukan tenaga besar. Sampai di atas bukan tujuan akhir melainkan hanya sebuah langkah awal. Di ketinggian itu mereka mesti melakukan pekerjaan spesifik yang terkadang dilakukan sambil berdiri di atas sebatang besi kerangka. Begitu pula dalam proses ereksi kerangka bangunan yang di MAZ seluruhnya menggunakan baja WF. Terkadang seorang petugas mesti bergelayutan di rangka-rangka baja yang sedang dikerek *tower crane*.

Pemandangan menegangkan begitu terasa ketika para petugas sub unit *erection* tengah merangkai kerangka-kerangka lengkung struktur pembentuk kubah besar mesjid ini. Bayangkan mereka harus bergelayutan dan memanjat baja WF lengkung sepanjang 24

m di atas ketinggian 80 m untuk menyambung belalai-belalai WF pembentuk kubah besar itu. Atau ketika harus mengencangkan baut-baut perangkai dan kemudian mengelasnya.

Menurut A Daud yang sejak awal menjadi komandan unit pabrikasi, setiap pekerja di unitnya dituntut mampu mengelas, sebab semua rangkaian konstruksi baja, selain diikat dengan baut mesti diperkuat dengan sambungan las. Pada saat-saat seperti ini keseimbangan tubuh menjadi vital. Salah, tak seimbang atau grogi, nyawa menjadi taruhannya. Bagi orang yang takut ketinggian, jangankan untuk merangkai struktur baja yang beratnya berton-ton, berdiri di sebatang WF saja pasti sudah gemetar. Terlalu lama, keringat dingin bisa mengucur.

Tak salah jika para pekerja spesialis



MAKET: Masjid Rahmatan Lil' Alamin dalam gambar maket.

GRANIT: Masjid Rahmatan Lil' Alamin telah berdiri kukuh. Memasuki tahap pembangunan interior. Arsitekturnya merupakan perpaduan model arsitektur dunia dan akan dilapisi granit tak kurang dari 70.000 meter persegi.

perangkai konstruksi baja merupakan para pekerja yang betul-betul sudah teruji. Sebagai contoh, di sub unit *erection* MAZ, seseorang yang diperkenankan bekerja di ketinggian telah melalui proses seleksi alam. Pertama sekali jika mampu bekerja merangkai baja hingga satu lantai, ditingkatkan hingga dua lantai. Begitu seterusnya. Menurut salah seorang karyawan unit ini, suatu ketika salah seorang rekan berkeringat dingin, padahal baru di ketinggian dua lantai. Komandan unit yang bijaksana akhirnya memutuskan rekan tersebut tak lagi bertugas di ketinggian.

Keputusan seperti itu menjadi bagian terpenting dalam proses pekerjaan konstruksi. Bagaimanapun, keselamatan kerja tak boleh terabaikan. Terkadang kelalaian kecil berakibat besar. Satu baut kendur, terkadang harus dibayar dengan kecelakaan kerja. Jelas, hal-hal seperti itu mesti diantisipasi dengan sebuah sistem. Maka, sebelum memulai pekerjaan setiap komandan sub unit tak boleh alpa mencek kesiapan personil dan peralatan kerja yang digunakan mengingat wilayah kerja unit ini berisiko tinggi.

Setelah melihat keanggunan dan keagungan masjid ini, meski belum rampung seluruhnya, hasil jerih payah para pekerja itu terasa menjadi suatu

kebanggaan dan kehormatan yang nilainya lebih besar dari jerih payah dan segala risiko yang mereka hadapi itu.

Masjid ini adalah sebuah karya besar yang patut dicatat sebagai simbol kebangkitan bangsa ini. Bahkan lebih dari itu, sebagai simbol pengagungan dan ketakwaan manusia kepada Allah.

Kini (Juni 2005), kendati belum rampung, masjid yang direncanakan mampu menampung 150 ribu jamaah itu telah digunakan dalam berbagai acara besar, seperti Idul Fitri, Idul Adha, peringatan 1 Muharram dan acara-acara besar lainnya. Dalam acara-acara itu pulalah dilakukan penggalangan dana untuk pem-

bangunan Masjid Rahmatan Lil' Alamin dari jamaah yang hadir.

Simbol pengagungan dan ketakwaan manusia kepada Allah.

Master Plan dan Sistem Manajemen

Semua proses pembangunan prasarana dan sarana di Al-Zaytun bermula dan berpedoman pada master plan yang telah ditetapkan bersama di bawah pimpinan Syaykh al-Ma'had. Kebersamaan atau *team work* adalah hal yang menonjol dan mutlak di ma'had ini. *Team work* yang taat pada suatu sistem dengan segala pranatanya mulai dari yang tertinggi sampai terendah.

Semua eksponen, termasuk karyawan pembangunan, sangat menyadari dan memahami bahwa keberadaannya dalam suatu tim kerja adalah untuk ibadah kepada Allah, dan sepatutnya *berakhlakul karimah* baik kepada pimpinan, sahabat, bawahan maupun juga terhadap material dan peralatan pembangunan serta terhadap waktu. Di bawah pimpinan Syaykh al-Ma'had, yang bijak dan kebapakan, setiap eksponen memahami fungsi dirinya masing-masing dalam tugas dan tanggung jawabnya terhadap amanah yang diberikan kepadanya.

Sistem manajemen yang diterapkan di MAZ ini tidak sekadar sistem manajemen modern yang sudah teruji ampuh di tempat lain, melainkan lebih daripada itu, sistem manajemen yang dinaungi dan dibekali kedalaman iman dan takwa. Sistem manajemen yang berpegang pada ibadah, akhlak dan amanah. Manajemen *Ilahiyah* yang bermakna manajemen tauhid atau manajemen terpadu dalam satu kesatuan sistem. Tahapan-tahapan pembangunan proyek mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan berada dalam satu manajemen terpadu dan terkendali.





KERANGKA: Santri berpose di bawah kerangka kubah Masjid Rahmatan lil' Alamin.

Dalam sistem manajemen demikian itu, Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) sebagai induk organisasi Ma'had Al-Zaytun, pertama kali membentuk tim pelaksana pembangunan pada pertengahan Mei 1995. Tim inilah sebagai penerima amanah yang bertugas dan bertanggung jawab mewujudkan bangunan-bangunan yang direncanakan dalam master plan Ma'had Al-Zaytun yang telah ditetapkan bersama di bawah pimpinan Syaikh al-Ma'had.

Kemudian dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan yang disebut sebagai *Tim Tanmiyah*. *Tim Tanmiyah* ini dipimpin oleh seorang ahli beranggotakan delapan tim pembangunan, terdiri dari arsitek, teknik sipil, mekanik dan kelistrikan serta dilengkapi beberapa penanggung jawab kepersonaliaan. Sementara untuk pelaksana di lapangan ditunjuk beberapa insinyur muda, mendukung tim inti yang juga turun ke lapangan sesuai kebutuhannya.

Tim Tanmiyah ini bekerja secara terpadu dan terkendali selama 24 jam setiap hari, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan. Dengan sistem manajemen terpadu 24 jam, maka setiap instruksi tertangani secara cepat dan tepat. Selama 24 jam para karyawan mencurahkan tenaga mereka untuk menyempurnakan azam umat: sesuai maklumat Ma'had Al-Zaytun membangun monumen umat Islam yang akan dihadiahkan untuk umat Islam sedunia.

Pertama kali, Ir Djamal M Abdat,

ditetapkan sebagai Rois 'am *Tim Tanmiyah*, Ir Djamal M Abdat sebagai pemimpin tim dan dianggotai oleh Ir Asrur Rifa, Ir Bambang A.Syukur, Ir Abdurrahman, Ir A Hanif dan Ir Armand AR dilengkapi personalia terdiri dari Abbas Ali Nasution selaku koordinator bersama Usman Azhari dan Rahmat Ramadhan.

Tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam tim pembangunan ini mengerjakan sendiri semua pekerjaan. Sejak awal antara konsultan dan kontraktor dibuat menyatu. Tidak dikenal *main contractor* dan *sub contractor*. Dengan sistem manajemen pembangunan seperti itu, banyak mata rantai yang diputus, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang yang tidak seharusnya dibelanjakan. Semuanya dikerjakan sendiri. Keperluan besi, misalnya, yang dibeli bahan baku, lalu dipabrikasi sendiri, di-*erection* sendiri.

Sistem seperti ini terbukti mempunyai banyak keunggulan dan keuntungan dibandingkan dengan sistem proyek pembangunan yang lazim di luar MAZ. Selain untuk menghemat biaya juga menjaga mutu. Untuk setiap bangunan, biayanya hanya sepertiga dari biaya bangunan jika itu dikerjakan oleh kontraktor luar.

Juga unggul dari segi efisiensi waktu. Contohnya, ketika merencanakan Masjid Al-Hayat hanya membutuhkan waktu satu pekan, pelaksanaan pembangunannya pun hanya 100 hari. Bandingkan dengan kebiasaan di tem-

pat lain, untuk perencanaan bangunan saja paling tidak membutuhkan waktu dua kali dari lama pelaksanaan pembangunan bangunan itu sendiri.

Dengan penghematan itu, dana bisa dipergunakan untuk membeli bahan-bahan material yang berkualitas. Dalam hal ini, *tanmiyah* sangat selektif memilih bahan material. Sebagaimana dijelaskan oleh Djamal M Abdat, Rois 'am *Tanmiyah*, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fisik secara keseluruhan, bahwa pihaknya tidak mau menggunakan bahan yang tidak berkualitas.

Dalam hal pengadaan material pun selalu dibeli dalam partai besar, sehingga biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih murah. Biasanya, pembelian tidak hanya untuk kebutuhan satu proyek bangunan. Sebab pembangunan di ma'had ini terus berlanjut sampai kebutuhannya tercakup. Maka, tatkala membeli besi atau baja, atau material jenis lain, tidak pernah khawatir akan terbuang, pasti dimanfaatkan.

Selain itu, yang juga membuat murah, semua bahan-bahan dibeli dalam bentuk bahan baku. Bahan baku atau bahan mentah itu kemudian diolah kembali oleh karyawan-karyawan ma'had yang memang sudah berpengalaman. Besi dan baja dipabrikasi sendiri, lalu *erection* juga dilakukan sendiri. Begitu pula untuk bahan-bahan perkayuan. Semua komponen bangunan seperti daun pintu, kusen, furniture



Mewujudkan bangunan-bangunan yang dihayatkan sebagaimana telah direncanakan dalam bentuk master plan Ma'had Al-Zaytun.

dan khususnya isi bangunan (meja, kursi, papan tulis dan partisi) dikerjakan sendiri.

Dengan sistem manajemen seperti itu, setiap bangunan yang didirikan di MAZ memenuhi persyaratan pokok berdaya tahan lama. Setiap bangunan itu harus cukup kuat dan berkemampuan memikul beban dalam jangka waktu lama. Kekuatan itu dirancang dengan penggunaan kekuatan elemen-elemen (material) konstruksi berkualitas dan proses pengerjaan yang telaten dan cerdas.

Dalam hal sumber daya manusia, pada waktu proyek dimulai, hanya sembilan orang. Kemudian sesuai dengan kebutuhan pembangunan kini

telah mencapai lebih 2.500 orang. Terbagi dalam 28 unit karyawan, masing-masing fungsinya berbeda. Jumlah ini tidak statis tapi dinamis artinya bisa berubah sesuai kebutuhan. Bisa bertambah bisa berkurang. Jika pekerjaan di suatu unit sudah selesai maka karyawannya akan diperbantukan ke unit lain yang sedang mengejar target penyelesaian.

Seluruh karyawan tinggal di sekitar lokasi proyek. Setiap pagi mereka menerima amanah dari insinyur pelaksana. Malam hari, melakukan evaluasi tentang progres yang telah dicapai. Sehingga setiap saat, semua pekerjaan menjadi terkontrol. Hampir tidak ada mandor yang harus berada di lokasi

Manajemen Ilahiyah yang bermakna manajemen tauhid atau manajemen terpadu dalam satu kesatuan sistem.



proyek setiap saat. Artinya, walaupun pimpinan unit sedang tidak ada di lokasi proyek, seluruh program harian tetap berjalan semestinya. “Mandor mereka adalah Alquran, di tangan mereka alat kerja, di kantong mereka ada Alquran, minimal kitab Juz’ Amma”, kata Syaykh al-Ma’had. Mungkin saat ini, sistem ini satu-satunya di Indonesia atau bahkan di dunia.

Setiap pekerja mendapat kesempatan untuk bekerja di semua unit. Dengan demikian semua karyawan diharapkan punya keahlian yang bermacam-macam. Suatu saat mereka mengaduk semen, pada saat lain mereka juga harus bisa mengemudikan dozer atau membuat furniture. Besok

bisa jadi tukang batu, lusa bisa di kantor memegang komputer. Jadi, harus di-rolling supaya hidup, tidak membosankan. Di sini setiap unit sama, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah antara petugas yang mengecor, menyapu atau yang duduk di depan komputer. Semua nilainya sama, yang membedakan adalah ketakwaan.

Pengadaan dan Pemanfaatan Material

Kualitas bangunan juga dimulai dari perencanaan material. Kekuatan bangunan bergantung kepada kekuatan elemen-elemen (material) konstruksi bangunannya. Untuk bangunan yang diprogram akan bertahan berabad-abad, bahan-bahan dasarnya harus berkualitas. Dan untuk lebih menjamin kualitas bahan-bahan material itu, sejak awal dilakukan kontrol mutu, mulai dari pengadaannya sampai pemanfaatannya.

Material konstruksi yang digunakan meliputi material baja profil, baja tulangan dan material beton yakni campuran material semen, pasir, kerikil dan air. Material arsitektur meliputi material untuk lantai dan tangga seperti keramik, untuk dinding berupa batu, cat, kayu, kusen, kayu pintu, jendela dan kaca. Adapula material untuk plafond seperti tripleks, gypsum serta material atap berupa genteng dan alumunium. Material plumbing meliputi instalasi pipa-pipa air bersih dan air kotor, pipa hidrant, kran wastafel, kloset, dan lainnya. Dan untuk material elektrikal meliputi instalasi kabel-kabel, pipa-pipa listrik, dan lampu-lampu.

Untuk baja konstruksi, digunakan baja tulangan dan baja profil yang masih harus didatangkan dari Korea, Jepang, Polandia dan Rusia. Soalnya, ketika pernah dicoba menggunakan baja WF lokal hasilnya sangat tidak memuaskan, belum apa-apa sudah melengkung. Baja tulangan yang digunakan berdiameter mulai 6 mm hingga 32 mm. Sedangkan untuk baja profil menggunakan bentuk-bentuk seperti wide flange (sayap lebar) berdimensi tinggi 200 mm hingga 450 mm, Canal Cnp berdimensi tinggi mulai 75 mm hingga 150 mm, siku berukuran 30 mm hingga 100 mm dan juga plat baja berukuran tebal mulai 2 mm hingga 15 mm.

Sedangkan untuk kekuatan lantai bangunan digunakan pelat lantai beton bertulang dengan kualitas betonnya 300 kg per cm persegi. Pelat lantai

tersebut dipikul oleh balok lantai dengan menggunakan baja profil sayap lebar (*wide flange*) dengan kekuatan tegangannya bernilai 4.100 kg per cm persegi.

Suatu hal yang patut dicatat bahwa semua pengadaan material adalah bahan baku. Kemudian diolah sendiri menjadi bahan material jadi. Keperluan besi, misalnya, yang dibeli bahan baku, lalu dipabrikasi sendiri dan di-*erection* sendiri. Dalam pabrikasi baja baik pemotongan, pengelasan maupun pelubangan (*pons*) dan *rolling* plat baja seluruhnya menggunakan teknologi Ma’had sendiri. Teknologi pembesian memanfaatkan peralatan yang disebut *bar cutter* dan *bar bending machine*

untuk memotong dan membengkokkan besi tulangan sesuai kebutuhan.

Semua itu dikerjakan sendiri oleh unit kerja pabrikasi yang bertanggung jawab mengenai konstruksi baja dan pembesian, dari mulai bahan baku sampai

menjadi bahan yang siap dipasang menjadi konstruksi bangunan di Ma’had Al-Zaytun. Untuk bisa memenuhi target yang diprogramkan oleh yayasan tepat waktu, sistem kerja yang diterapkan bagian pabrikasi berbeda dengan unit-unit yang lain yakni memberlakukan dua *shift*, bekerja 24 jam siang dan malam.

Di samping memberlakukan sistem kerja 24 jam, tenaga kerja unit pabrikasi pun mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta berpengalaman dalam pembesian sebelumnya.

Begitu pula dalam pemasangan konstruksi baja menggunakan alat *power winch*. Dalam pengeboran air menggunakan mesin bor sumur (*drilling machine*) pada *submersible pump* (pompa sumur dalam).

Dalam pelaksanaan pondasi pun diterapkan teknologi modern yang dioperasikan tenaga sendiri. Dimulai dengan penggalian tanah menggunakan *excavator*. Setelah itu tanah diangkut dengan *dump truck* ke suatu tempat. Selanjutnya tanah diratakan dengan dozer sebelum dilakukan pemadatan oleh vibrator hingga diperoleh daya dukung yang kuat. Pada saat pembeconan, tim memanfaatkan *truck mixer* untuk menuangkan beton siap pakai. Truk ini mengambil beton siap pakai tersebut dari *batching plant* (pembuatan beton masak) pembuat *ready mix concrete* yang juga dikerjakan sendiri di kompleks Ma’had. ■

Mandor mereka adalah Alquran, di tangan mereka alat kerja.



Program RPPK, Serius atau Retorika

Satu lagi gebrakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo mencanangkan Program Revitalisasi, Pertanian, Perkebunan dan Kelautan (RPPK) 2005-2009.

Angin segar membelai masyarakat akar rumput mendapat angin segar. Mereka akan didayagunakan di dalam program RPPK yang diluncurkan Susilo di Bundungan Jatiluhur (11/6). Sebab di dalam sembilan bulan terakhir, kegiatan ekonomi masyarakat akar rumput mengalami stagnasi (mandek). Satu-satunya sektor yang masih bergerak, kata fungsionaris PDIP, Emir Moeis sebagaimana dikutip koran sore, *Suara Pembaruan* (15/5), adalah konsumsi. Sedangkan sektor sandang merosot ke titik terendah (70%).

Perhatian media massa cetak nasional cukup besar terhadap program RPPK. Misalnya, koran ekonomi *Bisnis Indonesia*, menurunkan tiga tajuk rencana yang mengupas program tersebut. Tajuk utama BI (13/6) berjudul, Petani dan Kemandirian Bangsa, memuji pemerintah yang menjadikan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional.

Empat hari kemudian (17/6), BI kembali mengangkat Program RPPK, menyorot secara khusus komoditi kelapa sawit, komoditi yang punya masa depan cerah. BI menanggapi Rencana Aksi Departemen Pertanian yang menargetkan devisa 1 miliar dolar AS per tahun dari ekspor minyak sawit mentah (CPO). Tiga hari kemudian (20/6), BI menurunkan lagi tajuk yang menekankan Program RPPK sebagai landasan kokoh bagi pembangunan industri yang maju dan mandiri.

Koran sore, *Suara Pembaruan* mengangkat Program RPPK dalam Tajuk Rencana (14/6) berjudul, Revitalisasi Pertanian Harus Serius. SP memberi catatan penting atas tersingkirnya sub-sektor pertanian, perkebunan, dan

kelautan dalam perekonomian Indonesia. Karena perekonomian nasional hanya hanya menekankan pada sektor industri.

Harian ini menutup tajuknya dengan pertanyaan, "Lalu siapa yang akan memasok bahan pangan?" Pertanyaan ini mengisyaratkan betapa pentingnya sektor pertanian, perkebunan dan kelautan dalam perekonomian nasional, termasuk masyarakat yang bekerja di masing-masing sub sektor tersebut.

Koran beroplak terbesar, *Kompas* mengangkat Program RPPK dalam tajuk (11/6) yang berjudul, Apa yang Dibutuhkan untuk Merevitalisasi Pertanian? Menurut *Kompas*, kunci utama keberhasilan program ini terletak pada kemampuan pemerintah menggerakkan semua komponen bangsa agar ikut berperan dalam membangun sektor pertanian. Sebab, sektor pertanian, tidak saja meningkatkan produksi nasional, tetapi juga menaikkan pendapat petani dan menciptakan lapangan kerja.

Serius atau Retorika?

Beberapa hari sebelum dicanangkannya Program RPPK, para ahli ataupun para pelaku sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan sudah memberi pandangan yang beragam.

Secara umum, berbagai kalangan menyatakan, pemerintah perlu merevitalisasi sub-sub sektor tersebut untuk membangkitkan perekonomian nasional, karena itu harus didukung. Namun tanggapan menjadi sangat beragam ketika memasuki wacana kesungguhan pemerintah meluncurkan Program RPPK.

Tidak sedikit ahli (akademisi) dan praktisi pertanian, perkebunan dan kehutanan, yang meragukan itikad baik pemerintah untuk menjamin kelang-



KOMPAS
JUMAT, 17 JUNI 2005



Masih Melambah — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih cenderung me-
Rp 9.627,50 per dolar AS pada hari Kamis (16/6) di Jakarta. Seorang pria meng-
penukaran di Jakarta, kemarin. Sementara itu, indeks harga saham gabungan (I-
1.225.739.

BNI Akan Lihat Harga Penawaran B

JAKARTA, KOMPAS — Ma-
ajemen PT Bank Negara In-
donesia Tbk sedang mengkaji
secara mendalam tawaran un-
tuk membeli saham Bank In-
donesia yang akan melepas Bank
Indonesi. Bank BNI akan me-
mutuskan membeli jika lang-
kah ini sesuai dengan strategi
bisnis BNI dan harga penawar-
annya menarik.
"Setiap ada kesempatan bis-
nis tentu akan kami tanggap
dengan baik," kata Direktur
Utama BNI Nigit Pramono. Ka-
min (16/6) di Jakarta. Nigit me-
jelaskan hal itu menanggapi
pertanyaan Koran XI DPR
agar BI tak menjual Bank Indo-

Kualitas aktiva

Sigit menjelaskan, dalam ka-
jangan membeli Bank Indove-
ri, pihaknya juga menelaah se-
jumlah aspek, seperti masalah

kegiatan aktifnya dan
"Kami akan lihat
dengan keberanian
di London, apakah
melengkapi data
pasar Korpas," kata
penerbit Kompas.
"Terkait dengan
London, Inggris, a-
gi membahayakan
Bank Indove-
ri, kami tentu
juga akan men-
Hongkong dan
Unit perolehan
oleh bank dan
telah proses dan
akhir kembali

sungan program tersebut. Mereka mempertanyakan dampak positif dari Program RPPK terhadap petani kecil, khususnya para petani yang tidak memiliki lahan, dan buruh tani.

Salah satu artikel yang secara gamblang menggambarkan kekhawatiran tentang keseriusan pemerintah ditulis oleh Agusdin Pulungan, dimuat di kolom induk opini *Kompas* (11/6). Dia menganggap komunitas ekonomi pertanian masih meraba-raba komitmen pemerintah di balik peluncuran Program RPPK.

Revitalisasi Pertanian, Retorika SBY?, demikian Agusdin memberi judul bagi artikelnya. Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini secara tandas mempertanyakan keseriusan Susilo merevitalisasi sektor pertanian, perkebunan dan kelautan.

Nilai Penyerahan Piutang Bank Mandiri Dipotong Rp 11 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal dan Lelang Negara Departemen Keuangan memotong nilai penyerahan piutang macet dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 11 triliun selangka nilai pi-
triliun. Keputusan tersebut mendapatkan sorotan dari beberapa anggota Komisi XI DPR yang menilai ber-
potensi merugikan ketahanan negara.

Di tengah Rapat Dengar Pendapat (RDPP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (18/6), Dirjen PLN Maschud Sukir mem-
ungkapkan, tindakan ini sebagai
langkah untuk memperbaiki Bank
Mandiri dengan pemertahan
pada konsep dan desain. Per-
sewaan, pihak Mandiri men-
yakinkan nilai penyerahan adal-
ah Rp 21,4 triliun, sedangkan
pemerintah menyerahkan hanya
Rp 10,4 triliun.

"Sehingga Rp 11 triliun itu dite-
apkan karena beresik atau ke-
ngin dan kedua yang melanda
ketahanan perundang-undang-

an. Kami punya hak mengura-
kan jumlah hingga dua desimal
yang melebihi ketentuan, un-
dang-undang, tapi ketentuan
yang pokoknya," kata Maschud.
Selain itu, Maschud menyo-
alkan, pengurangan nilai pe-
nerahan itu disebabkan oleh
pemerintah yang telah sepa-
ngan. Pengurangan juga ter-
jadi karena terdapat objek
yang sudah tidak dapat ditagih
lagi akibat tidak adanya men-
gajar, dan jaminannya sudah
sangat sulit dipul-
kan. "Kemudian dalam kasus ter-
sebut ada kasus piutang negara
yang dikembalikan kepada pe-
merintah piutang atau dilakuk-
kan penarikan oleh pemerintah

Diungkapkan Direktorat Jende-
ral Penjualan dan Lelang Negara
(Dirjen PLN) untuk memotong
nilai penyerahan piutang macet
oleh Bank Mandiri Rp 11 triliun
Anggota Komisi XI DPR Syarif
Hassid, Syarif menegaskan, nilai
selengkapnya itu bisa mencapai Rp
11 triliun.

"Tidak mungkin sebesar itu
diperoleh atau selisihan nilai
Rp 2,4 triliun. Bahkan jika di-
kurangi dengan kerugian bunga
kurang dengan kerugian bunga
tidak akan sebesar itu. Ini harus
diketahui oleh pemerintah. Ini
Rp 11 triliun itu harus sepa-
ngan. Ini besar sekali, bahkan setara
kebutuhan dana kompensasi
kata Syarif.

"Syarif juga mempertanyakan
terhadap bentuk kerugian nega-
ra sekitar Rp 322 miliar sepa-
ngan. Hal ini harus dipertan-
kan macet PT di Bursa Per-

dagangan. "Kata Syarif,
Mandiri menyerahkan pada
tahun 2004 nilai piutang yang
dikembalikan kepada Dirjen PLN
sebesar Rp 9,4 triliun. Se-
mentara yang telah diadak-
kan dan dapat dikembalikan
kepada pihak kreditur hanya
mencapai Rp 908,2 miliar. Se-
mentara, hingga tahun April
2005, nilai piutang yang
dikembalikan
mencapai Rp 47,4 miliar
Tergesit akhir tahun 2005
hanya mencapai Rp 1,5 miliar
mentara piutang macet
mencapai Rp 1 triliun," kata
Maschud.

Pada tahun 2004 terdapat
15.000 rekening yang dengan
hasil bersih senilai Rp 3,5 trily-
on. Sedangkan hingga April
2005 terdapat 8.800 rekening
dengan hasil bersih se-
besar Rp 977,14 miliar.
"Mandiri melakukan pememo-
rian 2004 tingkat pememo-
rian sebesar 14,15 persen dari
piutang macet, sedangkan pada
April 2005 sebesar 47,15 per-
sen," ujar Maschud. (10)

Bukopin Gandeng Modal Ventura Bentuk Bank Pengayom BPR

JAKARTA, KOMPAS — Bank Bukopin
mengundang investor untuk
berpartisipasi dalam pembentukan
modal Ventura untuk mengembangkan
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.

Bank Bukopin
mengundang investor untuk
berpartisipasi dalam pembentukan
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.

Bank Bukopin
mengundang investor untuk
berpartisipasi dalam pembentukan
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.

Keuntungan

Bank Bukopin
mengundang investor untuk
berpartisipasi dalam pembentukan
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.

Swamitra

Bank Bukopin
mengundang investor untuk
berpartisipasi dalam pembentukan
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.

Indover

Bank Bukopin
mengundang investor untuk
berpartisipasi dalam pembentukan
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.

PERSEKUTUAN ELEK MEDIA KOMPUTINDO

Bank Bukopin
mengundang investor untuk
berpartisipasi dalam pembentukan
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.

FILE EVENTS

Bank Bukopin
mengundang investor untuk
berpartisipasi dalam pembentukan
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.
Dalam upaya ini, Bukopin menggandeng
modal Ventura untuk memperkredit rakyat.

kinan para petani. Tujuan itu tak akan tercapai tanpa didahului reformasi agraria.

Dua Belas Prioritas

Menko Ekuni, Aburizal Bakrie yang
dikahuti SP (13/6), sebagai mengatakan
bahwa Program RPPK (2005-2009)
akan dioperasionalkan melalui 12 strate-
gi kebijakan untuk mencapai empat
prioritas sasaran produk.

Prioritas tersebut mencakup: Inves-
tasi dan Pembiayaan; Manajemen
Pertanahan dan Tata Ruang; Penge-
lolaan Lingkungan dan Sumber Daya
Alam; Infrastruktur Pertanian, Per-
ikanan, dan Pedesaan; Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Pember-
dayaan Petani-Nelayan; Riset dan
Pengembangan Teknologi; Ketujuh,
Kebijakan Perdagangan; Promosi, dan
Pemasaran; Perpajakan dan Retribusi;
Dukungan Langsung kepada Petani,
Nelayan, dan Petani Hutan; Kebijakan
Pangan dan Agroindustri Pedesaan.

Untuk mempertegas Program
RPPK, pemerintah memproyeksikan
ketersediaan 30 juta hektar sebagai
lahan abadi pertanian. Lahan itu terbagi
dalam 15 juta hektar lahan beririgasi
dan 15 juta hektar lahan kering (SP, 15/
6). Selain itu pemerintah akan mem-
perkecil luas lahan tidur dan lahan
terlantar. Yang dimaksud dengan lahan
abadi, lahan ini tidak bisa dikonversi
menjadi lahan untuk kegiatan lain di
luar pertanian. Lahan ini akan dibuka
di seluruh besar; Jawa, Sumatera,
Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Keseriusan program tersebut juga
dipertegas oleh Menteri Pertanian,
Anton Apriyantono. Pemerintah segera
melakukan inventarisasi lahan-lahan
yang akan digunakan sebagai lahan
abadi. Misalnya, tanah milik Departemen
Kehutanan yang tidak produktif
dapat digunakan sebagai lahan abadi
pertanian. Hm, Sh.

Tentu, jika Agusdin mempertanya-
kan efektifitas program tersebut bukan
tidak beralasan. Soalnya program ini
bukan pertama kali diluncurkan. Sudah
didengarkan pemerintahan Hindia
Belanda yang mendirikan Departemen
Pertanian. Pemerintahan Presiden
Soekarno juga mencanangkan program
ketahanan pangan dan peningkatan
kesejahteraan petani. Dan pemerinta-
han Presiden Soeharto menempatkan
sektor pertanian sebagai tulang punga-
ngung perekonomian nasional. Namun
orientasi perekonomian nasional yang
mengejar tingkat pertumbuhan yang
setinggi-tingginya, telah menganak-
tirikan para petani.

Agusdin berasumsi Program RPPK
akan mengulang kesalahan di masa lalu
jika tidak memiliki dasar dan visi yang
tepat, yakni menyjahterakan para
petani. Artinya, Program RPPK tetap
tidak dapat menghilangkan kemis-

kinan para petani. Tujuan itu tak akan
tercapai tanpa didahului reformasi
agraria.

Untuk mempertegas Program
RPPK, pemerintah memproyeksikan
ketersediaan 30 juta hektar sebagai
lahan abadi pertanian. Lahan itu terbagi
dalam 15 juta hektar lahan beririgasi
dan 15 juta hektar lahan kering (SP, 15/
6). Selain itu pemerintah akan mem-
perkecil luas lahan tidur dan lahan
terlantar. Yang dimaksud dengan lahan
abadi, lahan ini tidak bisa dikonversi
menjadi lahan untuk kegiatan lain di
luar pertanian. Lahan ini akan dibuka
di seluruh besar; Jawa, Sumatera,
Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Keseriusan program tersebut juga
dipertegas oleh Menteri Pertanian,
Anton Apriyantono. Pemerintah segera
melakukan inventarisasi lahan-lahan
yang akan digunakan sebagai lahan
abadi. Misalnya, tanah milik Departemen
Kehutanan yang tidak produktif
dapat digunakan sebagai lahan abadi
pertanian. Hm, Sh.

Untuk mempertegas Program
RPPK, pemerintah memproyeksikan
ketersediaan 30 juta hektar sebagai
lahan abadi pertanian. Lahan itu terbagi
dalam 15 juta hektar lahan beririgasi
dan 15 juta hektar lahan kering (SP, 15/
6). Selain itu pemerintah akan mem-
perkecil luas lahan tidur dan lahan
terlantar. Yang dimaksud dengan lahan
abadi, lahan ini tidak bisa dikonversi
menjadi lahan untuk kegiatan lain di
luar pertanian. Lahan ini akan dibuka
di seluruh besar; Jawa, Sumatera,
Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Keseriusan program tersebut juga
dipertegas oleh Menteri Pertanian,
Anton Apriyantono. Pemerintah segera
melakukan inventarisasi lahan-lahan
yang akan digunakan sebagai lahan
abadi. Misalnya, tanah milik Departemen
Kehutanan yang tidak produktif
dapat digunakan sebagai lahan abadi
pertanian. Hm, Sh.

Untuk mempertegas Program
RPPK, pemerintah memproyeksikan
ketersediaan 30 juta hektar sebagai
lahan abadi pertanian. Lahan itu terbagi
dalam 15 juta hektar lahan beririgasi
dan 15 juta hektar lahan kering (SP, 15/
6). Selain itu pemerintah akan mem-
perkecil luas lahan tidur dan lahan
terlantar. Yang dimaksud dengan lahan
abadi, lahan ini tidak bisa dikonversi
menjadi lahan untuk kegiatan lain di
luar pertanian. Lahan ini akan dibuka
di seluruh besar; Jawa, Sumatera,
Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Keseriusan program tersebut juga
dipertegas oleh Menteri Pertanian,
Anton Apriyantono. Pemerintah segera
melakukan inventarisasi lahan-lahan
yang akan digunakan sebagai lahan
abadi. Misalnya, tanah milik Departemen
Kehutanan yang tidak produktif
dapat digunakan sebagai lahan abadi
pertanian. Hm, Sh.

Besar pasak dari tiang. Peribahasa ini rasanya cocok untuk menggambarkan pola pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh mesin konsumsi, bukan produksi dan pembangunan. Pembiayaan berbagai sektor meningkat tajam sehingga mendorong pergeseran asumsi-asumsi dalam APBN. Faktor utamanya, pergerakan harga minyak mentah dunia yang tak bisa diprediksi, dan depresiasi rupiah terhadap dolar.

Pada satu sisi, harga minyak mentah terus meroket dari tingkat 50 dolar AS pada kuartal pertama ke 58 sampai 60 dolar per barel memasuki kuartal kedua tahun ini. Padahal asumsi harga BBM di dalam APBN 2005 tambahan hanya 40 dolar per barel. Bisa dihitung defisit anggaran dari sektor minyak akan bertambah terus sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia.

Di sisi lain, nilai rupiah dalam tiga bulan terakhir terus melemah terhadap dolar AS dan sejumlah mata uang asing lainnya. Ini memicu peningkatan pembiayaan, khususnya di sektor internasional, seperti cicilan utang yang harus dibayar dalam dolar AS, impor barang modal dan berbagai barang konsumsi.

Kenaikan harga minyak mentah dan merosotnya nilai rupiah membuat defisit APBN 2005 semakin menganga.

Tadinya pemerintah menargetkan defisit 7% pada PDB atau turun 1% dari APBN 2004. Hampir semua media massa pekan lalu menyorot krisis BBM yang sudah tentu berdampak pada anggaran negara. Soal pergerakan nilai rupiah yang sangat aktif sepanjang satu semester ini, Koran Tempo (2/6) memperlihatkankannya pada sebuah grafik yang menurun.

Di tengah terpaan badai defisit, pemerintah mengajukan anggaran tambahan pada APBN 2005 ke DPR, untuk mendanai lima program yang belum dianggarkan. Kelima program tersebut menyangkut; Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Kompensasi Kenaikan Harga BBM, Pembentukan Departemen/Lembaga baru, Pemilihan Kepala Daerah, Anggaran Pertahanan dan Keamanan (TNI). Paling-paling untuk menutup defisit tersebut, pemerintah mengharapkan peningkatan pendapatan dari pajak, program privatisasi BUMN dan utang luar negeri.

Dalam konteks APBN-P (2005), panitia anggaran DPR telah menetapkan asumsi-asumsi baru yang dianggap cukup realistis mengantisipasi keadaan saat ini. Namun mereka pesimis asumsi itu bisa bertahan lama.

Empat hal pokok yang patut membuat mereka pesimis. Pertama, lonjakan harga minyak bumi. Mereka, untuk APBN-P, mengasumsikan harga minyak bumi 54 dolar AS per barel. Padahal harga minyak di pasar dunia sampai Selasa (21/6) melonjak sampai 59 dolar AS per barel, dan bergerak lagi ke 60 dolar hanya sehari setelah pengesahan asumsi 54 dolar.

Kedua, nilai rupiah yang terus melemah. Panitia anggaran menetapkan asumsi Rp 9.300 per 1 dolar AS, namun harga dolar merangkak naik ke Rp 9600.

Ketiga, tingkat inflasi. Panitia mematok asumsi 4,5 sampai 5,5 persen di APBN, tetapi melambung ke 7,5 persen pada APBN-Perubahan. Sulit dipastikan bahwa laju inflasi tidak akan bergerak naik.

Keempat, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berubah-ubah juga bisa mengancam stabilitas APBN-Perubahan. Sebagai instrumen moneter, stabil atau tidaknya suku bunga SBI sangat tergantung pada kinerja ekonomi makro. Namun Bank Indonesia bisa mengambil kebijakan darurat, menetapkan suku bunga tinggi, bilamana inflasi dan (atau) nilai rupiah mengalami guncangan hebat.

Namun kenaikan suku bunga SBI yang cukup tinggi, bisa menekan pertumbuhan ekonomi, karena akan mempersempit ruang gerak sektor perbankan. Taruhannya, sektor riil semakin stagnan, menyempitnya ruang usaha dan lapangan kerja, berarti menurunnya produktivitas nasional yang memang sudah rendah. Sehingga, pertumbuhan ekonomi bisa lebih rendah dari asumsi APBN Perubahan (6 persen). Hm, Sh

Kinerja ekonomi makro dihadang masalah berat sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima estafet kepemimpinan Oktober 2004. Kabinet SBY digoyang kenaikan harga minyak bumi dan melemahnya nilai rupiah.

Defisit Anggaran di Titik Rawan



Ketika Aborsi Diperbolehkan



Majalah Kartini edisi 2141 secara eksklusif menyoroti Fatwa MUI yang membolehkan perempuan korban perkosaan menggugurkan kandungan, asal janinnya belum berumur 40 hari.

Sejak dulu masalah aborsi selalu menjadi kontroversi. Namun tiba-tiba, sebuah fatwa yang tak disangka-sangka dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa aborsi diperbolehkan.

Bisa diduga bahwa fatwa tersebut akan memicu kontroversi lain. Meskipun sesungguhnya, yang diperbolehkan untuk diaborsi adalah kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat janinnya belum berusia 40 hari.

Dasar dikeluarkannya fatwa ini karena adanya tuntutan dari kalangan kedokteran dan juga beberapa peneliti yang meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan pembahasan kembali tentang permasalahan aborsi. "Kita melihat bahwa

saat ini sering terjadi, bahkan banyak sekali kasus aborsi itu terjadi karena perzinahan dan sebagainya," ungkap Ketua Komisi Fatwa MUI Maaruf Amin, dalam majalah *Kartini* edisi 2141 yang beredar 9-23 Juni 2005.

Maraknya jumlah aborsi ilegal sangat memprihatinkan. Dengan adanya fatwa tersebut, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan penjelasan bahwa aborsi itu legal asal dilakukan dengan syarat tertentu.

Walau bagaimanapun, menurut Maaruf, pada hakekatnya aborsi itu diharamkan, terhitung sejak terjadinya pembuahan sampai menjadi janin. Namun, hal itu menjadi diperbolehkan jika ada hal-hal yang menyulitkan si ibu atau mengancam jiwanya, yang sifatnya darurat (udhzur).

Selain udhzur, ada juga hajat, yang suatu keadaan yang sifatnya sangat mendesak, lebih dari udhzur.

Aborsi yang diizinkan, selain kehamilan karena perkosaan, juga diperbolehkan bagi janin yang terdeteksi mengalami kelainan genetik. Alasan MUI, jika janin dibiarkan hidup, ia akan menderita penyakit itu sepanjang hidupnya dan membuatnya menderita. Inilah yang dianggap hajat.

Namun, untuk dua kondisi tersebut boleh dilakukan aborsi hanya jika kehamilan belum mencapai usia 40 hari. Karena, setelah 40 hari, janin sudah memiliki ruh, sehingga jika dilakukan sama dengan pembunuhan.

Masih ditambahkan MUI, pengguguran kandungan harus dilakukan di rumah sakit yang sudah ditentukan Departemen Kesehatan. Dan untuk mendapatkan kepastian adanya unsur pemerkosaan, harus dibuktikan berdasarkan kepastian dari dokter, ulama dan instansi berwenang (Kepolisian).

Dilema di mata hukum

Tentu saja fatwa tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimana dalam pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Maaruf mengatakan, ketika hukum positif melarang tindakan tersebut, harus ada upaya tertentu untuk membolehkan aborsi bagi korban perkosaan. Antara lain dokter dan pembuat undang-undang. Bagaimanapun, landasan awal fatwa tersebut adalah tuntutan masyarakat.

Di majalah yang sama, Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Mabes Polri, Kombes Pol Drs Zainuri Lubis mengatakan, pihaknya mendukung penuh fatwa tersebut. Jika ada korban perkosaan ingin melakukan aborsi, harus ada visum et repertum yang memastikan

bahwa dia diperkosa.

Sementara itu, dari kaca mata hukum pidana, tidak ada satupun pengecualian mengenai aborsi yang disengaja (abortus provocatus). Spesifikasinya tidak disebutkan. Tapi jika sengaja melakukan aborsi, dia bisa dikenakan hukuman penjara.

Namun demikian, dalam UU Kesehatan pasal 15 dinyatakan aborsi bisa dilakukan dengan alasan medis. Untuk alasan non medis tidak diperbolehkan.

(In)

Karena adanya tuntutan dari kalangan kedokteran dan juga beberapa peneliti yang meminta kepada MUI untuk pembahasan kembali aborsi.

Sejumlah surat kabar harian yang terbit di Jakarta (25/6), di dalam tajuk mereka, menyorot masalah penegakan hukum, pajak dan krisis BBM. Berikut ini rangkuman cuplikan tajuk Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Karya dan Pelita.

Perhatian utama Kompas ditujukan pada keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memvonis Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh 10 tahun penjara, segera masuk ke Rutan Salemba. Puteh tergelincir skandal korupsi. Dan skandal yang sama menggiring mantan menteri Agama Said Agil Al Munawar ke Rutan Mabes Polri.

Namun harian yang sangat berpengaruh ini mempertanyakan, apakah itu sebuah gambaran dari keseriusan

dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Bali, di tingkat banding. Hal ini diungkapkan oleh pengacara Corby asal Australia kepada sebuah surat kabar di sana.

Namun tuduhan itu buru-buru ditanggapi oleh pengacara Corby asal Indonesia Hotman Paris Hutapea. Uang yang diminta bukan untuk membayar hakim agar mengabulkan banding Corby, melainkan untuk penciptaan citra baik Corby yang dihukum karena kasus Narkoba, atau biaya public rela-

nyampaikan pandangannya tentang perilaku aparat penegak hukum, dalam tajuk (17/6) di bawah judul, Membersihkan Sapu yang Kotor. Koran itu berpendapat, untuk membersihkan lantai yang kotor, perlu sapu yang bersih. Kian terbukti dengan sapu yang tidak bersih, lantai kita tetap kotor.

Penangkapan dua aparat perangkat hukum Rizal dan Saleh, menurut MI, menjadi awal pembongkaran berbagai skandal peradilan yang realitasnya bisa jadi jauh lebih mengagetkan. Uang suap yang diterima panitera pasti sampai ke tangan para hakim.

Mengungkap hasil investigasi yang dilakukannya dua tahun lalu, MI menunjukkan Pandawa Lima (lima orang hakim) yang menguasai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Merekalah yang menentukan hitam-putihnya perkara-perkara besar (perdata dan pidana) di pengadilan tersebut.

Dalam praktik kotornya, tulis MI,

Indonesia di Ambang

kita dalam menegakkan supermasi hukum dalam upaya memberantas korupsi? Koran ini menaruh harapan agar pemberantasan penyakit sosial ini bisa mengangkat kembali citra bangsa dan negara yang begitu rendah di mata dunia.

Meski tidak meragukan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas korupsi, Kompas mengingatkan bahwa itu bukan pekerjaan mudah karena sudah jadi penyakit kronis. Presiden merasakan adanya perlawanan besar terhadap usaha yang sedang digalangnya saat ini.

Ironisnya, menurut Kompas, citra dan perilaku buruk aparat penegak hukum kita kurang mendukung upaya tersebut. Sehingga muncul persepsi di masyarakat bahwa hukum di Indonesia bukan ditentukan oleh aturan yang dimiliki oleh orang yang terlibat dalam hukum.

Yang sangat memalukan, bahwa beberapa pengacara Indonesia meminta dana 500.000 dolar Australia untuk memenangkan Schapelle Corby yang

tions.

Kita boleh menyangkal bahwa hukum di Indonesia lebih ditentukan oleh kekuatan uang. Tetapi kenyataan menunjukkan uang jauh lebih menentukan dibandingkan dengan argumentasi hukum.

Kompas menunjuk fakta lain. Dalam kasus pengacara Puteh, Teungku Syaifuddin Popon yang ketangkap basah ketika menyerahkan uang sekoper Rp 250 juta kepada dua Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta, Ramadhan Rizal dan M. Saleh. Ini menunjukkan bahwa permainan uang sudah umum terjadi di pengadilan.

Kompas menyimpulkan bahwa mafia peradilan yang sejak lama disinyalir ada memang tak bisa disangkal. Bukan mengada-ada atau omong kosong, tetapi terjadi. Kasus Rizal dan Saleh diyakini hanyalah puncak dari sebuah gunung es yang siap mencair.

Kalau aparat hukum masih seperti itu, maka pantas apabila kita berkecil hati mengenai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi dinegeri ini.

Media Indonesia, secara tepat me-



para penegak hukum yang keblinger itu dibantu oleh para cantriknya alias panitera.

Republika menyorot peristiwa bersejarah di Bireuen, NAD, (24/6). Sebanyak 15 orang dihukum karena berjudi dikenai hukuman cambuk enam sampai sepuluh kali di halaman depan Masjid Jami, di hadapan sekitar 2000-an orang, usai shalat Jumat.

Provinsi NAD memberlakukan hukum syariat Islam bagi pemeluk Islam di sana. Penerapan syariat Islam itu merupakan bagian dari otonomi di daerah.

Namun Republika menyarankan pelaksanaan syariat Islam harus dilaksanakan dengan konteks yang ada saat ini. Kita harus tetap mengedepankan kemanusiaan dan martabatnya. Tim medis mesti siap sedia memberikan pertolongan setelah dihukum menjalani eksekusi.

Menyangkut sisi keadilan, pene-

rapan hukuman juga diterapkan kepada pelaku kriminal di semua area dan tingkatan. Tidak hanya pada pelaku kriminal 'kelas teri'. Berlakukan juga kepada pelaku 'kelas kakap', seperti koruptor. Dalam kasus judi Togel, yang dihukum jangan hanya pembelinya tetapi juga penjual, dan bandar jangan dibiarkan terus berkeliaran.

Tulis Republika, penerapan sanksi hukuman sesuai syariat Islam dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kriminalitas di NAD, selain mengentalkan aroma religi di bumi 'Serambi Mekah' dalam segala aspek kehidupan.

Tajuk Suara Karya, mengupas penerapan pajak progresif terhadap kendaraan pribadi. Ini bukan wacana wacana baru, tetapi sudah beberapa kali mengemuka, terutama terkait dengan kemacetan lalu lintas dikota-kota besar yang kian hari kian menjadi.

Harian ini mengeritik para penganal kebijakan yang belum berniat menerapkan pajak progresif terhadap kendaraan pribadi. Namun

Wapres Jusuf Kalla mengisyaratkan niat pemerintah untuk mempertimbangkan kemungkinan tersebut sebagai salah satu strategi dalam menekan konsumsi BBM. Penerapan pajak progresif terhadap kendaraan pribadi memang bisa sekaligus berfungsi menekan tingkat konsumsi BBM.

Menurut Suara Karya, kepemilikan kendaraan pribadi yang tanpa kendali memperboros konsumsi BBM. Tidak hanya cukup satu mobil, melainkan hingga lima mobil dalam satu keluarga.

Kondisi Kritis. Indonesia sekarang, tulis Pelita, sedang menghadapi masa kritis. Persoalan lama belum teratasi, persoalan baru datang tiada henti. Kenyataan membuktikan ekonomi masih sulit, pengangguran meningkat, dan kemiskinan bertambah, penyakit silih berganti. Penyehatan perbankan belum beres, malah muncul kredit macet. Utang negara menumpuk. Utang dalam negeri malahan melampaui utang luar negeri.

Pelita juga mengupas kelangkaan BBM. Di lain pihak pemadaman listrik mulai dilakukan secara bergiliran. Bisa dibayangkan apabila listrik padam mendadak, gangguan akan merembet ke berbagai bidang kehidupan.

Krisis BBM dan listrik memperlihatkan terbengkalainya fungsi pelayanan publik Pertamina dan PLN. Kondisi keuangan di kedua perusahaan negara itu menjadi salah satu penyebab krisis.■

Tajuk Lain

Dalam tajuknya, *Kedaulatan Rakyat* mengulas masalah krisis BBM yang mendominasi media akhir-akhir ini. Harian ini menulis, bahwa krisis BBM sebenarnya hanya sebagian kecil dari segunung masalah yang dihadapi bangsa ini.

Kelangkaan BBM bukan hanya sekali ini kita alami. Sudah berkali-kali terjadi, jika pendistribusian BBM ke suatu kawasan terhambat, terjadi antrean panjang di SPBU.

Penyediaan dan pendistribusian BBM bukan satu-satunya penyebab krisis BBM saat ini. Beberapa sumber mengatakan, produksi BBM di negeri ini sudah melampaui titik kulminasi dan mulai menurun. Selain itu, meningkatnya taraf dan pola hidup bangsa kita menyebabkan konsumsi BBM terus meningkat.

Meski demikian, dalam dinamika pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi negeri kita ini, terkadang kita terpaksa melewati saat-saat memprihatinkan.

Sementara itu, harian *Suara Merdeka* lebih menyoroti masalah pendidikan gratis dan kestabilan ekonomi. Banyak calon walikota/bupati yang dalam kampanyenya menjanjikan sekolah gratis bagi masyarakat.

Komitmen para calon pemimpin itu perlu dihargai. Tetapi prakteknya tidak mudah. Pengerian sekolah atau pendidikan gratis berarti bebas dari kewajiban membayar SPP, tetapi tidak menghilangkan pungutan-pungutan lain.

Di tengah terbatasnya anggaran pendidikan dari pemerintah, perlu dipikirkan dari mana dana untuk sekolah gratis itu. Jangan sampai hal itu hanya menjadi pernyataan politis belaka yang sama sekali tidak menjawab persoalan secara riil di lapangan.

Dari segi ekonomi, dalam tajuknya *Suara Merdeka* juga mengusulkan agar kestabilan moneter perlu dimonitor lebih cermat. Ibarat mengantisipasi keamanan, sekarang mungkin harus 'Siaga 1.' Sehingga masalah psikologis masyarakat atas kasus-kasus seperti kelangkaan BBM bisa teratasi.

Selain masalah BBM, ekonomi dan pendidikan, rupanya masalah lingkungan pun menjadi sorotan. *Investor Daily* dalam tajuknya yang berjudul "Kehancuran Lingkungan Kian Menakutkan", mengkritik Menteri Lingkungan Hidup yang sibuk mengumumkan industri-industri pencemar lingkungan. Ironisnya, sanksinya hanya sekedar diperingatkan atau pihak KLH merekomendasikan agar perbankan tidak mengucurkan kredit pada perusahaan tersebut. Padahal, pencemaran lingkungan juga merupakan kejahatan yang dampaknya tidak kalah dahsyat dibandingkan kejahatan ekonomi dan politik.

Investor Daily juga menulis bahwa tugas penyelamatan lingkungan tidak hanya di tangan KLH, melainkan juga pemerintah daerah, LSM dan semua warga negara ini. Berbagai upaya penyelamatan lingkungan harus segera dilakukan sebelum semuanya terlambat.■

Krisis



Anak Tukang Besi Buyarkan Prediksi

Prediksi hampir semua pengamat dan media massa dunia meleset. Mahmoud Ahmadinejad memenangkan kursi presiden Iran, mengalahkan Akbar Hashemi Rafsanjani.

Terpilihnya anak tukang besi, Ahmadinejad, sebagai presiden Iran keenam pasca kejatuhan Shah Reza Pahlevi tahun 1979, membuyarkan prediksi hampir semua pengamat dan media massa dunia. Majalah mingguan terkemuka dunia, *Time* (edisi 13 Juni) menampilkan laporan sampul bergambar Rafsanjani dalam potret diri yang menonjol, dan berjudul, *Kembalinya Rafsanjani*. Ternyata, pemilih Iran lebih memilih Ahmadinejad (49), menengalkan presiden Iran delapan tahun lalu, Rafsanjani (70).

Tentang Rafsanjani yang dijagokannya, *Time* memberi catatan penting di halaman sampul: "Pria yang agaknya akan menjadi presiden Iran ini berbicara tentang masalah demokrasi dan nuklir. Dapatkah dia dipercaya?"

Ternyata prediksi *Time* meleset. Hasil resmi *Setote Intikhabot Kesywar* (Pelaksana Pemilu Iran) yang dikutip oleh koresponden *Koran Tempo* di Teheran, Mujtahid Hashem (26/6), menunjukkan Ahmadinejad meraih 16,9 juta suara (61 persen). Sedangkan Rafsanjani hanya memperoleh 9,8 juta suara (35 persen). Ini hasil perhitungan

akhir sampai pukul 11.00 waktu setempat.

Ahmadinejad yang dianggap sebagai pemimpin garis keras, menjungkir-balikkan prediksi banyak pengamat dan media massa dunia yang lebih menjagokan Rafsanjani. Ketua Parlemen Iran, Ghulam Ali Hadad, tidak sependapat jika dikatakan kemenangan

Rafsanjani, politisi yang malang melintang 20 tahun di dunia politik, dikalahkan oleh Ahmadinejad yang belum dua tahun duduk di kursi Walikota Teheran. Ahmadinejad akan menggantikan Presiden Mohamad Khatami yang telah berkuasa selama dua masa jabatan. Pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, lewat seruannya di televisi, mengingatkan rakyat Iran agar tidak merayakan kemenangan calon mereka di tempat-tempat ramai untuk mencegah bentrokan. Seruan ini bisa diartikan sebagai restu Khamenei atas kemenangan Ahmadinejad.

Majalah terkemuka *Tempo* (edisi 27 Juni-3 Juli) menampilkan kemenangan Admadinejad di dalam laporan cukup menonjol di rubrik Luar Negeri. Iran baru tuntas memasuki fase terakhir dalam sejarahnya: memilih presiden dalam dua putaran. Peristiwa ini tak pernah terbayangkan ketika Republik Islam Iran berdiri 26 tahun lalu, demikian tulis *Tempo*.

Ahmadinejad yang akan memimpin Iran empat tahun ke depan, harus mencuci setumpuk "piring kotor" berupa defisit anggaran dan polarisasi reformasi-konservatif.

(Sh)



Ahmadinejad sebagai simbol kemenangan kelompok "ekstrem" atas kelompok "moderat" yang dipimpin Rafsanjani. "Ini kemenangan pelayanan kepada rakyat untuk kesejahteraan," Ghulam sebagaimana dikutip oleh koresponden *Koran Tempo*.

Mahmoud Ahmadinejad

- Lahir di Garmsar, dekat Teheran pada tahun 1956. Ayahnya seorang pandai besi.
- Bergabung dengan Pengawal Revolusi dan turut mendirikan organisasi mahasiswa yang mengabdikan alih Kedutaan Besar AS pada tahun 1979.
- Pernah ikut dalam operasi rahasia di Irak.
- Doktor bidang transportasi dari Universitas Teheran dan pernah mengajar di almaternya.
- Walikota Teheran. Dia menutup restoran-restoran cepat saji di Ibukota, mewajibkan pegawai Pemda pria memelihara janggut dan mengenakan baju lengan panjang.
- Polpulis yang hidup sederhana dan kukuh dalam melawan korupsi. Pada situs pribadinya id menyebut diri sebagai *Mardomyar* (Sahabat Rakyat).
- Berjanji akan membagikan kekayaan Iran

kepada kaum duafa.

- Mendapat dukungan dari imam konservatif dan kelas pekerja.
- Membela program nuklir Iran.
- Hubungan dengan Amerika Serikat bukan prioritas.

Akbar Hashemi Rafsanjani

- Lahir dari keluarga petani di tenggara Iran pada 1934, tapi belakangan dapat hidup sejahtera berkat bisnis keluarga.
- Belajar teologi kepada Ayatullah Khomeini di kota suci Qom. Beberapa kali dijebloskan ke penjara di masa Shah Iran Reza Pahlevi berkuasa.
- Menjabat komandan angkatan bersenjata saat perang Iran-Irak (1980-1988), ketua parlemen (1980-1989), presiden Iran dua periode (1989-1997), Ketua Majelis Kebijakan (2002).

- Tokoh konservatif pragmatis, bagian dari lingkaran kekuasaan kaum imam tapi berpandangan lebih luas, konsisten menyuarakan reformasi secara moderat.
- Mendukung kebebasan perempuan yang lebih besar antara lain kebebasan menggunakan jilbab tanpa harus menutup seluruh tubuh dan boleh berkerudung warna-warni. Anak perempuan Faezeh Hashemi adalah aktivis hak-hak perempuan.
- Didukung kelas menengah-atas (intelektual dan pengusaha) yang lelah dengan isolasi Iran. Dia tokoh favorit kalangan yang menginginkan kebebasan sosial yang lebih besar di Iran.
- Dalam isu nuklir siap bernegosiasi dengan AS dan Barat.
- Keras terhadap AS tapi tetap merintis hubungan dengan negara-negara barat yang lain. (BBC, NYT)

Kaleideskop Berita Indonesia:

8 April 2005: Tertangkap Basah Menyuaip.

Anggota KPU Pusat, Mulyana W. Kusuma, tertangkap tangan penyidik KPK sedang berusaha menyuaip auditor BPK, Khairiansyah Salman, di Hotel Ibis, Jakarta Barat. Hari itu juga dosen kriminologi UI dan aktivis LSM pemantau pemilu ini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta

8 April 2005: Semua anggota KPU Terima Dana Taktis.

Kepala Biro Keuangan KPU, Hamdani Amin, usai menjalan pemeriksaan selama 10 jam oleh penyidik KPK, menyebutkan masing-masing anggota KPU menerima dana taktis sebesar 150 ribu dolar AS (sekitar Rp 1,008 miliar).

28 Mei 2005: Bom Meledak di Poso.

Dua buah bom meledak di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menewaskan 21 orang dan melukai 53 orang.

31 Mei 2005: Imunisasi Polio Massal.

Tahap pertama imunisasi polio massal dilaksanakan terhadap 6,4 juta anak di bawah lima tahun di tiga provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

1 Juni 2005: KBRI Ditorer Antraks.

Kantor KBRI di Canberra, Australia, mendapat kiriman paket misterius, yang dicurigai berisi bakteri berbahaya. KBRI terpaksa diisolasi untuk sementara waktu. PM Australia, John Howard, menyebutkan, kiriman itu ditujukan sebagai "balasan" atas vonis 20 tahun penjara terhadap Schapelme Corby, oleh Pengadilan Negeri Denpasar, pekan sebelumnya. Corby terbukti menyelundupkan 4,2 kilogram mariyuana.

3 Juni 2005: Nyali Aparat Memberantas Korupsi.

Ketua PP Muhammadiyah, Achmad Syafi'i Ma'arif menyebutkan, belum banyak aparat yang mempunyai nyali untuk memberantas korupsi. Ma'arif menyebutkan hal itu sesaat sebelum membuka *soft opening* Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah, di Surabaya.

3 Juni 2005: Direksi Peruri Disangka Korupsi.

Polda Metro Jaya, menetapkan tiga anggota direksi Perum Peruri sebagai tersangka tindak pidana korupsi, yang diduga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 miliar. Mereka adalah Direktur Utama M. Koesnan Martono, Direktur Logistik Marlan Arif, dan Direktur Pemasaran Suparman.

6 Juni 2005: Sebagian Jakarta Padam.

PT PLN mulai 6 Juni melakukan pemadaman secara bergilir di Jakarta dan beberapa daerah lain, karena sistem elektrifikasi Jawa-Bali kehilangan daya sebesar 1.160 megawatt.

6 Juni 2005: Ba'asyir Batal Bebas.

Amir Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir, terpidana kasus terorisme, batal bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, meski masa penahanannya sudah habis pada 4 Juni, dan semestinya sudah bisa keluar dari penjara 6 Juni.

7 Juni 2005: Taufik Gagal Dibawa Paksa.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta gagal membawa paksa Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, Mohamad Taufik, dari Rumah Sakit Agung, Jakarta Selatan, padahal Kejaksaan sudah mengeluarkan perintah penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi ini.

8 Juni 2005: Ledakan Bom.

Sebuah bom meledak di rumah kontrakan Abu Jibril, di Witana Harja, Pamulang, saat dia menjadi imam salat subuh di Masjid Al-Munawwarah. Tak ada yang terluka. Polisi menduga peledakan bom dilakukan oleh kelompok adventur dan kelompok yang bersifat lokal.

9 Juni 2005: Kesejahteraan Petani.

Mantan Menteri Pertanian, Sjarifuddin Baharsjah, menyebutkan, jumlah petani yang lebih dari 25 juta orang dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,3 hektar, tidak akan berpengaruh pada kesejahteraan petani.

9 Juni 2005: Medali Emas Lomba Fisika.

Dua pelajar Indonesia, Anike Boawire, siswa SMAN 1 Serui, Papua, dan Dhina Susanti, siswa SMAN 3 Semarang, memperoleh medali emas dalam perlombaan "First Step to Nobel Prize in Physics" ke-13, di Warsawa, Polandia. Anike menang untuk metodenya tentang 'Gerakan Sembarang (chaos) pada Pegas yang Diputar Horisontal', sedangkan Dhina untuk 'Model yang Menjelaskan Gerakan Kok Badminton saat Servis, Lob, atau Smes'.

11 Juni 2005: Operasi Kembar Siam.

Tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo berhasil memisahkan bayi kembar siam putri pasangan Nurlela dan Mulyadi, setelah enam jam operasi. Kondisi kedua bayi kritis.

11 Juni 2005: SMS Presiden SBY.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membuka nomor SMS langsung 0811.109.949, kalau masyarakat merasa tidak dipedulikan oleh pejabat, tidak pernah didatangi, atau masalahnya tidak bisa dipecahkan. Presiden menyebutkan handphonenya itu terbuka 24 jam, saat berlangsung temu wicara acara Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2005, di Purwakarta, Jawa Barat. Karena ponsel Presiden tualat, sebab, tidak kuat menampung ribuan SMS setiap hari secara bersamaan, belakang nomor layanan SMS SBY diubah menjadi 9949.

12 Juni 2005: Karir Tyson Berakhir.

Mike Tyson terkapar setelah dijatuhkan petinju Irlandia, Kevin McBride. Kekalahan ini memaksa Tyson mengakhiri karir panjang bertinjunya.

13 Juni 2005: Vonis Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memvonis tiga mantan direktur Bank Indonesia (BI) masing-masing 1,5 tahun penjara, terkait kasus korupsi penyimpangan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mereka Hendro Budiyo dengan kerugian negara Rp 9,79 triliun, Heru Supratomo kerugian negara 6,36 triliun, dan Paul Sutopo kerugian negara Rp 2,02 triliun.

14 Juni 2005: Raja Pop Jacko Bebas.

Dewan Juri Pengadilan Santa Maria, California, AS, menyatakan raja pop dunia Michael Jackson tidak bersalah atas gugatan yang mendakwanya melakukan pelecehan seksual terhadap bocah 13 tahun pengidap kanker.

14 Juni 2005: Manusia Tercepat Dunia.

Sprinter asal Jamaika, Asafa Powell, mengukuhkan diri sebagai manusia tercepat baru dunia, setelah berhasil memecahkan rekor dunia sekaligus menjuarai lomba lari nomor 100 meter dalam kejuaraan Super Grand Prix di Athena, Yunani. Catatan waktu yang ditempuhnya 9,77 detik.

14 Juni 2005: Dokumen Skenario Membunuh Munir.

Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya aktivis HAM Munir, menemukan dokumen berisi empat skenario pembunuhan Munir. Keempat skenario itu adalah, pertama dilakukan kecelakaan di atas mobil, kedua dengan menyantet Munir, ketiga menggunakan orang dalam kantor Kontra/Imparsial untuk memasukkan racun ke dalam makanan Munir, dan keempat meracuni di atas pesawat yang ditumpanginya Munir. Ketua TPF Munir, Brigjen Pol Marsudhi Hanafi, menyebutkan, pembuat skenario dalam dokumen itu adalah sebuah institusi intelijen di negara ini.

14 Juni 2005: Skandal Dana Abadi Umat (DAU).

Tim Penyidik Mabes Polri memblokir rekening Dana Abadi Umat (DAU) dan dana kesejahteraan karyawan Departemen Agama, senilai Rp 680 miliar, setelah tim penyidik bersama tim audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi penyelenggaraan ibadah haji di Jeddah, Arab Saudi.

15 Juni 2005: Taufik Kamil Tersangka DAU.

Penyidik menetapkan mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Taufik Kamil, sebagai tersangka penyelewengan sisa dana haji.

16 Juni 2005: Vonis Heboh Nurdin Halid.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan ketua Koperasi Distribusi Indonesia (KDI), Nurdin Halid, dari semua dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), yang sebelumnya menuntut Ketua Umum PSSI itu hukuman 20 tahun penjara.

16 Juni 2005: Sayyid Aqil Tersangka Baru DAU.

Mantan Menteri Agama Sayyid Aqil Husein Al-Munawar, ditetapkan sebagai tersangka baru korupsi sisa dana haji. Sayyid dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, pasal tentang upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

16 Juni 2005: Sekolah Gratis SD-SMP.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, menyatakan, pihaknya akan membebaskan biaya sekolah anak SD dan SMP, sehingga pada 2008 semua anak dapat berkesempatan mengenyam pendidikan hingga sembilan tahun.

17 Juni 2005: Taufik Kamil Ditahan.

Taufik Kamil mulai ditahan di ruang tahanan Mabes Polri sejak pukul 21.00 WIB. Hasil pemeriksaan BPKP mengungkapkan, kerugian negara karena penyelewengan dan penyelenggaraan haji 2001-2005 mencapai Rp 700 miliar.

19 Juni 2005: Tiga Mantan Menteri Siap Diperiksa.

Tiga mantan Menteri Agama, Tarmizi Taher, Malik Fadjar, dan Tolchah Hasan, menyatakan siap diperiksa dalam kasus dugaan penyimpangan dana haji.

20 Juni 2005: Mantan Direktur Jamsostek Ditahan.

Andi Rahman Alamsyah, dijadi tersangka korupsi senilai Rp 250 miliar. Malamnya ia segera pula ditahan di Mabes Polri.

20 Juni 2005: Hendro Mengheningkan Cipta.

Mantan Kepala BIN, A.M. Hendropriyono, mengheningkan cipta untuk almarhum Munir saat bertemu dengan tim kasus Munir DPR di ruang Komisi III DPR.

21 Juni 2005: DPR Menerima Aliran DAU.

Setelah penyidik memeriksa 41 orang saksi, Tim Penyidik Mabes Polri akan menelusuri dana haji yang mengalir ke DPR.

22 Juni 2005: Tiga Mantan Direktur BI Masuk Bui.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Salman Maryadi, langsung memasukkan tiga mantan direktur Bank Indonesia terpidana kasus BLBI, yang telah divonis masing-masing 1,5 tahun penjara, Hendrobudiyo, Heru Supratomo, dan Paul Sutopo Tjokronegoro, ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, sejak pukul 22.00 WIB sehari setelah menerima putusan Mahkamah Agung.

23 Juni 2005: Sayyid Aqil Ditahan.

Mantan Menteri Agama Sayyid Aqil Husein al-Munawar, dibebaskan ke tahanan Mabes Polri, pukul 20.15 WIB, setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam.

23 Juni 2005: Puteh Dijemput Paksa.

Abdullah Puteh, terpidana 10 tahun penjara kasus pengadaan helikopter di Nanggroe Aceh Darussalam, akhirnya berhasil dijemput paksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari RS Husni Thamrin, Jakarta.

24 Juni 2005: Hukuman Cambuk Pertama di NAD.

Hukuman cambuk, sebagai bagian dari hukum syariat Islam, yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), mulai dilaksanakan untuk pertama kali terhadap 26 orang penjudi, di halaman Masjid Agung Bieureun, Aceh, disaksikan dua ribuan pasang mata umat.

24 Juni 2005: RUPS Telkom Dirut Baru.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Telkom Tbk, berhasil memilih Arwin Rasyid, mantan wakil direktur utama Bank BNI, sebagai direktur utama baru PT Telkom periode 2005-2010, menggantikan Kristiono. Ikut terpilih, Wakil Dirut Garuda Sugardo, Direktur Keuangan dan Investasi Rinaldi Firmansyah, Direktur Infrastruktur dan Jaringan Abdul Haris Matondang, Direktur Korporasi dan Wholesale Arie Yahya, dan Direktur SDM dan Pengembangan John Welly.

25 Juni 2005: Rekonstruksi Aceh 28 miliar dolar AS.

Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias, Kuntoro Mangkusubroto, menyebutkan, dana yang dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi Aceh serta Pulau Nias, yang pada 26 Desember 2004 luluh lantak akibat gempa berkekuatan 9,3 pada skala Richter disertai gelombang badai tsunami, mencapai 28 miliar dolar AS. Dana itu 1,9 miliar dolar AS berasal dari sumbangan negara-negara donor, lembaga swadaya masyarakat nasional dan asing, serta perusahaan-perusahaan, sisanya 900 juta dolar AS berasal dari pemerintah Indonesia.

29 Juni 2005: BPK Mengaku Kebagian DAU.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Anwar Nasution, mengakui BPK menerima setoran dari Departemen Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

29 Juni 2005: Melayat Cak Roes.

Mantan Presiden Soeharto, didampingi putri tertuanya, Tutut, melayat pejuang kemerdekaan Roeslan Abdulgani di rumah duka, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu 29 Juni 2005.

29 Juni 2005: Demo Menolak Perpres.

Ribuan petani, didukung berbagai elemen lain, secara bergelombang melakukan unjuk rasa menolak Peraturan Presiden Nomor 36 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, di Istana Merdeka, Gedung MPR/DPR, dan Mahkamah Agung.

Hukum Cambuk di Serambi

Majalah *Forum* (Edisi No.9/29 Juni 2005) menyajikan tulisan tentang hukum cambuk di Kabupaten Biereuen, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Topik ini diangkat *Forum* karena untuk pertama kali dilakukan di negeri 'Serambi Mekah'. Penerapan hukum cambuk ini adalah bagian dari penegakkan syariat Islam yang sudah diberlakukan di NAD berdasarkan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD.

Pelaksanaan hukuman ini mengacu pada qanun (Perda 13/2003). Menurut qanun, ada tiga perbuatan yang bisa dijatuhi hukum cambuk: maisir (judi), khalwat (zinah), dan khamar (minuman keras). Kali ini, para pelaku judi yang dihukum cambuk.

Forum menulis, hukuman cambuk itu menimbulkan silang pendapat. Satu hal yang dikritisi adalah hukuman ini tidak menyentuh koruptor.

• **"Tauke-Tauke Medan"** adalah judul *cover story* majalah *Swa sem-bada* (Edisi No.13/XXI/23 Juni-6 Juli 2005). Majalah ekonomi ini secara khusus menelusuri Apa dan Siapa, Jaringan, Jatuh-Bangun, dan Kekuatan Bisnis para pengusaha keturunan Tionghoa (tauke) di Medan yang terkenal ulet, pekerja superkeras, serta pemilik jaringan perkawanan yang amat solid, tapi tertutup.

• Bagi *Swa*, dengan segala plus-minusnya, banyak hal yang bisa dipelajari dari sepak terjang para tauke dari Medan tersebut. Setidaknya, ada 36 profil pengusaha ditampilkan *SWA*.

• Dengan judul **"Dialog dengan GAM"**, majalah *Tempo* (edisi 13-19 Juni 2005) menyoro dialog antara Pemerintah dan GAM di Helsinki, Finlandia. Dialog yang belum tuntas ini menuai kritik dari kalangan DPR.

Permadi adalah salah seorang yang melontarkan protes keras. "Tak perlu dialog dengan GAM. Tumpas saja!" kata anggota Fraksi PDI-P itu.

Menteri Hukum & HAM, Hamid Awaluddin, salah satu anggota Delegasi RI berunding dengan GAM mengaku kedua pihak belum menandatangani kesepakatan resmi. Pembicaraan masih sekitar bentuk pemerintahan sendiri,

hal-hal politik, amnesti dan HAM.

Tempo juga menulis derita Supriono, seorang Pemulung yang membawa jenazah putrinya menelusuri jalan-jalan Jakarta karena tak punya uang untuk sewa ambulans dan biayai pemakaman. Peristiwa itu adalah sebuah ironi dari gemerlapnya kehidupan masyarakat ibukota.

• **"Korupsi Dana Haji"** yang melibatkan mantan Menteri Agama Said Agil Husein Al Munawwar dan Dirjen BIPH Depag Taufik Kamil diangkat sebagai laporan utama majalah *Gatra* (edisi No.32/25 Juni 2005). Dana haji yang diselewengkan mencapai Rp 700 miliar.

Gatra edisi ini juga mengulas empat skenario pembunuhan aktivis HAM, Munir, seperti disinyalir Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Brigjen Pol. Marsudhi Hanafi. Empat skenario itu: ditabrak, disantet, diracun di kantor, atau diracun di pesawat. Seperti diketahui, Munir tewas di dalam pesawat Garuda Indonesia yang membawanya dari Singapura ke Belanda, pada 7 September 2004.

• **"Pesangon Karyawan Texmaco."** Terlantarnya pembayaran pesangon kepada eks karyawan Texmaco disorot secara khusus oleh majalah *Trust* Edisi No. 38 (20-26 Juni). Total nilai uang pesangon untuk sekitar 11 ribu orang eks karyawan tersebut mencapai Rp 147 miliar.

PT Pengelola Perusahaan Aset (PPA) yang menerima tugas mengurus aset Perusahaan milik Marimutu Sinivasan ini sudah menolak aset-aset perusahaan

itu karena kalaupun dijual tidak akan cukup membayar pesangon karyawan. Texmaco diambil alih pemerintah — dulu melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)— karena punya utang macet mencapai US\$ 29 miliar.

"Strategi Baru Investasi Portofolio" menjadi berita induk majalah *Investor* (Edisi 7-27 Juni/No. 125/VII). Sesuai dengan judulnya, majalah bermoto 'Media Investasi&Keuangan' ini memaparkan rekomendasi dari sejumlah manajer investasi, seperti Abiprajadi



Mekah

Rijanto dan Achfas Achsien.

Pada penerbitan No. 125/VII ini, *Investor* juga mengangkut laporan tentang fenomena perang tarif antar-maskapai penerbangan akibat tidak terkendalinya kenaikan avtur. Sampai Mei 2005, di Indonesia ada 22 maskapai penerbangan reguler dan 37 maskapai sewa. Jumlah armada yang beroperasi mencapai 225 pesawat. Dapat disimak pula Wawancara Khusus dengan Dirut Bank Danamon, Sebastian Paredes.

- **Trauma Bankir BUMN** (*Info Bank* edisi No.315/Juni 2005). Terkuaknya kasus

kredit macet di Bank Mandiri yang dicurigai berbau kolusif dan merugikan keuangan negara, serta agresivitas Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus-kasus kredit macet di bank 'plat merah' itu membuat trauma para bankir BUMN untuk mengambil risiko penyaluran kredit. Kini, kredit macet kembali menjadi bahaya laten perbankan dan tidak bisa dianggap main-main.

Info Bank juga membeberkan sejumlah kelemahan bank milik pemerintah yang harus dibenahi. Misalnya, pertumbuhan angka aktiva, pangsa kredit, dan pengimpunan dana pihak ketiga.

- **Illegal Logging Tetap Marak.** Majalah *Konstan* (edisi Juni 2005) membuat laporan tentang jalan pintas yang ditempuh Presiden SBY memberantas korupsi dan praktik pembalakan hutan liar (illegal logging).

Kendati pemerintah telah menggelar Operasi Hutan Lestari (OHL) II tapi praktik illegal logging ini tetap marak. Kerugian negara akibat pembalakan liar ini mencapai Rp 180 triliun.

Menurut *Konstan*, ada petunjuk kuat pelaku illegal logging mencuci uang hasil penjualan kayu di luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura.

- **DPR Anggarkan Kenaikan Gaji.** Majalah *File* (Finansial & Legislatif) No.3/1/2005 menyoroiti kegiatan 'rumah tangga' Dewan Perwakilan Rakyat. *File* menyebutkan, ada dua sisi paradoksal dari kepentingan anggota Dewan. Mereka saling berseteru dengan alasan membela kepentingan rakyat yang dirugikan oleh kenaikan BBM. Tapi, di sisi lain, mereka diam-diam menganggarkan kenaikan gaji Rp 15 juta per orang yang juga harus dibayar rakyat.

- **Dunia Arsitektur.** Majalah *Asri* (edisi Juni 2005) mengulas tema Kamar Mandi. Dewasa ini, kamar mandi bukan sekadar berfungsi sebagai tempat membersihkan tubuh dan berendam. Tapi lebih dari itu, juga bagian estetika bahkan gengsi dari sebuah rumah. ASRI menyajikan berbagai corak dan tipe kamar mandi.

Asri juga menyuguhkan obyek wisata di Lombok, NTB. Selain memiliki kawasan wisata pantai yang elok seperti di Senggigi, wisata alam pegunungan berupa air terjun dan sumber mata air, juga wisata budaya seperti upacara adat di Senaru dan Sade.

- **Peraih Kalpataru.** Majalah *Kartini* edisi No. 2142 (23 Juni-7 Juli 2005) menyajikan kisah para peraih Kalpataru yang mengantarkan mereka

bertemu Presiden SBY di Istana Negara.

Banyak kisah menarik penuh hikmah di balik perjuangan para penyelamat lingkungan hidup itu. Ada yang rela miskin demi lingkungan, ikhlas membujang, bahkan ada yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan hutan.

Pada edisi ini, *Kartini* menyajikan pula kisah nyata dan langka seorang wanita pemilik tinggi badan 74 cm yang melahirkan bayi dengan panjang 41 cm dan berat 1.653 gram. Wanita itu, Indrawati (31), melahirkan bayinya melalui operasi caesar di RSAB Harapan Kita, Jakarta.

- Dengan **'Surat untuk Bang Yos'**, majalah *Femina* edisi No.25/XXXIII (23-29 Juni 2005) mempertanyakan sejauh mana kepedulian Gubernur Sutiyoso terhadap kaum perempuan warga ibukota, karena begitu banyak masalah yang mereka harus hadapi dalam keseharian hidup di Jakarta.

Berkaitan HUT ke-478 kota Jakarta, *Femina* mengajak pembaca menelusuri kawasan Cikini-Gondangdia. Kawasan ini adalah "surga" makanan enak, mulai dari resto, toko roti dan cake tempo dulu sampai resto masa kini dan fenomena warung tenda.

- **Penyakit Lupus.** Majalah *Chic* edisi 8-21 Juni 2005 menurunkan features tentang kisah perjuangan seorang wanita yang menderita penyakit Lupus. Semangat yang tinggi untuk tetap hidup membuat Ledy Soekardi mampu mengatasi penyakitnya. Dukungan suami serta dua orang buah hatinya membuat semangat hidupnya tetap menyala.

Berbagai tips bagaimana melakukan perjalanan ke luar negeri secara hemat juga diketengahkan *Chic* pada edisi ini.

- **Asyiknya Menjadi Ayah.** Bagaimana asyiknya menjadi seorang ayah, dituturkan oleh majalah *Ayahbunda* Edisi No.13 (23 Juni-6 Juli 2005). Juga bagaimana membuat si bayi makin cerdas lengkap dengan tips pendidikan. Pada rubrik kesehatan, majalah ini menyediakan forum konsultasi pakar ginekolog, dokter anak, dan psikologi.

Pakar kebidanan pada edisi ini menjawab pertanyaan sejauh mana pengaruh penyakit hipertiroid terhadap janin.

Pakar kedokteran anak menjawab kekhawatiran seorang ibu terhadap penggunaan obat bebas untuk anak. Dan, pakar psikologi menanggapi pertanyaan mengenai pemilihan sekolah TK agar si anak tidak merasa terpaksa ke sekolah. ■ (SP/AF)



Menakar Kekuatan Pra Piala Dunia

Piala Dunia Jerman 2006 semakin dekat. Delapan tim terbaik ambil bagian dalam Piala Konfederasi Jerman 2005. Bintang-bintang baru pun bermunculan.

Harapan Jerman kandas. Tim tuan rumah kandas di semi final, kalah 2-3 dari pemenang Piala Dunia 2002, Brasil. Jerman yang dikenal sebagai salah satu raksasa sepakbola dunia, dipercaya menjadi tuan rumah dua turnamen besar dalam waktu berdekatan; Piala Konfederasi 2005 dan Piala Dunia 2006. Sudah tentu selaku tuan rumah, pelatih 'tim panser' Jerman, Juergen Klinsman dituntut menyiapkan timnya sebaik mungkin. Namun uji coba pertama gagal.

Klinsman menggantikan rekannya Rudi Voler yang mundur lantaran gagal mengantarkan tim Jerman ke tangga juara Eropa 2004 di Portugal.

Sebenarnya bagi Klinsman, Piala Konfederasi, merupakan gelanggang uji coba keberhasilannya, tetapi apa daya, tim yang diasuhnya ditundukkan oleh sang juara Brasil. Tadinya Jerman berharap bertemu Brasil tidak begitu cepat, paling tidak di final. Tetapi nasib menentukan lain.

Di partai final Piala Dunia 2002 di Stadion Yokohama, Jepang, tim Jerman harus mengakui keunggulan tim Brasil, kalah 0-2. Di semi final Piala Konfederasi, tim Jerman ditundukkan Brasil dengan skor 3-2. Maka lengkaplah kekalahan Jerman dari Brasil memasuki Piala Dunia 2006.

Tim panser Jerman, meski tampil penuh semangat, ternyata tak mampu menundukkan tim Brasil. Kapten Michael Ballack pun angkat bicara atas kekalahan timnya. "Semangat saja rupanya tak mampu membawa kami melaju ke final. Brasil tim yang paling baik saat ini," kata Ballack. Awalnya kedua tim memang bertekad membawa obsesi masing-masing. Di satu sisi Jerman selaku tuan rumah dan Brasil sebagai juara dunia. Ternyata hasil

akhir menunjukkan bahwa Brasil lebih bisa mengatasi tim Panser meski didukung oleh supporter fanatiknya.

Tim Brasil, meski tertatih-tatih di babak awal, dikalahkan Meksiko 0-1 dan ditahan imbang oleh wakil Asia, Jepang, 2-2, melangkah ke semi final lantaran kemujuran selisih gol dengan Jepang. Namun pelatih Carlos Alberto Parreira merasa gembira dengan perkembangan timnya. Mereka bahkan berhasil menundukkan tuan rumah di tengah bahana dukungan puluhan ribu suporternya. Brasil maju ke final, melawan tim Argentina yang mengalahkan Mexico di semi final pada kesempatan adu penalti.

Andalan Brasil, Ronaldo yang bermain di klub Real Madrid, Spanyol, memang absen, tetapi Parreira tak gundah. Dia malah menemukan format baru dengan munculnya para pemain lapis kedua, seperti Adriano, Robinho dan Juninho. Parreira tetap menjatuhkan pilihan utama pada dua pemain pilar, Ronaldinho yang bermain di Barcelona dan Kaka yang bergabung dengan AC Milan. Pada Piala Dunia 2006, Parreira tidak lagi bergantung pada Ronaldo.

Argentina, meski tertatih sepanjang 90 menit pertandingan dan kebobolan 0-1 pada perpanjangan 15 menit pertama, berhasil menyamakan angka 1-1 pada menit-menit terakhir perpanjangan waktu kedua. Tim tango ini lolos dari lubang jarum, melangkah ke final

bersama Brasil. Bisa jadi partai final Piala Konfederasi ini terulang di Piala Dunia nanti.

Memang di turnamen Piala Konfederasi sejumlah pemain senior absen, tetapi para pelatih telah melahirkan bintang-bintang muda yang cukup menjanjikan. Di kubu Argentina muncul nama Juan Roman Riquelme, yang bisa berperan sebagai inspirator tim. Riquelme muncul bersamaan dengan bintang baru Brasil, Adriano, Juninho dan Robinho. Riquelme melejit setelah seniornya Juan Sebastian Veron absen. Boleh dibilang dengan munculnya beberapa muka baru, Piala Konfederasi bukan sekedar ajang pemanasan, melainkan juga adu gengsi dan pencarian format bagi pelatih tim-tim yang lolos ke Piala Dunia 2006.

Piala Konfederasi memang belum mewakili semua tim terbaik dunia saat ini. Tapi turnamen tersebut, paling tidak menjadi bahan perbandingan bagi tim-tim yang akan lolos ke Piala Dunia 2006.

Riquelme (nomor punggung 8) yang menempati posisi gelandang menyerang, dengan penampilannya yang menawan, langsung didaulat sebagai pengatur serangan atau *playmaker* oleh pelatih Argentina, Jose Pekerman. Ternyata, Pekerman tidak salah pilih dengan menunjuk pemain yang memperkuat Villarreal (Spanyol) ini sebagai jenderal lapangannya.

Dialah yang menjadi inspirasi ke-



kuatan tim *tango* selama Piala Konfederasi. Pemain kelahiran Buenos Aires, Argentina, 24 Juni 1978 ini pun, berhasil dua kali dinobatkan sebagai *Budweiser Man of the Match* atau pemain terbaik dalam setiap pertandingan.

Predikat ini disandang Riquelme setelah Argentina menahan tuan rumah Jerman 2-2 pada pertandingan ketiga Grup A di Nuremberg, Selasa (21/6). Predikat *playmaker* disandanginya ketika Argentina mengalahkan Tunisia 2-1 di partai pertama.

Pemilihan pemain terbaik pada Piala Konfederasi itu juga tidak sembarangan. Penilaiannya dilakukan FIFA *Technical Study Group* yang salah satu anggotanya adalah mantan bintang sepakbola asal Kolombia, Francisco Maturana.

Apa komentar sang penilai? "Dia bermain sangat luar biasa. Kontrolnya di dalam mengatur tempo pertandingan sangat bagus. Jika saya ditanya siapa pemain terbaik hari ini, saya akan menjawab hanya satu orang, yaitu Riquelme. Bersama dia, Anda bisa mendapat hiburan kelas tinggi," kata Maturana seperti dikutip *fifa.com*.

Lalu bagaimana komentar Riquelme? "Ini suatu hal yang sangat membanggakan bagi saya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana memberikan gelar juara bagi Argentina," katanya. Boleh jadi ini sebuah obsesi Riquelme dan rakyat Argentina. Pasalnya, sudah 12 tahun terakhir ini tim *tango* tidak mendapatkan piala apa pun.

Boleh jadi turnamen Piala Konfederasi merupakan mimpi buruk bagi tim Yunani, pemegang gelar juara Piala Eropa tahun 2004. Keperkasannya Yunani di Piala Eropa sirna di arena Konfederasi. Ketika itu, tim Yunani dengan pola permainan bertahan, berhasil memporakporanda strategi tim-tim elite Eropa lainnya. Namun tidak dengan laga Konfederasi. Tim Yunani harus bertekuk lutut dari Brasil dengan skor 0-3, 0-1 dari Jepang, dan bermain imbang dengan Meksiko. Tim yang diasuh pelatih asal Jerman Otto Rehhagel, itu sedang dibuat mimpi buruk. Otto mengaku, dua pemain kunci timnya, Michalis Kapkis dan Giourkas Seitaridis, tidak bisa bermain sepanjang Piala Konfederasi karena cedera.

Namun apa pun yang terjadi di Piala Konfederasi, baru setengah dari perjalanan menuju Piala Dunia 2006. Siapa yang akan berjaya nanti, bola masih bundar. Artinya segala kemungkinan bisa terjadi.

(Bola, Kompas, Koran Tempo /Subhan)

Manusia Tercepat di Dunia

Asafa Powell memecahkan rekor dunia lari 100 meter di Yunani. Waktu yang dicapai 9,77 detik.

Istilah 'manusia tercepat di dunia' kerap kali kita dengar. Yang menjadi patokan adalah waktu tercepat yang dicapai pelari jarak pendek (100 meter), yang dihitung mulai dari garis start sampai garis finish.

Saat ini, predikat manusia tercepat di dunia disandang Asafa Powell. Sprinter asal Jamaika itu membuktikan dirinya sebagai manusia tercepat di dunia dengan menjuarai lari jarak 100 meter dalam kejuaraan Super Grand Prix di Athena, Yunani, Selasa (14 Juni 2005).

Sebagaimana diberitakan *Liputan6.com* (15 Juni 2005), pria kelahiran St Catherine, 22 tahun silam, ini berhasil memecahkan rekor dunia (world record) nomor lari 100 meter dengan catatan waktu yang fantastis: 9,77 detik. Keberhasilan itu sekaligus menempatkan Powell sebagai manusia tercepat di dunia.

Waktu yang dibuat anak bungsu dari enam bersaudara ini lebih cepat 0,01 detik dari rekor dunia sebelumnya atas nama Tim Montgomery yang dibuat di Paris, Perancis, pada September 2002.

Putra seorang pendeta ini, yang gagal tampil dalam kondisinya terbaiknya di Olimpiade Athena 2004 dan hanya berada di peringkat kelima, tak terbendung oleh para pesaingnya. Bahkan, dia mencapai garis finis sekitar satu meter di depan lawan terdekatnya.

Posisi kedua ditempati Aziz Zakari (Ghana) yang mencetak waktu 9,99 detik tertinggal sekitar tiga meter di belakang Powell. Tempat ketiga diraih Michael Frater, juga dari Jamaika.

Ironisnya, kejuaraan atletik di Athena ini juga pernah menghasilkan rekor dunia. Pelari AS, Maurice Greene, pada 16 Juni 1999 berhasil mencatatkan dirinya sebagai manusia tercepat di dunia dengan waktu 9,79 detik.

Maurice Greene -juara dunia tiga

kali, juara olimpiade, dan pemegang rekor dunia pada tahun 1999- adalah pelari yang Powell sangat idolakan.

Powell, yang memecahkan rekor dunia di nomor paling bergengsi ini di hadapan penonton yang memadati Stadion Olimpiade, bulan lalu memang sudah mulai menunjukkan kehebatannya. Ia berhasil membuat waktu terbaik musim ini dengan 9,84 detik.

"Saya bangga karena dalam penampilan kedua saya di Yunani ini saya bisa meraih hasil seperti ini. Luar biasa. Setelah Greene, saya juga berhasil memecahkan rekor dunia di tempat yang sama," tutur penikmat lagu rohani Lord Walk Beside Me ini.

"Saya selalu ingin tahu apa rasanya bisa memecahkan rekor dunia. Sekarang saya tahu jawabannya," kata Powell, seperti ditulis *Koran Tempo* (16/6). ■ (Anis Fuadi)

Rekor-rekor Manusia Tercepat di Dunia dari Masa ke Masa:

1. Donald Lippincott (AS), Stockholm, Swedia, 6 Juli 1912, 10,6 detik.
2. Charles Paddock (AS), 23 April 1921, 10,4 detik.
3. Percy Williams (Kanada), 9 Agustus 1930, 10,3 detik.
4. Jesse Owens (AS), Berlin, Jerman Timur, 20 Juni 1936, 10,2 detik.
5. Willie Williams (AS), 3 Agustus 1956, 10,1 detik.
6. Armin Hary (Jerman Barat), 21 Juni 1960, 10,0 detik.
7. Jim Hines (AS), Meksiko City, Mexico, 20 Juni 1968, 9,95 detik.
8. Calvin Smith (AS), Colorao, AS, 3 Juli 1983, 9,93 detik.
9. Carl Lewis (AS), Seoul, Korea Selatan, 24 Setember 1988, 9,92 detik.
10. Leroy Burrell (AS), New York, AS, 14 Juni 1991, 9,90 detik.
11. Carl Lewis (AS), Tokyo, Jepang, 25 Agustus 1991, 9,86 detik.
12. Leroy Burrell (AS), Lausanne, 6 Juli 1994, 9,85 detik.
13. Donovan Bailey (Kanada), Atlanta, AS, 27 Juli 1996, 9,84 detik.
14. Maurice Greene (AS), Athena, Yunani, 16 Juni 1999, 9,79 detik.
15. Tim Montgomery (AS), Paris, Perancis, 14 September 2002, 9,78 detik.
16. Asafa Powell (Jamaika), Athena, Yunani, 14 Juni 2005, 9,77 detik.



Kalimat "Gendong Mayat di KRL" terpampang besar di halaman muka Warta Kota, edisi Senin (6 Juni 2005). Itu adalah judul berita yang mengisahkan pengalaman getir seorang pemulung, Supriono (38), saat harus menggondong mayat anak perempuannya, Nur Khaerunisa (3), di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, untuk naik kereta rel listrik (KRL) menuju Bogor, karena tak punya uang untuk menyewa ambulans.

Setidaknya, ada sembilan media cetak dan elektronik nasional yang mengangkat kisahnya sebagai berita utama. Lebih-lebih Warta Kota yang menurunkan tulisan investigatif di halaman pertama secara berseri selama enam hari berturut-turut sejak kasus ini terkuak ke permukaan.

Berkat pemberitaan gencar itu, telepon redaksi Warta Kota dibanjiri ucapan simpati dan ungkapan empati para pembacanya untuk Supri, termasuk permintaan agar koran itu bersedia menampung sumbangan materi untuk diberikan kepada Supri.

Malahan, psikolog Sartono Mukadis yang dihubungi sebagai narasumber untuk mengomentari kisah Supri tak mampu membendung tangis kesedihannya, dan 'memaksa' koran itu agar mau menerima titipan uang Rp 500.000 darinya buat Supri.

Balada Supriono

Kisah ini berawal saat si kecil Nisa yang terserang Muntaber. Sang ayah mengaku hanya sekali mengobati Nisa ke Puskesmas Tebet sebab tak punya uang lebih, meski biaya hanya Rp

4.000.

"Saya sudah memberinya obat dan makan. Tapi, panas badannya terus naik," ujar bapak dua anak yang biasa tinggal di kolong perlintasan rel KA Cikini, dengan tatapan mata kosong kepada Pos Metro (6/6).

Mengira Nisa akan sembuh dengan sendirinya, ditambah lagi tak punya uang lagi untuk mengobatinya, Supri yang mengaku setiap hari berpenghasilan Rp 10.000 tetap membawa Nisa dan kakaknya, Muriski Saleh (6), dengan gerobak memulung kardus, gelas, dan botol plastik mulai dari Manggarai sampai Salemba. Nisa hanya bisa terbaring di dalam gerobak.

Singkat cerita, tanpa Supri menyadarinya, penyakit Nisa makin parah. Akhirnya, pada pukul 07.00 pagi, Minggu (5/6), Khaerunisa mengembuskan nafas terakhir di depan sang ayah dan sang kakak tercinta, tetap dalam posisi terbaring di dalam gerobak yang kotor itu, di antara tumpukan kertas, kardus, dan barang pulungan lain yang kotor dan berbau.

Di tengah ketermanguan telah kehilangan putri tercinta, Supri bingung dan panik apa yang mesti diperbuat. Duit di saku tinggal Rp 6.000. Tak cukup membeli kain kafan untuk Nisa, apalagi untuk menyewa ambulans.

'Kisah sedihnya di hari Minggu' yang diberitakan media massa nasional menuai berkah dan menyentil kepekaan sosial dan rasa kemanusiaan warga ibukota.



Kisah Tragis

Merasa tak memiliki uang untuk biaya pemakaman, Supri tak berani menceritakan ihwal kematian putrinya ke warga sekitar. Akhirnya, ia pun memutuskan membawa jenazah Nisa dengan gerobak tuanya menuju Stasiun Tebet. Niatnya, naik KRL menuju Kampung Kramat, Bogor, dan me-
ngebumikan Nisa di sana.

Rupanya, yang terbersit di benak pria asal Muntilan, Jawa Tengah, ini adalah bayangan harus mengeluarkan banyak uang jika mengubur Nisa di Jakarta.

“Saya diberitahu teman kalau biaya pemakaman di Jakarta bisa mencapai Rp 600.000,” ujar pemulung yang biasa mangkal di depan Gereja Isa Almasih, Cikini, Jakarta Pusat, dengan nada sedih kepada Pos Kota (6/6), memberikan alasan.

Lelaki berbadan kurus ini justru membawa jenazah putrinya dengan gerobak ke Stasiun KA Tebet. Supri berniat memakamkan Nisa di Kampung Kramat, Bogor, dengan menggunakan KRL.

Di sana Supriono mempunyai teman yang diharapkan bisa membantu memakamkan putri bungsunya itu. “Maksudnya langsung dibawa

ke Bogor. Saya bawa pake gerobak,” tutur Supriono dalam wawancara dengan Liputan6 SCTV, Kamis (9/6) petang.

Sesampainya di Stasiun Tebet, Supri lantas menggendong jenazah si kecil yang sudah membujur dingin, kaku, dan hanya dibungkus kain sarung dan kaus putih kumal itu.

Tapi niatan Supri ini gagal karena warga yang melihatnya curiga dan melaporkannya ke polisi. Sambil tetap menggendong jenazah Nisa, Supri pasrah ketika dibawa warga ke Mapolsekro Tebet.

Empat jam Supri diperiksa polisi. Ia ditanya seputar penyebab kematian anaknya. Sementara jenazah Nisa ditiptkan di Puskesmas dekat Mapolsekro Tebet. Perasaan Supri semakin gundah karena merasa dicurigai telah membunuh anaknya sendiri. Ia sempat ngotot meminta polisi mempercepat proses pemerik-
saan.

“Saya sempet ngotot pada polisi. Saya pikir kasihan mayat anak saya,” aku Supri, tersedu.

Untuk memastikan kematian putri Supri, polisi membawa jenazah Nurdengan ambulans ke Rumah Sakit Cipto Mangun-

kusumo (RSCM), Salemba, Jakpus, untuk diotopsi.

“Tak percaya dengan penjelasan Supriono bahwa anaknya benar-benar meninggal karena sakit, polisi malah mengharuskan si anak diautopsi. Jenazah itu dibawa ke RSCM. Namun sesampainya di rumah sakit itu, jenazah tak jadi diautopsi, sekali lagi, penyebabnya Supriono tak bisa membiayai semua itu,” tulis harian Suara Pembaruan (19/6), yang menurunkan berita, “Ketika Memakamkan Anak pun Sulit.”

Di RSCM Supriono menolak proses otopsi. Rencana itu pun batal. Sore, mayat Nisa baru bisa keluar dari RSCM. Supri merasa bingung.

Polisi dan rumah sakit tak terpikir untuk meminjamkan ambulans atau memberikannya sedikit uang. Lalu, ke mana jenazah ini akan dibawa?

Dibawa ke Bogor, sudah sore, sudah tak mungkin. Uang pun tak punya. Fardhu Kifayah belum dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, Supri terus membopong jenazah Nisa. Ia ingat Ibu Sri, tempatnya dahulu mengontrak di Manggarai bersama mantan istrinya, yang sudah diceraikannya beberapa waktu lalu.



“Dengan naik bajaj berongkos lima ribu rupiah pemberian orang-orang di sekitar RSCM, Supriono membawa Nisa,” tulis Asro Kamal Rokan dalam rubrik “Resonansi” harian Republika (15/6) berjudul ‘Supriono’.

Supri lantas membawa jenazah Nisa ke arah Manggarai. Tidak jadi ke Bogor, karena saat itu hari sudah sore. “Saya ke tempat kontrakan dulu di tempat Bu Sri,” tambah Supri.

Setiba di rumah Sri di kawasan Manggarai Utara VI, Supri akhirnya mendapat pertolongan para tetangga Sri, yang bermukim diperumahan terbilang kumuh itu.

Semula Supri meminta bantuan Sri untuk ongkos perjalanan ke Bogor, untuk memakamkan Nisa. Tapi, atas saran Sri, jasad gadis kecil itu akhirnya dikebumikan esok harinya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo Blok A5, Casablanca, Jaksel.

Semua biaya pemakaman Nisa, mulai dari biaya kafan dan tetek-bengek lain sebesar Rp 250.000 sampai biaya kepada Dinas Pemakaman Rp 350.000, berasal dari patungan warga RT08/RW01 Manggarai Utara VI yang jatuh empati kepada Supri.

Berkah

Berkat pemberitaan gencar dari media massa nasional, hanya dalam hitungan hari, Supriono mendapat sumbangan uang hampir Rp 50 juta. Bahkan ada masyarakat yang menawarinya pekerjaan dan bersedia mengasuh Muriski Saleh.

Berbekal uang itu, pria kelahiran Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat, itu mengaku akan meninggalkan pekerjaan lama sebagai pemulung dan memulai hidup baru di Bogor sebagai pedagang pakaian, termasuk menyekolahkan Muriski Saleh.

Belakangan, ada kabar teranyar yang diwartakan Warta Kota (24/6), Supriono akan menggeluti profesi sebagai penjual mie. Keputusan itu dia ambil setelah -diantar oleh Warta Kota— mengunjungi kantor PT Bogasari Flour Mills di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (23/6). Di sana, Supri bertemu dengan petinggi perusahaan terigu terbesar di Indonesia itu.

“Saya sudah mantep ingin jualan mie. Kalau kerja, di bagian apa? Kalau jualan bisa besar meski sekolah rendah,” ujar Supri se usai bertemu Philip S Purnama, MBA., Office of CCO Bogasari, yang juga Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. ■ (AF)

Supriono

Apakah kerangka manusia kecil berusia 18.000 tahun adalah saudara tua dari manusia yang hidup di abad modern, ataukah keturunan manusia baru?



Orang Purba Flores

“Pada masa lalu kami makan binatang.” Yang berbicara seperti itu adalah Viktor Jurubu, seorang petani usia 60-an tahun. Mengenakan kaos oblong dan sarung, Viktor tampak kecil seperti manusia gua yang sedang dia gambarkan. Kecuali tingginya kira-kira 140cm.

Dalam dunia antropologi, ukuran Jurubu yang kecil merupakan berita besar karena dia dan 246 warga desa Rampasasa lainnya di Pulau Flores, mengaku bahwa mereka keturunan dari sebuah suku berbadan kecil dan berbulu lebat yang mereka sebut “manusia cebol.”

“Kami tidak punya pisau tetapi menggunakan batu,” kata Jurubu sebagaimana dikutip oleh koresponden Zamira Loebis yang dikemas Simon Elegant dalam majalah *Time* (edisi Juni 2005).

Kata Jurubu, “kami bahkan tidak tahu bagaimana membuat api.” Jurubu, pria berambut keriting abu-abu dipotong pendek, bertulang rahang menonjol dan kelopak mata yang dalam, memandang ke arah 30 rekan sedesanya yang duduk mengelilinginya untuk membuktikan ucapannya.

Mereka mengangguk-angguk, dan Jurubu melanjutkan bicaranya tentang ketika nenek moyang mereka yang pemalu hidup terpencil dari dunia luar di dalam gua Liang Bua, terletak di bukit

padas kira-kira satu kilometer dari desa Rampasasa.

Sekali lagi mereka memperlihatkan tanda setuju.

“Katakan bagaimana Paju meninggalkan gua dan menikah dengan wanita biasa,” tiba-tiba salah seorang di antara mereka berteriak, “dan bagaimana kita keluar, lantas menetap di desa Rampasasa.” Semula Jurubu merasa enggan. Setelah berhenti sejenak, dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi kata-katanya lenyap di tengah deru suara tak sabar yang berlomba-lomba ingin menuturkan kisah tersebut.

Para warga Rampasasa sendiri tidak bisa menuturkan secara panjang lebar yang berkaitan dengan pengakuan mereka tentang mata rantai genekologi mereka. Soalnya mereka hanyalah masyarakat awam Flores yang sangat miskin. Tetapi sulit untuk mengabaikan sejumlah manusia kate, khususnya di antara para tetua, kebanyakan setara dengan anak usia 10 tahun. Sekitar enam generasi keturunan mereka telah menikah dengan masyarakat luar, kata kepala suku Rampasasa, Alfredus Ontas, hanya menyisakan sedikit manusia kecil yang sesungguhnya.

Tetapi untuk membuktikan nenek moyang mereka, dia dan rekan-rekannya dengan penuh semangat memperlihatkan foto para kerabat mereka yang belum lama meninggal yang mereka sebut sisa “orang-orang pendek” yang lebih murni.

“Saudara-saudara kami di dalam foto ini tingginya hanya 110 cm,” kata Ontas dengan bangga. Senyum lebarinya memperlihatkan barisan giginya yang berwarna merah langu lantaran menyirih. Seseorang yang lebih tua yang tingginya 135 cm, berbulu lebat menutupi lengan dan kakinya. “Karena berbulu lebat para nenek moyang kami bersembunyi di gua Liang Bua,” kata Jurubu. “Mereka malu.”

Tim ahli antropologi Australia dan Indonesia melaporkan di dalam majalah *Nature* Oktober lalu bahwa di Liang Bua mereka menemukan tulang belulang tujuh orang yang usianya antara 13.000 sampai 95.000 tahun. Tulang-tulang belulang lainnya diketemukan kemudian. Di antara penemuan tersebut terdapat kerangka seorang wanita berusia 18.000 tahun. Dibandingkan dengan manusia sekarang, tingginya sama dengan anak usia 6 tahun.

Karena kerangka wanita itu tampak mirip manusia (*humanoid*), bukan manusia, ukuran otaknya kecil, maka para peneliti menyimpulkan dia bukan manusia purba (*Pygmy*)—seseorang yang pendek namun bentuk normal dari *Homo sapiens* yang diketemukan di Afrika dan Asia Tenggara—tetapi sebuah keturunan baru yang dinamakan para penemu tersebut sebagai *Homo floresiensis*. Keturunan ini, kata mereka, mungkin cabang dari *Homo erectus*, yang secara luas diterima

sebagai nenek moyang *Homo sapiens*.

Berita itu mengisyaratkan bahwa kedua jenis manusia yang berbeda itu, *H. sapiens* dan *H. floresiensis*, hidup di muka bumi pada saat yang bersamaan. (Keberadaan *H. sapiens* sekitar 250.000 tahun yang lalu). Kisah tersebut menjadi berita utama di seluruh dunia-*Time* meliputnya November lalu, dan *National Geographic* memuat tulisan panjang di dalam edisi April 2005.

Namun sekarang, kehadiran manusia kecil yang tinggal di gua Liang Bua telah menimbulkan keraguan tentang teori jenis manusia yang terpisah, dan menandai perbedaan tajam di antara para ilmuwan tentang keabsahannya. Medan tempur menjadi semakin jelas, di mana pihak yang satu mendiskreditkan pihak lainnya.

Rampasasa, "membuat argumen sempit itu menjadi sepenuhnya tidak relevan," kata Alan Thorne, seorang antropolog di Australian National University, dengan nada skeptis. "Ada banyak manusia purba di kawasan tersebut. Berkenaan dengan tulang belulang tersebut, kemungkinan seorang purba yang sakit," sanggah Peter Brown, seorang paleontolog pada England University, yang bersama-sama menulis di *Nature* dengan rekannya, arcaelogis Michael Moorwod.

"Sudah tentu ada manusia kecil di Flores, tetapi mereka tidak punya otak sepertiga dari otak kita, atau tampilan yang tidak lazim atau berlegan sangat panjang seperti *H. floresiensis*. Mereka sama seperti manusia modern yang kecil."

Bagi Henry Gee, redaktur *Nature* yang bertanggung jawab menyeleksi publikasi artikel asli *H. floresiensis* perseteruan tersebut suatu hal yang seringkali terjadi ketika ada penemuan baru. "Ilmu pengetahuan merupakan masalah yang diperdebatkan dan evolusi manusia jadi bahan perdebatan. Setiap seseorang menemukan jenis manusia baru banyak orang memperdebatkan dan mengatakan itu adalah orang utan atau manusia penyakitkan."

Gee yang mengatakan para pengeritik tidak bisa mengguncangkan keyakinannya bahwa keturunan baru telah ditemukan, mengutip contoh penemuan lain yang diperdebatkan, *Australopithecus africanus* tahun 1924, apa yang disebut "mata rantai yang hilang" antara orang utan dan nenek moyang manusia.

(Sh)

Revolusi Penelitian Dinosaur

Kalau anda diminta untuk membayangkan bentuk dan rupa dinosaur, anda pasti tidak akan susah membayangkannya. Ambil saja contoh bentuk T Rex, semua orang yang pernah menonton film Jurassic Park karya sutradara terkenal Steven Spielberg pasti mengetahui bentuk dan ukuran dari mahluk raksasa itu. Tetapi bagaimana kalau anda diminta membayangkan bentuk organ dalam dari T rex, pasti akan jauh lebih sulit untuk menggambarkannya.

Mark Norell kepala bagian paleontologi di museum sejarah di New York pada *Newsweek* edisi 27 Juni 2005, mengatakan bahwa kajian ilmunya telah berubah menuju arah spekulasi akan psikologi yang dimiliki dinosaur, ekologi, dan bahkan tingkah lakunya. Ia juga mengatakan bahwa cabang ilmu pengetahuan ini tidak lagi hanya digerakkan oleh penemuan-penemuan, tetapi dengan melakukan berbagai riset dan percobaan.

Perhatian ilmuwan sekarang ini tidak lagi hanya sekedar merekonstruksi bentuk tubuh dinosaur dari tulang belulang yang berhasil

ditemukan, namun mereka sudah berusaha untuk mengetahui bagaimana bentuk ukuran organ dalam dan letaknya dalam tubuh dinosaur. Hal ini dapat dilakukan sekarang dengan adanya penemuan fosil yang baru dan kemajuan teknologi yang pesat, khususnya teknologi computer. Tulang belulang yang berdiri diam di museum-museum selama bertahun-tahun sePERTINYA berteriak menceritakan rahasia mereka kepada para ilmuwan yang sudah melengkapi dirinya dengan alat ct scan dan seperangkat super komputer. Perangkat alat ct scan dengan mudah dapat memberikan gambaran bentuk tulang belulang yang tertutup dalam lapisan batu, tanpa harus memecahkannya terlebih dahulu, sehingga para peneliti tidak lagi harus merasa khawatir akan fosil yang sudah menjadi satu dengan lapisan batu itu rusak. Saat ini bentuk dan ukuran tubuh dinosaur dapat diproyeksikan dengan hanya menggunakan perangkat lunak tiga dimensi di komputer, tidak lagi harus mengandalkan pembuatan model patung dengan menggunakan gips.

Tantangan baru bagi para ilmuwan paleontologi pada masa ini adalah bagaimana mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari fosil-fosil yang sudah diketemukan itu dengan melakukan berbagai riset dan percobaan.

Dari satu buah tulang dinosaur yang sudah tertimbun berjuta tahun lamanya di bawah bumi para ilmuwan kini dapat mengetahui kandungan mineral apa yang terkandung di dalam tulang dinosaur bahkan sudah dapat menemukan keberadaan pembuluh darah dalamnya. ■ (Ch)



Program Microsoft Tekan Pembajakan

D elapan dari sepuluh software yang digunakan di Indonesia adalah bajakan. Laporan yang dikeluarkan oleh International Data Corporation, sebuah perusahaan riset yang bekerja untuk Business Alliance (BSA) di Amerika ini menempatkan Indonesia pada peringkat lima pembajakan pada 2004 setelah Vietnam, Ukraina, Cina, dan Zimbabwe.

Peringkat lima ini mungkin tidak mengada-ngada mengingat bajakan tidak hanya merambah hingga pengguna individu dan warnet, tetapi juga seluruh institusi termasuk institusi pendidikan dan institusi pemerintah. Hampir di seluruh mal atau pusat perbelanjaan berdiri kios-kios yang menjajakan bajakan. Kios-kios kecil yang berserakan di lingkungan kampus juga turut 'meramaikan' pasar bajakan. Belum lagi, sebuah 'kredo' yang sudah mengakar, "Kalau bisa gratis, buat apa bayar..."

Dari aspek legalitas, upaya penegakan Hak Kekayaan Intelektual dengan menekan pembajakan yang tertuang dalam UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 tampaknya masih harus melalui perjalanan yang sangat panjang. Berdasarkan UU tersebut, seseorang yang melakukan pembajakan akan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda 200 juta rupiah.

Pemberantasan pembajakan tidak bisa hanya sebatas 'sweeping' warnet, tetapi harus sampai ke akar-akarnya. Model pemberantasan pun bisa mengambil dua cara, persuasif atau rep-

resif. Mungkin, tindakan aparat keamanan bersama BSA menggerebek berbagai warnet belakangan ini merupakan cara represif untuk menekan penggunaan bajakan. Lalu bagaimana tindakan terhadap produsen bajakan? Itu menjadi satu pertanyaan.

Sedangkan pendekatan persuasif yang dilakukan oleh beberapa pengembang untuk menekan penggunaan bajakan akhir-akhir ini cukup banyak terekam dalam pemberitaan di media massa seperti *Kompas*, Senin, 13 Juni 2005 ('Legal') dan Rabu, 15 Juni 2005 (Hindari Pemerasan Warnet dengan Rental Agreement); *Republika*, Rabu, 22 Juni 2005 (Tak Ada Amnesti) dan Jumat, 17 Juni 2005 (Petani Pun Melek Komputer); *Bisnis Indonesia*, Jumat, 17 Juni 2005 (Reformasi Warnet di Tengah Isu Bajakan); *Rakyat Merdeka*, Rabu, 22 Juni 2005 (Microsoft Bantu Warnet Ber Legal) dan Jumat, 17 Juni 2005 (Microsoft Gelar Sistem Poin untuk Warnet).

Hampir semua media yang disebutkan ini memberitakan beberapa program dan langkah persuasif yang dilakukan oleh Microsoft, pengembang

sistem operasi Microsoft Windows yang banyak digunakan di Indonesia.

Program-program Microsoft yang sudah berjalan meliputi program untuk warnet yang diberi nama *Microsoft Rental Agreement for Internet Cafe* yang dimulai bulan April lalu. Lewat program itu, warnet-warnet yang memiliki *software* Windows asli berhak menyewakan komputernya kepada pihak lain tanpa harus takut dianggap melanggar hukum.

Program ini juga meliputi pembelian lisensi produk Microsoft secara bertahap, pelatihan teknologi, pelatihan untuk mengenali dan mengerti pemakaian lisensi legal, dukungan pemasaran, serta promosi bersama.

Microsoft juga menerapkan sistem poin bagi warnet yang berlisensi. Contohnya, warnet yang mempunyai sejumlah lisensi pada komputernya akan mendapat poin tertentu, yang bisa ditukarkan dengan *printer* dan perangkat elektronik lain.

Selain itu, sejak 1998, Microsoft mengembangkan program sosial bertajuk Unlimited Potential. Melalui program tersebut, Microsoft menyediakan bantuan berupa hibah dana maupun produk. Salah satu program yang dilaksanakan di Indonesia adalah donation kepada lembaga non profit dan non government organization (NGO).

Untuk tahap pertama tahun 2005 ini, *Microsoft* memberikan dan lisensi senilai Rp 2,8 miliar kepada 18 organisasi *non-profit* yang mayoritas bergerak di bidang pelestarian alam, pelatihan IT, keselamatan anak-anak, dan pembinaan masyarakat. (mlp)

Indonesia Peringkat Lima Pembajakan Peranti Lunak

Menurut International Data Corp., Indonesia menempati peringkat lima pembajakan peranti lunak pada 2004. Peringkat teratas diduduki Vietnam, Ukraina, Cina, dan Zimbabwe. Tingkat pembajakan Indonesia, menurut hasil studi itu, mencapai 87 persen, turun satu persen dari tahun sebelumnya. Padahal rata-rata tingkat pembajakan di Asia Pasifik berkisar 53 persen. Namun, penurunan ini tidak diikuti dengan penurunan nilai kerugian yang justru meningkat menjadi US\$ 183 juta dari US\$ 158 juta pada 2003.

Hotline Anti Pembajakan Software

Business Software Alliance (BSA), organisasi nirlaba yang mewakili vendor-vendor peranti lunak global meluncurkan nomor telepon *hotline* anti pembajakan *software* di 0-800-1-BSA-BSA (0-800-1-272-272). Layanan ini dirilis resmi pada hari Selasa (22/03) di Jakarta. Lewat nomor bebas pulsa yang terbuka setiap hari mulai jam 8.30-17.30 tersebut masyarakat bisa memberikan informasi mengenai perusahaan yang ditengarai menggunakan *software* bajakan. Sebagai apresiasi atas laporannya, BSA memberikan *reward* hingga Rp 50 juta.



Keroncong Terasing di Negeri Sendiri

Bagi pecinta musik remaja, lagu keroncong hanya buat para Lansia. Hampir semua stasiun televisi melirik musik keroncong dengan sebelah mata.

Lagu Bengawan Solo, ciptaan Gesang, suatu malam awal Mei lalu, mengalun merdu di sebuah hotel mewah bertaraf internasional. Penanyinya, pelantun lagu keroncong ternama, Sundari Soekotjo.

Terkucil di negeri sendiri, musik keroncong digandrungi di sejumlah negeri asing, seperti Jepang, Prancis, Inggris dan Belanda. Tak banyak kaum muda yang menyukai musik keroncong. Mereka menolak langgam keroncong, karena dianggap hanya membuat mereka mengantuk.

Hanya TVRI yang menayangkan program tetap musik keroncong. Kadang-kadang stasiun televisi swasta Indosiar menyelipkan satu dua lagu keroncong dalam acara musik nostalgia. Sedangkan stasiun-stasiun televisi lainnya, ANTV, Trans-TV, Global TV,

TPI, RCTI, SCTV dan Metro TV.

Musik keroncong kalah pamor dengan musik pop dan dangdut. Indosiar dan RCTI menayangkan kontes musik yang digandrungi anak-anak muda, AFI (Akademi Fantasi Indonesia) dan RCTI dengan kontes Indonesian Idol. Sedangkan TPI menayangkan lomba musik dangdut, Kontes Dangdut Indonesia (KDI). Kontes-kontes semacam itu telah mengangkat rating iklan ketiga stasiun televisi tersebut.

Namun demikian, musik keroncong tak perlu berkecil hati. Sebab, kadangkala hotel-hotel bertaraf internasional menampilkan musik keroncong untuk mereka yang bernostalgia dengan lagu-lagu, misalnya ciptaan Ismail Marzuki dan Gesang. Pondok pesantren terbesar di Asia, Al-Zaytun memberi tempat terhormat bagi musik keroncong. Hiburan keroncong selalu ditampilkan pada

setiap acara menerima tamu-tamu terhormat Al-Zaytun.

Sebuah kehormatan bagi musik keroncong, karena salah seorang penyanyi keroncong terkenal, Tuti Tri Sedyo, September nanti tampil di sebuah acara show di Turki. Agustus tahun lalu, dia show di London, dan September di Yunani. Tuti juga tampil menghibur para istri pemimpin Asia-Afrika di TMII bersama Sundari. Tuti dan Sundari yang memilih jalur musik keroncong tak pernah kehabisan job.

Penyanyi-penyanyi keroncong lain yang setia di jalur musiknya, menurut catatan Kompas (17/6), seperti Mus Mulyadi, Waldjinah, Toto Salmon, Sukardi, Mamiek Marsudi, Hetty Handayani, Sri Widadi, dan Sri Dian. Hanya penyanyi serba bisa, Hety Kus Endang sudah sejak lama tidak tampil di blantikan musik keroncong.

Tuti belakangan ini sibuk dengan rekaman enam lagu keroncong terbarunya, akan dirilis sebulan lagi. Juara Bintang Radio dan TV tahun 1986 untuk jenis keroncong itu, sebentar lagi berumroh. Sundari, tulis Kompas, tidak kalah sibuknya dari Tuti. Terakhir dia tampil di Rumah Budaya Tembi Yogyakarta. Sundari juga tampil memukau pada ulang tahun pengusaha terkemuka H. Probosutedjo, awal Mei lalu, di Hotel Le Meridien.

Menurut Kompas (17/6), ditilik dari aktivitas dua penyanyi ternama ini, sebenarnya harapan masih besar bagi musik keroncong, meskipun sering dicemaskan akan tergusur oleh musik pop. Dalam arahan, Ada Apa dengan Keroncong (Desember 2004), keemasan seperti itu masih mencuat. Paguyuban Kesenian Kelompok Kompas Gramedia, penyelenggara sarasehan tersebut, mengamati bahwa musik keroncong yang pernah berjaya tahun 1950-an sampai 1970-an, tampak terpinggirkan oleh musik industri yang sangat pesat.

Namun Sundari dan Tuti merasa yakin bahwa segmen keroncong akan tetap eksis, kendati penggemarnya tak sebanyak musik pop. Musik keroncong memang digemari berat oleh kelompok usia tua. Karena itu selalu hadir pada setiap acara di Istana.

Di dalam sarasehan tersebut ada usul untuk menyegarkan musik keroncong. Tetapi Tuti, Sundari dan Hendarmin Susilo, produser rekaman kaset dan CD, tetap merasa nyaman dengan jalur musik yang mereka pilih.

Bisa jadi karena musik keroncong jauh dari gangguan para pembajak. Sh



Balada Si Ganteng Cari Pembantu

Tayangan reality show tentang pembantu rumah tangga untuk Ari Wibowo menuai protes dan dianggap melecehkan martabat.



Siapa yang tidak mau jadi pembantu Ari Wibowo yang ganteng itu. Apalagi diiming-imingi gaji Rp 10 juta per bulan selama setahun. “Peminatnya membludak,” kata aktor ganteng itu kepada Media Indonesia, dimuat Rabu, 22 Juni 2005.

Ari memang sedang mencari pembantu rumah tangga (PRT), diprakarsai oleh rumah produksi MD Entertainment yang akan membuat tayangan reality show berjudul Ari Wibowo Mencari Pembantu (AWMP).

Entah tergiur oleh jumlah gaji yang dijanjikan atau karena tampang ganteng laki-laki indo Jerman itu, audisi yang sedianya dilakukan di 9 kota dipadati peserta yang sangat banyak.

Ari mengaku menangis dalam hati saat mengetahui banyak dari peserta beralasan ikut karena perlu biaya mengobati anaknya, menyekolahkan anaknya, atau membantu keluarganya yang miskin. Namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada tim juri. Dia tidak

peduli jenis kelamin, status maupun usia orang yang terpilih nanti.

Pada hakekatnya, Ari memang membutuhkan pembantu. Karena selama ini dirinya sendiri yang mengerjakan segala urusan rumah tangga, dari mencuci, menyetrika dan mengepel. Sebagai lajang, Ari tinggal sendirian di sebuah apartemen. Nah, nanti jika acara ini sudah berlangsung, Ari akan pindah ke sebuah rumah.

Jika Ari beranggapan acara ini sangat mulia karena bisa membantu orang yang memang membutuhkan pekerjaan dan biaya, lain lagi dengan beberapa LSM yang mengajukan protes keras. Mereka beranggapan acara itu melecehkan posisi PRT.

Protes dilayangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), juga oleh Advokasi Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga (GAPH-PRT). Namun, audisi berjalan terus. Demikian Investor Daily, Rabu, 22 Juni 2005.

Mengecilkan peran

Direktur LBH APIK Jakarta Ratna Batara Munti M.Si mengatakan, hal pertama yang diprotes pihaknya adalah penggunaan kata ‘pembantu’ dalam konsep acara. Hal itu dianggap mengecilkan peran PRT yang sebenarnya penting dalam rumah tangga.

Tayangannya pun diprotes karena bertentangan dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Bahwa iming-iming gaji Rp 10 juta mengarahkan orang pada besarnya uang itu dan dimensi ketenagakerjaannya tidak menjadi pertimbangan penting, padahal pada dasarnya acara itu sama saja dengan rekrutmen tenaga kerja.

Ratna, seperti dituturkannya di tabloid Nova No. 902, 12 Juni 2005, khawatir acara itu hanya akan mengeksploitasi seakan-akan PRT layak dijadikan tontonan dan hiburan.

Proses audisi juga dikritik oleh LSM yang kerap membela kaum perempuan ini. PRT adalah pekerjaan profesional yang mestinya tidak melalui audisi. Apalagi jurinya ada yang dari modelling. Pesertanya disuruh menyanyi dan berjoget. Menurut pihaknya, ini mengarah pada eksploitasi karena mereka hanya ingin uang dan tinggal dengan Ari Wibowo.

Ratna yang mewakili sejumlah LSM ingin melindungi PRT sebagai kelompok yang lemah dan rentan, dari mimpi-mimpi yang ditawarkan tayangan reality show.

Ari sendiri mengaku kecewa dan sedih mendengar protes-protes tersebut. Sebab, dia sama sekali tidak bermaksud melecehkan. Baginya, pembantu sama dengan mitra kerja yang saling membutuhkan.

Direktur MD Entertainment, Manoj Punjabi pun mengamini. Sementara itu, Budi Setiawan dari SCTV berpendapat, acara itu merupakan suatu kreatifitas dan memiliki nilai hiburan yang baik.

“Setiap orang boleh berpendapat asalkan secara wajar,” komentar Arswendo Atmowiloto, pengamat televisi. “Acara AWCP itu menurut saya memiliki unsur hiburan yang baik. AWCP dinilai menawarkan konsep baru, alias bukan saduran atau mengekor program reality show negara lain.■

Eyang Titiek Terlahir Kembali

Siapa tak kenal Titiek Puspa (67). Seniman serba bisa yang meski sudah gaek tetapi tetap sehat dan awet muda. Titiek yang berkiprah sebagai pemain film, penyanyi dan pencipta lagu itu saat ini sedang gembira dan terharu. Sebuah album berisi sekumpulan lagu-lagu ciptaan Titiek Puspa diluncurkan Rabu, (22/6).

Album berjudul From Us To U itu dirilis Musica dan diselenggarakan dengan pagelaran musik oleh sederet penyanyi terkenal. Seperti dilaporkan Kompas, Jumat, 24 Juni 2005, album tersebut berisi lagu-lagu ciptaan Titiek Puspa yang sangat populer di kurun waktu 1960-an hingga 1980-an. Seniman yang rendah hati itu memuji penampilan semua artis yang tampil malam itu dengan membawakan karya-karyanya.

Diakuinya, semula ia merasa skeptis saat penggarapan album tersebut yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi dan beberapa grup musik masa kini. Mereka adalah Project Pop, Peter Pan, Seurieux, Chrisye, Iwan Fals, Ungu, David dan Emil Naif, Kahitna dan Rossa.

“Apa para penyanyi muda ini mau dan bisa nyanyiinnya. Ini kan lagu-lagu zaman dulu. Pas dengar, saya merinding, serasa di awing-awing. Anak-anak ini kok gila semua, semua nyanyian bisa saya terima,” katanya seperti dilaporkan Warta Kota, Jumat, 24 Juni 2005.

Tanpa menghilangkan esensinya, para penyanyi itu bisa menyanyikan dengan cara yang berbeda.